



**DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP GEORGIA
DALAM KONFLIK RUSIA-GEORGIA
PERIODE 2001-2010**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains (M.Si) Dalam Ilmu Hubungan Internasional**

NAMA : DEVI OFTASARI

NPM : 0806482144

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Devi Oftasari

NPM : 0806482144

Tanda Tangan :

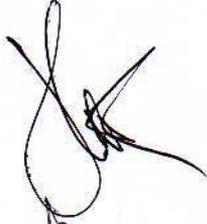
Tanggal : 28 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Devi Oftasari
 NPM : 0806482144
 Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
 Judul Tesis : Dukungan Amerika Serikat terhadap Georgia dalam
 Konflik Rusia-Georgia Periode 2001-2010.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, MS, M.Sc. ()

Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, MA. ()

Pembimbing : Dr. Hariyadi Wirawan ()

Penguji Ahli : Bantarto Bandoro, SH, MA. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Juni 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devi Oftasari
NPM : 0806482144
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Dukungan Amerika Serikat terhadap Georgia dalam Konflik Rusia-Georgia
Periode 2001-2010**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2011

Yang menyatakan

(Devi Oftasari)

KATA PENGANTAR

Saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah, petunjuk-Nya yang diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa di Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang berharga telah saya dapatkan di HI UI selama kurang lebih dua tahun terakhir ini.

Saya menyadari pentingnya suatu usaha keras, doa, dan dukungan serta semangat dari orang lain. Penulisan tesis ini merupakan salah satu usaha keras yang saya lalui selama beberapa bulan terakhir. Saya bersyukur pada akhirnya usaha keras itu membuahkan hasil yang manis, yaitu saya dapat menyelesaikan tesis ini. Dukungan dan bimbingan secara terus menerus diberikan oleh pembimbing saya, Dr. Hariyadi Wirawan. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Sebagai penulis saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tesis ini. Oleh karena itu, saya memohon maaf atas kekurangan dalam tesis ini. Semoga bisa diperbaiki di masa mendatang.

Akhir kata, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Juni 2011

Devi Oftasari

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan tesis ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan, yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberi saya nyawa, akal pikiran, rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk-Nya, serta segala nikmat yang tak terhingga. Karena Dia-lah saya dapat menjalankan kehidupan yang penuh cobaan dan rintangan dengan hati ikhlas. Dia juga telah memberi saya warna kehidupan yang sangat indah yaitu keluarga yang sangat berarti buat saya.
2. Orang tua saya, H. Adi Warsito dan Hj. Siti Suharti, yang telah menjadi orang tua yang paling luar biasa. Dengan dukungan mereka, baik moral, spiritual, maupun finansial, saya tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun.
I love you so much.
3. Kakak-kakak saya, Mega Aristasari dan Wisnu Yudha. Serta Adik-adik saya, Fritta Auliasari dan Vian Rodhi Prayogo, yang memberikan dukungan dan semangat selama pengerjaan tesis ini.
4. Pandjie Galih Anoraga. Penyemangat hidup saya baik di saat suka maupun duka. Dia yang selalu ada buat saya dan sering mengesampingkan kepentingannya sendiri untuk bisa terus menemani dan mendukung saya.
Merci, mon cheri. Je t'aime bien toujours.
5. Kepada para dosen S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman akademis yang berharga. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Mas Hariyadi Wirawan, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membagi ilmunya kepada saya dalam mengerjakan tesis ini. Serta para dewan penguji, Mas Andi Widjajanto, Mbak Asra Virgianita, dan Pak Bantarto Bandoro yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun dan berguna di masa mendatang.

6. Kepada sahabat terbaik saya, Arifin Multazam. Sahabat yang selalu memberikan semangat, nasehat, dan teguran selama ini. Kepada abang saya, Lalu Afif yang selalu ada disaat saya butuh semangat dan dukungan. Senang sekali bias melewati masa pendidikan sarjana dan master bersama dengan kalian.
7. Kepada sahabat-sahabat saya yang lainnya, baik yang di Jakarta maupun di Surabaya, Rarassmita Nestiti, Aldila Kartika Silmi, Anggi Marissa Lubis, Shakti Indra Prasta dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Saya ucapkan terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Kepada teman-teman saya di Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan master di UI. Saya sangat senang bisa bertemu dengan orang-orang pintar dan hebat seperti kalian semua.
9. Kepada para staff di Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia yang telah membantu saya selama saya menempuh pendidikan master di HI UI.
10. Kepada keluarga besar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Cabang Jakarta Kramat, yang telah memberikan semangat bagi saya untuk tetap bisa menyelesaikan tesis saya walaupun berada dalam kondisi pekerjaan yang berat dan memusingkan.

ABSTRAK

Nama : Devi Oftasari
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Dukungan Amerika Serikat terhadap Georgia dalam Konflik Rusia-Georgia Periode 2001-2010

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang dukungan yang diberikan oleh AS terhadap Georgia dalam konflik yang melibatkan antara Rusia dengan Georgia. Selain itu penelitian ini juga untuk menggambarkan apa saja keinginan AS untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negaranya dalam mencapai tujuan negaranya di Eropa Timur, terutama di Georgia. Penjelasan mengenai kepentingan-kepentingan AS tersebut dengan menggunakan konsep *power* dan pendekatan teori *offensive realism*. Dengan konsep dan teori tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik antara Rusia dan Georgia terkait dengan kepentingan-kepentingan AS seperti kepentingan ekonomi terkait jalur pipa minyak dan gas, keinginan ekspansi AS ke wilayah Eropa Timur, khususnya Kaukasus, dan mengimbangi kekuatan Rusia di wilayah Eropa Timur.

Kata Kunci :

AS, Rusia, Georgia, Kaukasus, Eropa Timur, jalur pipa minyak dan gas, *balance of power*, ekspansi AS.

ABSTRACT

Name : Devi Oftasari
Study Program : International Relation Studies
Title : The United States' Supports Towards Georgia in Russia-Georgia's Conflict in the Period 2001-2010.

The aim of this thesis is to describe about the supports which has been given by US to Georgia in conflict between Russia and Georgia. It also describes the US' national interests in order to achieve its goals in Eastern Europe especially in Georgia. This thesis is analyzed by the concept of power and offensive realism theory. According to the concept and theory, the thesis has proved that the US' supports towards Georgia in Russia-Georgia's Conflict related to the US' national interests which are the US' economic interest in term of oil and gas pipeline projects, US' expansion goals toward the Eastern Europe especially in Georgia, and to balance Russia's power in the Eastern Europe Region.

Key Words :

US, Russia, Georgia, Caucasus, Eastern Europe, oil and gas pipeline projects , balance of power, the US expansion.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Digram, Gambar, Grafik, dan Tabel	xii
Daftar Singkatan	xiv
BAB I Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Pertanyaan Penelitian	8
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Signifikansi Penelitian	9
I.5 Tinjauan Pustaka	9
I.6 Formasi Konsep : Power	13
I.7 Kerangka Teori	14
I.7.1 Teori <i>Offensive Realism</i>	14
I.8 Operasionalisasi Variabel	21
I.9 Hipotesis	21
I.10 Model Analisa	22
I.11 Operasionalisasi Konsep	22
I.12 Metode Penelitian	24
I.13 Sistematika Penulisan	25
BAB II Konflik antara Georgia dengan Rusia	26
II.1 Gambaran Umum	26
II.2 Serangan Rusia ke Georgia	31
BAB III AS dan Rusia di Kawasan Kaukasus	38
III.1 Kebijakan Luar Negeri Rusia dan Dinamika Rusia di Kaukasus	38
III.2 Kebijakan Luar Negeri AS dan Dinamika AS di Kawasan Kaukasus	53
III.3 Kedekatan Georgia dengan AS	58

III.4	Jalur Pipa Minyak dan Gas Kaukasus	73
BAB IV	Dukungan Amerika Serikat terhadap Georgia dalam Konflik Rusia-Georgia	82
IV.1	Ekspansi AS di Eropa Timur dan Kawasan Kaukasus	82
IV.2	Kepentingan Ekonomi AS	87
IV.3	Mengimbangi Kekuatan Rusia di Eropa Timur	92
BAB V	PENUTUP	101
V.1	Kesimpulan	101
V.2	Rekomendasi	103
	Daftar Pustaka	105

DAFTAR DIAGRAM, GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL

DIAGRAM

Diagram 3.1 Persediaan Gas Alam Negara-Negara Tahun 2007	43
Diagram 3.2 Perbandingan Persediaan Gas Alam 10 Negara	44
Diagram 3.3 Ekpor Minyak Rusia Tahun 2009	46
Diagram 3.4 Importir Utama Minyak Rusia Tahun 2009	47
Diagram 3.5 Diagram prioritas bantuan AS ke Georgia	65
Diagram 3.6 Total Bantuan AS ke Georgia 1992-2008	66
Diagram 3.7 Negara Pengkonsumsi Minyak Terbesar	76
Diagram 3.8 Negara Penghasil Minyak Terbesar Tahun 2009	78
Diagram 3.9 Negara Penghasil Minyak Terbesar Tahun 2007	79
Diagram 4.1 Anggaran dan Belanja Pertahanan Militer	83
Diagram 4.2 Negara Pengkonsumsi Minyak Terbesar Tahun 2009	88

GAMBAR

Gambar 2.1 42 Titik Serangan Rusia di Georgia	33
Gambar 3.1 Jalur Pipa Minyak ke Eropa	45
Gambar 3.2 Jalur Pipa SCP, BTC, dan Alternatif.	77

GRAFIK

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Rusia dan Harga Minyak Dunia Tahun 1997-2003	42
---	----

TABEL

Tabel 3.1 Ekspor Rusia Tahun 2009	46
-----------------------------------	----

Tabel 3.2 Kegiatan Persiapan Negara-Negara Pecahan Uni Soviet Dalam Keanggotaan NATO	56
Tabel 3.3 FSA dan Bantuan AS ke Georgia Tahun 1992 – 2008	67
Tabel 4.1 Tabel Kekuatan Militer Negara-Negara Pecahan Uni Soviet Tahun 1995-1996	94

DAFTAR SINGKATAN

ACG	: Azeri-Chirag-Guneshli
AS	: Amerika Serikat
BTC	: Baku-Tbilisi-Ceyhan
CIS	: Commonwealth of Independent States
EG	: Economic Growth
FDI	: Foreign Direct Investment
FSA	: FREEDOM Support Act
GBSLE	: Georgia Border Security and Law Enforcement
GJD	: Governing Justly and Democratically
GTEP	: Georgia Train and Equip Programme
HA	: Humanitarian Assistance
HAM	: Hak Asasi Manusia
IIP	: Investing in People
IMF	: International Monetary Fund
JCC	: Joint Control Commision
MAP	: Membership Action Plan
Menlu	: Menteri Luar Negeri
MPC	: Mountain Peoples of the Caucasus
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NGO	: Non-Governmental Organization
PS	: Peace and Security
SCP	: South Caucasus Pipeline
SSOP	: Georgia Sustainment and Stability Operations Programme
UE	: Uni Eropa
WTO	: World Trade Organization

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sistem internasional setelah berakhirnya perang dingin banyak diyakini dalam keadaan damai dan stabil. Banyak pandangan yang melihat bahwa negara-negara, terutama negara-negara besar (*great power*) tidak melihat satu sama lain sebagai lawan militer yang potensial, tetapi menyebutnya sebagai “member of a family nations”. Prospek dari hubungan kerjasama negara-negara tersebut sangat menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian bagi semua negara-negara. Namun kompetisi dan perang diantara negara-negara yang diyakini akan hilang dari sistem internasional nyatanya tidak benar. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa perdamaian antar negara yang dijanjikan akan abadi ternyata gagal.¹

Setelah berakhirnya perang dingin negara-negara masih memiliki ketakutan terhadap keberadaan satu sama lain dan berusaha untuk saling meningkatkan kekuatannya. Walaupun perang dingin telah berakhir, keadaan sistem internasional yang anarki masih menjadi alasan dibalik perilaku negara-negara tersebut.² Sehingga, persaingan dan perang masih akan terus ada jika negara-negara tetap berperilaku seperti itu dalam sistem internasional.

Perang antara Georgia dan Rusia merupakan satu dari sekian banyak kasus dunia internasional yang mencerminkan kegagalan sistem internasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.³ Serangan Rusia ke Georgia pada Agustus 2008 sangat mengagetkan dunia internasional yang saat itu perhatian mereka terfokus pada pembukaan Olimpiade di Beijing.⁴ Dalam beberapa hari pasukan Russia

¹John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politic*, (New York : W.W.Norton & Company Ltd, 2001), hlm 1.

²*Ibid.*, hlm 307.

³Andrei P. Tsygankov, Blaming Moscow : The Power of the Anti-Russia Lobby, *Global Dialogue*, Winter 2009, hlm 64-73.

⁴ Jeffrey Mankoff, *Russian Foreign Policy : The Return of Great Power Politics*, (UK : Rowman & Littlefield Publishers Inc, 2009), hlm 1.

menyerang militer Georgia dan menguasai Ossetia Selatan, serta mengancam ibukota Georgia, Tbilisi. Kemudian Rusia mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan Ossetia Selatan dan provinsi separatist Georgia yang lain, Abkhazia, ketika disaat yang bersamaan protes dan ancaman bermunculan dari negara-negara Barat.

Konflik antara Rusia dengan Georgia ini berawal dari konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia yang ketiganya dulu merupakan bagian dari teritorial Uni Soviet. Pada saat Perang Dingin Ossetia Selatan merupakan bagian dari teritorial Georgia. Ketika Perang Dingin usai Ossetia Selatan berusaha untuk mendapatkan kemerdekaannya sendiri. Pada tahun 1991 dan awal tahun 1992 militer Georgia melancarkan tindakan *offensive* untuk melawan pergerakan pemberontak Ossetia Selatan. Pada tahun 1993 Georgia kembali terlibat dalam perang untuk mempertahankan integritas teritorialnya, kali ini ditujukan untuk mencegah pemberontak Abkhazia melepaskan diri dari teritorial Georgia.⁵

Keterlibatan Rusia sendiri pada awalnya saat itu Rusia menjadi mediator dalam upaya resolusi konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan pada tahun 1992. Peran Rusia disini sebagai upaya agar tidak pecah perang kembali antara Georgia dengan Ossetia Selatan.⁶ Pada Juni 1992 Rusia mengontrol perjanjian gencatan senjata antara Georgia dan Ossetia Selatan dan perjanjian tambahan pada Juli 1992 untuk bersama-sama membangun Komisi Pengawasan Bersama (Joint Control Commission/JCC) untuk mempromosikan stabilitas kawasan dan memonitor perdamaian diantara kedua negara tersebut. Kemudian pada tahun 1994 Rusia kembali bertindak sebagai pasukan perdamaian yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perang kembali antara Georgia dengan Abkhazia yang saat itu sedang terjadi gencatan senjata.⁷ Hubungan Georgia dengan Rusia pada saat itu terbilang dekat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik dengan Ossetia Selatan

⁵Charles King, The Five-Day War, *Foreign Affairs* (Vol 87, Number 6, November/December,2008), hlm 2-11.

⁶Robert Nalbandov, The Battle of Two Logics : Appropriateness And Consequentiality in Russian Interventions in Georgia, *Caucasian Review of International Affairs* (Vol. 3 [1], Winter 2009), hlm 20-35.

⁷Cory Welt, Balancing the Balancer : Russia, the West, and Conflict Resolution in Georgia, *Global Dialogue*, Summer 2009, hlm 22-36.

dan Abkhazia. Presiden Georgia saat itu, Eduard Shevardnadze, menyetujui untuk memperbanyak pasukan Rusia di wilayah perbatasan untuk menjaga keamanan dan setuju untuk menandatangani perjanjian yang berisi mempertahankan empat basis militer Rusia di Georgia selama 40 tahun. Sehingga yang terlihat pada waktu itu adalah peran Rusia yang sangat besar sebagai penjaga keamanan dan mediator dalam usaha resolusi konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Pasukan Rusia sudah bertugas di Georgia sebagai penjaga perdamaian selama 15 tahun sejak lepasnya provinsi Ossetia Selatan dan Abkhazia dari Georgia .

Seiring berjalannya waktu konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia tidak segera terselesaikan. Bahkan pada tahun 1998 konflik terjadi kembali antara Georgia dan Abkhazia. Keterlibatan Rusia di Georgia nyatanya tidak menghasilkan perdamaian bagi Georgia dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Pada akhir tahun 1990-an Presiden Shevardnadze mulai menjaga jarak dengan Rusia dan mulai menyusun strategi baru keberlangsungan hubungannya dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Bersama dengan Azerbaijan dan Uzbekistan, Georgia menolak untuk memperbaharui keanggotaannya didalam *Commonwealth of Independent States (CIS) Collective Security Treaty*, mengganti pasukan Rusia di wilayah perbatasan dengan tentaranya sendiri, dan membatalkan untuk mendirikan basis pertahanan pasukan Rusia jangka panjang sebagai pasukan penjaga perdamaian di perbatasan. Pada tahun 2001 Georgia bahkan menginginkan agar Rusia menarik pasukannya dari Tbilisi dan Abkhazia. Bahkan mulai terlihat adanya dukungan Rusia terhadap Ossetia Selatan dan Abkhazia agar mendapatkan pengakuan diplomatik dari Georgia sebagai negara merdeka.

Disaat yang bersamaan Georgia secara aktif mulai mengejar hubungan kerjasama dalam bidang energi dan keamanan dengan Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Kemudian Georgia menyampaikan kembali niatnya untuk bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* yang sudah pernah disampaikan sesaat setelah Uni Soviet kalah dalam Perang Dingin. Selain itu, Georgia juga mendukung rencana AS untuk membangun saluran pipa gas Baku-Tbilisi-Ceyhan, dimana minyak yang berasal dari Laut Kaspia akan transit secara langsung melalui Kaukasus

selatan mengelilingi Iran dan Rusia. Sehingga pada akhirnya akan mengurangi ketergantungan energi gas Georgia pada Rusia, dimana melalui jalur pipa minyak dan gas yang baru tersebut dari Laut Kaspia akan dibawa ke Baku, lalu ke ibu kota Georgia, Tbilisi, kemudian terakhir ke wilayah timur laut Turki.⁸

Bantuan militer AS kepada Georgia semakin intens pada tahun 1998 dimana saat itu bantuan yang diberikan berupa pelatihan militer untuk menjaga wilayah laut dan perbatasan, serta pelatihan untuk mengendarai helikopter tempur. Bantuan militer dari AS tersebut menjadikan AS dan Georgia sebagai mitra yang strategis. Dengan hubungan baru antara Georgia dengan AS pada awal 2000, Georgia memasuki babak baru pemerintahannya yang pro-Barat. Selama 11 tahun masa kepemimpinan Presiden Eduard Shevardnadze (1992-2003), Georgia menerima bantuan dari AS sebesar lebih dari 1,3 Miliar USD dan menjadikan Georgia sebagai negara dengan pendapatan per kapita terbesar penerima bantuan AS.⁹

Hubungan AS dengan Georgia semakin dekat pada saat peristiwa serangan 11 September 2001 di AS. Georgia sangat mendukung *war on terror* AS, karena pada saat itu Georgia juga menghadapi masalah yang sama terkait dengan militan Islam yang berjihad di dekat wilayah negaranya, Pankisi Gorge. Pada saat itu Georgia meminta dukungan kepada AS untuk menghadapi ancaman teroris tersebut. Hasilnya adalah AS memberikan paket bantuan militer berupa pelatihan militer *Georgia Train and Equip Programme* (GTEP) untuk mengatasi masalah terorisme tersebut. Sebagai balasannya Georgia mengirimkan lebih dari 800 pasukannya ke Irak sebagai bentuk dukungannya terhadap AS.

Pada tahun 2003 Georgia mengalami pergantian kepemimpinan dari Presiden Eduard Shevardnadze menjadi Presiden Mikheil Saakashvili. Presiden Saakashvili dikenal sebagai pemimpin muda yang mengorientasikan gaya kepemimpinannya berkiblat ke negara-negara Barat, dimana Saakashvili mencanangkan pembangunan negara Georgia dengan reformasi ekonomi liberal dan mengkampanyekan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

pemerintahan anti-korupsi, dan memberantas kriminalitas.¹⁰ Selain itu, pada awal pemerintahannya Saakashvilli menyerukan keinginannya untuk menyatukan kembali (reunifikasi) Ossetia Selatan dan Abkhazia kepada Georgia. Pada tahun 2004 militer Georgia mulai bekerjasama dengan NATO dalam *International Security Assistance Force* di Afghanistan. Disaat yang bersamaan Georgia berusaha tetap mempertahankan komitmennya untuk mengirimkan pasukannya untuk AS ke Irak disaat banyak negara-negara yang menarik pasukannya dari Irak. Pada akhir tahun 2004 Georgia terlibat dalam NATO *Individual Partnership Action Plan*.

Bagi Georgia hal yang terpenting adalah ketika AS tidak berbalik melawan Georgia ketika Georgia menggunakan kekerasan terhadap negara *secessionist*-nya.¹¹ Contohnya adalah ketika Georgia menggunakan kekerasan terhadap Ossetia Selatan pada Agustus 2004 dalam rangka usahanya untuk mengontrol distrik Djava yang letaknya strategis. Di tahun yang sama Georgia juga menolak tawaran Rusia untuk menandatangani *A Good-neighbor Treaty*. Sebaliknya, Georgia lebih memilih untuk menyelesaikan pertikaian dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan mencari dukungan politik dari AS. AS yang telah memberikan 4,5 Miliar USD beberapa dekade terakhir membantu melengkapi persenjataan Georgia dan melatih pasukan Georgia terutama untuk melawan terorisme.

Keinginan Georgia untuk bergabung dalam NATO sangat didukung oleh AS. Pada Januari 2008 Presiden Saakashvilli terpilih kembali menjadi presiden Georgia. Setelah terpilih kembali Saakashvilli semakin gencar dalam mewujudkan keinginannya untuk menjadikan Georgia sebagai anggota NATO. Saakashvilli mengamankan posisi Georgia dalam NATO *Membership Action Plan* (MAP) dalam pertemuan NATO di Bucharest pada April 2008. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan deklarasi NATO yang merupakan hasil rekomendasi AS yang berisi tentang perluasan keanggotaan NATO terhadap Georgia dan Ukraina. Isi deklarasi tersebut adalah sebagai berikut :

¹⁰Alexander Cooley, *Western Values as Power Politics : The Struggle for Mastery in Eurasia*, *Global Dialogue*, Winter 2009, hlm 82-91.

¹¹ Andrei P. Tsygankov. *Loc. Cit.*

“NATO welcomes Ukraine’s and Georgia’s Euro-Atlantic aspirations for membership in NATO. We agreed today that these countries will become members of NATO. Both nations have made valuable contributions to Alliance operations. We welcome the democratic reforms in Ukraine and Georgia and look forward to free and fair parliamentary elections in Georgia in May. Today we make clear that we support these countries’ applications for MAP. Therefore we will now begin a period of intensive engagement with both at a high political level to address the question still outstanding pertaining to their MAP applications.¹²

Namun kedekatan Georgia dengan AS tidak serta merta membawa perdamaian bagi Georgia dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Pada tahun 2008 Georgia kembali menyerang Ossetia Selatan. Penyerangan tersebut sebagai usaha Georgia untuk mengembalikan Ossetia Selatan ke teritorialnya.¹³ Tindakan Georgia menyerang kembali Ossetia Selatan tersebut menimbulkan reaksi keras dari Rusia. Reaksi keras Rusia tersebut adalah pada 8 Agustus 2008 tank-tank Rusia melintasi batas negara memasuki teritorial negara Georgia. Rusia yang mendukung Ossetia Selatan melakukan invasi berskala besar ke wilayah Georgia.

Serangan Rusia terhadap Georgia pada 8 Agustus 2008 yang lalu tersebut cukup mengagetkan dunia internasional. Penyerangan Rusia tersebut tak pelak membuat negara-negara tetangga Rusia merasa terancam. Karena dengan keberadaan tank-tank Rusia di Georgia menunjukkan kebangkitan kekuatan Rusia pasca kekalahannya pada era Perang Dingin.¹⁴ Perang antara Rusia dan Georgia ini juga terlihat sebagai upaya Rusia untuk menunjukkan kekuatannya sebagai aktor yang cukup diperhitungkan dalam sistem internasional.¹⁵ Pada dekade tahun 1998 sampai dengan tahun 2008 Rusia bangkit dari keterpurukannya sebagai negara lemah menjadi negara yang menunjukkan kekuatannya dengan memperlihatkan kekuatan militernya yang besar yang ditujukan untuk negara-negara tetangganya.

¹² Alexander Cooley, *Loc.Cit.*

¹³ Charles King, *Loc.Cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jeffrey Mankoff, *Op.Cit.*, hlm 3.

Serangan Rusia terhadap Georgia memunculkan banyak asumsi yaitu ketidaksukaan Rusia terhadap keinginan Georgia untuk bergabung menjadi anggota NATO. Pada bulan Maret 2008 dalam pertemuan NATO *Enlargement dan Bucharest Summit*, AS menyatakan untuk meneruskan rencana perluasan NATO dan memantapkan MAP untuk Georgia dan Ukraina. Saat itu, senator dari Partai Republik Richard Lugar menyatakan bahwa keikutsertaan Georgia dan Ukraina dalam NATO akan mempermudah Eropa, AS, dan NATO untuk melakukan ekspansi dalam mempromosikan *freedom* dan keamanan. Sementara itu pada bulan April 2008 dalam NATO Summit di Bucharest, Rusia menyatakan bahwa akan melakukan apa saja dengan kekuatannya untuk mencegah perluasan aliansi yang mengikutsertakan Georgia.¹⁶ Pernyataan tersebut menyiratkan ketakutan Rusia bahwa dengan keikutsertaan Georgia dalam pakta pertahanan NATO, secara militer kekuatan Rusia akan tertandingi oleh kekuatan militer Georgia. Pernyataan Vladimir Putin menyiratkan ketakutan tersebut :

“We view the appearance of a powerful military bloc on our borders . . . as a direct threat to the security of our country. The claim that this process is not directed against Russia will not suffice. National security is not based on promises.”¹⁷

Georgia memiliki arti yang penting bagi Rusia. Rusia masih menganggap Georgia sebagai wilayah kesatuannya karena secara historis dan kultural kedua negara tersebut memiliki kedekatan yang erat. Kepentingan Rusia di Georgia tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, yaitu menjaga wilayah di Eropa Timur terutama Georgia yang merupakan wilayah strategis untuk mewujudkan kepentingan ekonomi Rusia.¹⁸ Namun upaya untuk menjaga stabilitas kawasan tersebut selalu menemui berbagai hambatan seperti masalah *secessionism*, ekspansi infrastruktur militer Barat, militerisasi negara-negara Kaukasus dan persaingan *great power* terkait masalah energi. Kepentingan Rusia di Georgia juga tidak terlepas dari keinginan hegemoni di wilayah Kaukasus.

¹⁶ Andrei P. Tsygankov, *Loc.Cit.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Dalam konflik antara Rusia dan Georgia ini sangat jelas dukungan yang diberikan oleh AS terhadap Georgia. AS bahkan sempat mengancam Rusia dengan “serious consequence” jika tidak menarik diri dari Georgia.¹⁹ Ancaman tersebut merupakan bukti dukungan AS terhadap Georgia. Sejak itu hubungan antara Georgia dengan AS semakin dekat. Bahkan pada Januari 2010 Georgia dan AS resmi menandatangani kerjasama *strategic partnership* terutama dalam bidang pertahanan dan ekonomi.

Dengan adanya dukungan AS terhadap Georgia tersebut terlihat adanya persaingan yang terjadi diantara AS dan Rusia. Muncul banyak pendapat yang menganalisis mengenai perilaku AS dan Rusia sebagai great power dalam sistem internasional dalam kaitannya dengan Georgia.

I.2 Pertanyaan Penelitian

Keadaan sistem internasional setelah perang dingin berakhir digambarkan tidak lagi diwarnai dengan kompetisi keamanan dan perang diantara negara-negara besar. Keadaan tersebut didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa setelah perang dingin berakhir, AS muncul sebagai negara hegemon yang mendominasi sistem internasional dimana tidak ada negara-negara yang berani untuk bersaing atau melawan AS. Sehingga, keadaan sistem internasional dalam keadaan status quo. Faktanya, negara-negara besar atau kecil diseluruh dunia tetap memperhatikan perimbangan kekuatan dalam sistem internasional dan selalu bersaing untuk memperbesar power diantara negara-negara tersebut untuk masa depannya.

Dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik antara Rusia dan Georgia menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Mengingat bahwa akar konflik ini berasal dari konflik antara Georgia dengan negara *secessionist* itu sendiri, dan tidak terkait dengan Rusia ataupun AS. Selain itu dukungan AS terlihat berusaha untuk meng-*counter* keberadaan Rusia yang dalam konflik tersebut mendukung Abkhazia dan

¹⁹ Owen Matthews, A Respectable Russia, *Newsweek Magazine* (Vol.CLII No.9, September 1st, 2008), hlm 12-15.

Ossetia Selatan. Disini terlihat adanya persaingan antara dua *great power*, AS dan Rusia dalam konflik tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

“Mengapa AS mendukung Georgia dalam Konflik antara Georgia dengan Rusia dan apa kepentingan AS di Georgia pada periode 2001-2010?”.

I.3 Tujuan Penelitian

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian apakah dukungan AS terhadap Georgia merupakan keinginan AS untuk memenuhi kepentingan-kepentingan negaranya dalam mencapai tujuan negaranya di Georgia.
2. Diharapkan juga dengan penelitian ini maka akan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan AS sebagai *great power* dengan Georgia dan Rusia di Eropa Timur.

I.4 Signifikansi Penelitian

1. Dengan penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis dinamika perilaku *great power* dalam hubungan internasional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami kepentingan-kepentingan *great power* dalam hubungan internasional dilihat dengan menggunakan Teori *Offensive Realism*.

I.5 Tinjauan Pustaka

Bagian Tinjauan Pustaka pada penelitian ini, pertama, menggunakan tulisan Stephen Sestanovich yang berjudul “What Has Moscow Done : Rebuilding US-Russian Relations”. Tulisan ini menganalisis tentang hubungan AS dengan Rusia pasca penyerangan Rusia ke Georgia pada Agustus 2008. Ia berargumen bahwa pasca penyerangan Rusia ke Georgia tersebut terdapat persaingan *sphere of influence* atau

pengaruh di Georgia, dimana AS semakin menguatkan hubungannya dengan Georgia sebagai bukti dukungannya untuk Georgia.

Setelah Uni Soviet runtuh, AS dan negara Barat lainnya memberikan kesempatan kepada negara-negara pecahan Uni Soviet dan negara tetangganya untuk mendekati diri dengan negara-negara Barat. Pada tahun 1990-an negara-negara pecahan Uni Soviet menikmati berbagai macam bentuk dukungan dari Barat seperti dukungan bagi mereka untuk mendapatkan pasar internasional bagi minyak dan gas, dorongan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), mediasi untuk berbagai macam konflik separatis, kerjasama untuk melawan terorisme, pelatihan militer, dan sebagainya. Dukungan-dukungan dari Barat tersebut juga dirasakan oleh Georgia. Stephen Sestanovich berargumen bahwa AS berusaha mengeluarkan Georgia dari bayang-bayang pengaruh Rusia di Georgia seperti mendukung keinginan Georgia untuk bergabung dalam Uni Eropa dan NATO.

Selain itu Stephen Sestanovich juga melihat adanya usaha dari Rusia untuk mengalahkan pengaruh AS di Eropa Timur, terutama di Georgia. Contohnya adalah dengan kebangkitan ekonominya. Rusia berusaha untuk menghalangi proyek pipa gas AS di Eropa Timur dengan tetap berusaha menguasai jalur-jalur pipa gas di negara-negara Eropa Timur. Secara eksplisit Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa perluasan NATO di wilayah Eropa Timur merupakan ancaman nyata bagi keamanan negaranya.²⁰ Sehingga terlihat bahwa Rusia berusaha ingin tetap mempertahankan pengaruhnya di bekas negara pecahannya. Kesimpulan dari analisis Stephen Sestanovich ini adalah terjadi persaingan pengaruh dan kepentingan yang terjadi diantara Rusia dan AS di Georgia.

Tinjauan pustaka kedua adalah bab 6 dari buku “Russian Foreign Policy : The Return of Great Power Politics” yang ditulis oleh Jeffrey Mankoff yaitu “Back on Offensive?”. Tulisan ini menjelaskan tentang perilaku Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet dan pengaruh AS di Eropa Timur. Sejak kolapsnya Uni Soviet, negara-negara pecahan Uni Soviet dalam CIS berubah menjadi zona persaingan diantara negara-

²⁰ Stephen Sestanovich, What Has Moscow Done : Rebuilding U.S-Russian Relations, *Foreign Affairs* (Volume 87, Number 6, November/December, 2008), hlm 12-28.

negara besar seperti Rusia, AS, Eropa, dan China. Kedekatan beberapa negara CIS dengan negara-negara Barat tentunya mengkhawatirkan Rusia.

Setelah runtuhnya Uni Soviet Rusia berusaha dengan keras untuk kembali ke dunia internasional untuk mengembalikan kejayaannya di masa lalu. Namun nyatanya Rusia belum dapat merangkul negara-negara CIS yang cenderung untuk melibatkan “outsider” yaitu negara-negara Barat dalam memenuhi kebutuhan negaranya seperti dalam hal energi. Usaha Rusia untuk menanamkan pengaruhnya di negara-negara CIS tidak melalui jalan yang mulus. Untuk banyak kasus Russia harus bersaing dengan negara-negara Barat. Hubungan Russia dengan negara-negara Barat terlihat sangat kompetitif dan *zero-sum* pada saat ada kerjasama multilateral dalam mengawasi sumber energi di Kazakhstan, dimana Rusia, China, dan AS berusaha saling bekerjasama namun tetap tidak melupakan kepentingan masing-masing terhadap satu sama lain.

Perang yang terjadi antara Rusia dan Georgia terlihat sebagai titik balik hubungan Rusia dengan negara-negara CIS. Serangan Rusia ke Georgia menunjukkan bahwa keberadaan negara-negara Barat di negara-negara CIS tidak bisa lepas begitu saja dari Rusia dan negara-negara Barat tersebut tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan Rusia. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa hubungan antara Rusia dengan negara-negara Barat didalam wilayah negara-negara CIS semakin kompetitif jika dibandingkan dengan kompetisi kedua negara tersebut dimasa lalu. Selain itu persaingan tersebut memperlihatkan bahwa pemimpinan negara-negara Barat harus berani mengambil resiko apapun dalam hal kedekatannya dengan negara-negara CIS.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa setelah era tahun 1991 keinginan Rusia untuk mendekatkan diri dengan negara-negara tetangga bisa dikatakan tidak menjadi prioritas utama Rusia, karena saat itu Rusia lebih mementingkan ambisinya untuk menjadi aktor utama internasional. Pada kepemimpinan Primakov, Rusia mulai untuk lebih memperhatikan negara-negara CIS. Kemudian, pada masa kepemimpinan Putin, kebijakan Rusia terhadap negara-negara CIS terlihat lebih jelas.

Hal yang sangat terlihat adalah kompetisi diantara *great power*. Ekspansi Eropa ke timur, penempatan pasukan AS ke Asia Timur, dan persaingan yang semakin intens dalam hal energi dan infrastrukturnya, telah memperbesar posisi strategis negara-negara CIS bagi *great power*. Rusia semakin aktif dalam mempertahankan rezimnya dan berusaha memperkuat sektor energinya disekitar wilayah bekas Uni Soviet. Disaat yang bersamaan kebijakan Rusia untuk lebih dekat dengan negara-negara CIS harus berhadapan dengan kenyataan bahwa “outsider powers” atau negara-negara Barat telah memperbaharui kebijakan-kebijakan negaranya untuk bekerjasama dengan negara-negara bekas Uni Soviet.

Dengan kedekatan “outsider powers” dengan negara-negara CIS membuat pendekatan Rusia ke negara-negara tersebut menjadi lebih fleksibel, dalam arti tidak dengan *hard power* melainkan dengan *soft power*, begitu juga dalam menjalin hubungan dengan negara-negara besar lainnya. Sehingga hubungan Rusia dengan AS terlihat sangat kompetitif ,contohnya persaingan *sphere of influence* di Ukraina dan Georgia. Disatu sisi untuk mengembalikan status Rusia sebagai negara besar Rusia menggunakan *soft power* untuk mendekati negara-negara tetangga melalui pengawasan rute transportasi energi, kerjasama militer, kerjasama ekonomi, dan bentuk *soft power* lainnya. Namun dengan serangan Rusia ke Georgia memperlihatkan bahwa *hard power* Rusia masih dipakai.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sangat terlihat persaingan antara Rusia dan AS di Eropa Timur terutama di negara-negara CIS. Hal ini dikatakan sebagai hasil dari kebijakan luar negeri Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet yang berusaha mendekati kembali negara-negara CIS. Akibatnya kebijakan luar negeri tersebut secara tidak langsung menyebabkan persaingan dengan negara-negara besar, terutama dengan AS yang memang memiliki kepentingan negara di negara-negara CIS.

I.6 Formasi Konsep : Power

Dalam hubungan internasional, konsep *power* merupakan salah satu konsep fundamental yang dapat menjelaskan perilaku dan interaksi negara-negara dalam hubungan internasional. Esensi dari *power* adalah kemampuan untuk mengubah perilaku atau mendominasi. Realis tradisional mengukur *power* dari kemampuan militer suatu negara, dimana kemampuan militer negara tersebut memberi negara kemampuan untuk menyerang negara lain. Dengan kata lain, *power* yang dimiliki dalam militer dipakai untuk memastikan keamanan negara tersebut.²¹

Thomas Hobbes menyatakan dalam politik internasional, negara berjuang demi kekuasaan, *struggle for power, a war of all against all*.²² Morgenthau memberikan definisi *power* sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengontrol pikiran dan tindakan orang lain.²³ Inti konsep tersebut adalah pengaruh. Dapat dikatakan pula, semakin besar *power* maka semakin besar pengaruh. Dalam konsep *power* terdapat dua poin yaitu, *power* sebagai konsep relasional yaitu, *power* akan berfungsi bila suatu negara berhubungan dengan negara lain. Kedua, *power* sebagai konsep relatif yaitu mengenai kalkulasi kekuatan sendiri dan kalkulasi kekuatan negara lain. Jika dua poin tersebut digambarkan maka bila negara A memiliki kekuatan lebih dibanding negara B maka negara A memiliki pengaruh terhadap negara B dalam hubungan keduanya. Sejalan dengan dengan pendapat Morgenthau, Robert Dahl melihat kehadiran *power* ketika negara dapat mengontrol atau mempengaruhi negara lain. "A has power over B to the extent that [A] can get B to do something that B would not otherwise do".²⁴

John J. Mearsheimer menyatakan bahwa "power lies at the heart of international politics".²⁵ Ia berpendapat bahwa *power* berdasarkan pada kapabilitas material tertentu yang negara tunjukkan. Misalnya dalam *balance of power*, kekuatan

²¹Jill Steans & Lloyd Pettiford, *International Relations : Perspectives and Themes*, (England, Pearson Education Limited, 2001), hlm 29-30.

²²Charles W Kegley Jr. & Eugene R. Wittkopf, *World Politics : Trend and Transformation*, (New York, St. Martin Press, 1997), hlm 23.

²³*Ibid.*

²⁴John J. Mearsheimer, *Op.Cit.*, hlm 57.

²⁵*Ibid.*, hlm 55.

yang ditunjukkan adalah sesuatu yang berbentuk aset yang dikontrol oleh masing-masing *great power*, seperti senjata nuklir. Ia membagi *power* menjadi dua jenis, yaitu *latent power* dan *military power*. *Latent power* merujuk kepada kekuatan sosio-ekonomi yang akhirnya membentuk *military power* seperti kesejahteraan negara dan jumlah populasi. *Great power* membutuhkan uang, teknologi, tenaga, dan para personil untuk membangun kekuatan militer dan terjun dalam perang. *Latent power* lebih kepada material yang dibutuhkan untuk membangun *military power*, sedangkan *military power* dilihat berdasarkan ukuran dan kekuatan personil tentara negara yang didukung oleh peralatan militernya baik untuk kekuatan darat, laut, maupun udara. Sehingga *latent power* dan *military power* saling berhubungan satu sama lain. Dalam politik internasional, efektif atau tidaknya kekuatan suatu negara bergantung pada fungsi militer dan bagaimana kekuatan militer mereka dapat dibandingkan dengan kekuatan militer musuh-musuhnya.

I.7 Kerangka Teori

Dalam melihat permasalahan ini dan untuk menjawab pertanyaan penelitiannya maka penelitian ini menggunakan pendekatan teori yaitu teori *offensive realism*. Diharapkan teori ini dapat menjawab dengan jelas pertanyaan penelitiannya.

I.7.1 Offensive Realism Theory

"Great powers behave toward each other, emphasizing that they look for opportunities to gain power at each others' expense".²⁶ Teori *offensive realism* ini melihat bagaimana *great power* dapat bertahan di dunia ini tanpa ada kekuatan manapun yang dapat melindungi mereka satu sama lain. Teori ini terfokus pada *great power* karena teori mempunyai asumsi bahwa negara-negara *great power* ini mempunyai dampak yang besar terhadap politik internasional. *Great power* menentukan menempatkan kemampuan militer sebagai basis utamanya. Sebagai *great power* sebuah negara harus memiliki kapabilitas militer yang kuat untuk dapat menghadapi peperangan besar melawan negara yang paling kuat sekalipun di dunia.

²⁶ *Ibid.*, hlm 5.

Teori ini menggambarkan keadaan dunia internasional berdasarkan pada lima asumsi :

1. Negara adalah aktor utama dalam politik dunia dan mereka berada didalam sistem yang anarki. Sistem internasional dikarakteristikan dengan adanya persaingan-persaingan dan perang antar negara yang diakibatkan karena tidak adanya otoritas yang lebih tinggi dari negara.
2. *Great powers* memiliki kapabilitas militer yang bersifat *offensive*. Kapabilitas militer *great power* tersebut memiliki kemampuan untuk menghancurkan satu sama lain.
3. Negara tidak akan pernah merasa aman dan nyaman dengan perilaku negara lain terutama jika perilaku negara lain memiliki tujuan tertentu. Setiap negara tidak akan pernah bisa memprediksi maksud dan tujuan dari perilaku negara lain, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan satu sama lain.
4. *Great powers* menempatkan “survival” sebagai prioritasnya. Negara-negara berusaha mempertahankan integritas teritorial dan otonomi negaranya. Sehingga kedaulatan negara dan keberlangsungan hidup negaranya menjadi prioritas negara-negara.
5. Negara adalah aktor rasional yang bisa secara efektif membuat strategi-strategi yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatannya demi keeksistesiannya. Setiap negara pasti memperhitungkan aksi dan reaksi yang diakibatkan perilaku masing-masing negara. Negara selalu mempertimbangkan perilaku negara lain dan bagaimana respon negara terhadap perilaku negara lain. Begitu pula sebaliknya, negara juga mempertimbangkan perilaku negaranya sendiri dan bagaimana negara lain akan menyikapi perilaku negara tersebut.

Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, realisme percaya bahwa negara harus membangun kekuatan dan menghindari persahabatan dengan negara lain karena kesetiaan kepercayaan adalah suatu hal yang mustahil. Teori ini memandang bahwa *great power* melihat dunia sebagai dunia yang kompetitif yang melihat negara

lain sebagai sesuatu yang real dan berpotensi sebagai musuh. Tetapi, teori ini juga melihat bahwa negara lain dapat berpotensi untuk menambah atau meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kerjasama dengan negara lain bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan bersama, namun lebih pada keuntungan satu negara yang mutlak. Menurut teori ini keadaan *status quo* akan sangat jarang ditemui di dunia politik karena sistem internasional menciptakan suatu dorongan bagi negara-negara dalam melihat adanya kesempatan-kesempatan untuk menambah *power* dengan mengorbankan suatu persaingan dan melihat adanya keuntungan dari situasi-situasi tersebut ketika keuntungan-keuntungan yang didapat akan lebih banyak jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

“Great powers are always searching for opportunities to gain power over their rivals, with hegemony as their final goal”.²⁷ Tujuan utama dari suatu negara *great power* adalah menjadi negara hegemon dalam suatu sistem. Berbeda dengan pemikiran realisme klasik (*classic realism theory*) yang memandang bahwa secara alamiah negara-negara memiliki hasrat untuk selalu mengejar *power*, teori *offensive realism* ini memandang bahwa sistem internasional yang mendorong dan memaksa *great power* untuk memaksimalkan kekuatan mereka, karena dengan cara itulah mereka dapat meningkatkan keamanan negara mereka. Dengan kata lain, *survival* yang membuat negara-negara berperilaku agresif. *Great power* berperilaku agresif bukan karena mereka memiliki dorongan dari dalam untuk mendominasi, namun mereka melakukan cara tersebut untuk mencari kekuatan yang lebih besar lagi jika mereka ingin mempertahankan eksistensinya.

Sistem internasional yang anarki membuat *great power* merasa tidak nyaman dengan adanya keberadaan *great power* yang lainnya. Gambaran dasar mengenai logika pemikiran teori *offensive realism* ini adalah *security dilemma*. Dalam menjaga keamanan negaranya, *great power* cenderung menganggap bahwa apapun yang dilakukan negara lain, seperti peningkatan jumlah peralatan militer, bisa menjadi suatu ancaman. Keadaan *security dilemma* adalah ketika negara A meningkatkan kapasitas militernya sebagai hasil kebijakan luar negerinya, namun hal itu membuat

²⁷*Ibid.*, hlm 29.

negara B terancam sehingga ikut meningkatkan kapasitasnya. Keadaan ini disebut *security dilemma* karena sesungguhnya negara B tidak akan bisa memprediksi motif negara A meningkatkan kapasitas militernya, apakah untuk pertahanan negara A itu sendiri atau untuk menyerang negara B, sehingga negara B merasa terancam atas tindakan negara A. Sehingga esensi dalam *dilemma* ini adalah suatu bentuk dimana negara memutuskan untuk meningkatkan keamanan negaranya, namun disaat yang bersamaan akan menurunkan keamanan negara lain. Sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk meningkatkan keberlangsungan hidup negaranya tanpa mengancam keberlangsungan hidup negara lain.

Setiap negara tidak bisa mengetahui secara pasti maksud dan tujuan dari negara lain. Karena keadaan yang seperti itulah, negara cenderung berasumsi yang paling buruk (*the worst*). Apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi diri negaranya. Sehingga untuk merasa aman negara harus meningkatkan *power* negaranya. John Hertz mengatakan bahwa negara cenderung untuk meningkatkan *power* negaranya secara terus menerus untuk menghindari dari *power* negara lain. Hal ini merupakan akibat dari negara-negara yang tak akan bisa terus merasa aman dalam sistem internasional.

”Striving to attain security from . . . attack, [states] are driven to acquire more and more power in order to escape the impact of the power of others. This, in turn, renders the others more insecure and compels them to prepare for the worst. Since none can ever feel entirely secure in such a world of competing units, power competition ensues, and the vicious circle of security and power accumulation is on”.²⁸

Dalam politik internasional *great power* cenderung berperilaku demi kepentingannya sendiri sehingga seringkali terjadi adanya konflik kepentingan yang terjadi diantara negara-negara tersebut.²⁹ Sehingga negara-negara dengan kekuatan yang besar seringkali dihadapkan oleh negara-negara lain yang berusaha untuk mengimbangnya. *Great power* tidak hanya berjuang untuk menghegemoni seluruh

²⁸John J. Mearsheimer, *Op.Cit.*, hlm 36.

²⁹G. John Ikenberry, *American Foreign Policy*, (USA : Longman, 1999), hlm 52.

wilayah dunia, tetapi juga bertujuan untuk menjadi lebih makmur dan sejahtera dibandingkan dengan lawan-lawannya, karena pada dasarnya kekuatan militer harus memiliki pondasi ekonomi yang kuat. Lebih jauh lagi, *great power* juga berusaha untuk menguasai wilayah terutama wilayah darat diseluruh penjuru dunia. Karena asumsinya adalah sangat sulit untuk menguasai wilayah didunia jika dibatasi oleh laut yang luas, sehingga penguasaan wilayah darat dianggap sangat penting. Yang terakhir, *great power* berusaha untuk menjadi superior dalam penguasaan nuklir, walaupun itu sangat disadari sangat sulit dicapai. Strategi yang sering dipakai untuk mencegah negara lain mengimbangi kekuatan *great power* adalah *balance of power* dengan memakai *deterrence*, berupa peralatan militer ataupun nuklir. Selain itu, bisa dengan *back-passing*, yaitu berusaha untuk dekat dengan *great power* lainnya dapat menakuti lawannya.

Negara-negara *great power* lebih suka untuk menguasai secara keseluruhan wilayah yang dikuasainya dibandingkan ada negara lain dengan kekuatan yang besar juga menciptakan *balance of power* di wilayah yang sama. *Great power* lebih menyukai adanya dua atau tiga *great power* lain yang menguasai wilayah strategis di belahan dunia yang lain dan bukan di wilayahnya. Sehingga lawan-lawan *great power* tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengancam hegemoninya.

Namun keinginan dominasi *great power* tersebut tidak hanya berhenti sampai pada penguasaan satu wilayah dengan membiarkan *great power* lain menjadi hegemon diwilayah lain. Menurut Mearsheimer, negara-negara lebih suka untuk memakai strategi *buck-passing* dibandingkan *balancing* ketika berhadapan dengan musuh yang kuat. Argumentasinya adalah *great power* tidak hanya bertujuan untuk mendominasi di wilayahnya sendiri tapi juga berusaha untuk mencegah negara lain untuk menghegemoni diwilayah dunia yang lain. *Great power* yang telah mendominasi di wilayahnya sendiri akan merasa takut jika ada negara lain yang dapat membahayakan hegemoninya jika dapat menciptakan *balance of power* di wilayah lain yang bukan wilayah yang mereka kuasai.

Keamanan menjadi tujuan utama negara-negara karena negara tidak dapat bergantung kepada suatu komitmen tertentu atau menjaminkan keamanan negaranya

kepada negara lain untuk memastikan keberlangsungan keamanan negaranya. Negara akan menjadi sangat sensitif dengan posisi keamanannya dalam sistem internasional. Ketika negara kuat muncul, negara yang lain akan mencari cara untuk membentuk suatu koalisi dengan negara lain. Dalam keadaan tersebut negara-negara merasa terancam dengan adanya keinginan dominasi dari negara yang kuat tersebut.

Great power berusaha untuk berkoalisi dengan negara di wilayah lain yang tidak terlalu kuat yang merasa terancam dengan kehadiran *great power* lain di wilayah tersebut. Sehingga, keinginan untuk menghegemoni meluas ke wilayah lain dengan mengimbangi terlebih dahulu kekuatan *great power* lain di wilayah tersebut. Walaupun pada awalnya terjadi *balance of power*, namun keinginan menjadi negara hegemon di wilayah tersebut masih ada. Salah satunya dengan mendekati negara-negara lain di wilayah tersebut yang merasa terancam dengan kehadiran *great power* saingannya tersebut. Esensinya adalah *great power* yang telah menjadi negara hegemon di suatu kawasan berusaha untuk menjadi *balancer* di bagian dunia yang lain, yang pada akhirnya berusaha untuk menjadi negara hegemon kembali di wilayah tersebut.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa suatu negara yang sudah menguasai suatu wilayah masih mempedulikan negara lain yang juga sudah menghegemoni di wilayah lain padahal wilayah tersebut terpisah oleh laut. Jawabannya adalah negara hegemon di wilayah lain masih tetap bisa mengancam negara tersebut dengan asumsi bahwa negara lain tersebut akan menciptakan *balance of power* di wilayahnya suatu saat nanti. Ditambah lagi, ketakutan tersebut bertambah jika suatu saat *great power* tersebut menghadapi perlawanan dari satu negara kecil di wilayah dominasinya yang didukung dengan kekuatan *great power* lain sehingga dominasi *great power* tersebut akan terganti oleh negara lain. Selain karena ketakutan akan terjadinya *balance of power* oleh *great power* yang lain, disaat yang bersamaan *great power* tersebut menginginkan keuntungan-keuntungan yang akan didapat dari penguasaan di wilayah lain, yang terpenting adalah keuntungan ekonomi.

Great power berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan kesejahteraannya dari wilayah yang dikuasainya. Hal ini didasari oleh argumentasi

bahwa negara-negara sangat peduli dengan kesejahteraan negaranya, karena kekuatan ekonomi menjadi dasar kekuatan militernya. Dengan kata lain, *great power* menempatkan kekuatan ekonomi yang harus dicapai bukan hanya semata-mata untuk kesejahteraan negaranya saja, tetapi juga untuk menambah kekuatan militernya yang membutuhkan biaya sangat mahal untuk menandingi lawan-lawannya. Menurut Max Weber, ketahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi seperti dua sisi mata uang logam, dimana negara-negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang kuat yang juga disertai dengan kekuatan militer negara yang besar juga.³⁰

Great power juga berusaha untuk mencegah *great power* lain untuk mendominasi kekuatan ekonomi diseluruh dunia. *Great power* berusaha untuk menguasai daerah-daerah vital yang kaya akan material-material penting yang dapat meningkatkan keuntungan ekonominya. Sehingga persaingan untuk mendapatkan sumber-sumber kekayaan alam yang sangat penting dan menguntungkan sering terjadi diantara para *great power*.

Selain itu penguasaan wilayah darat juga tidak kalah penting. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sangat sulit untuk menguasai wilayah didunia jika dibatasi oleh laut yang luas. Karena dengan penguasaan wilayah darat, pengembangan kekuatan militer dapat dilakukan, seperti dengan pelatihan personil militer, dan sebagainya. Meskipun begitu, kekuatan laut dan udara juga tidak kalah penting. Dengan asumsi bahwa *great power* akan selalu berusaha untuk mendominasi dan mempertahankan dominasinya di seluruh dunia dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, baik kekuatan darat, udara, dan laut. Selain itu, *great power* juga berusaha untuk menjadi kekuatan superior dalam penguasaan senjata nuklir. Karena dengan menambah *power* dengan kekuatan nuklir *great power* bisa menjadi negara hegemon dan tidak akan ada lagi musuh yang ditakuti oleh *great power* tersebut.

Sehingga kesimpulannya adalah *great power* berusaha untuk menjadi negara hegemon di wilayahnya, mengimbangi kekuatan *great power* di negara lain, mengontrol kekuatan ekonomi, menguasai kekuatan darat, dan menjadi negara superior penguasa nuklir. Dari semua itu tujuan akhir *great power* adalah menjadi

³⁰ John J. Mearsheimer, *Op.Cit.*, hlm 144.

satu-satunya negara hegemon di seluruh dunia, dengan tidak adanya negara lain yang dapat mengimbangnya.

I.8 Operasionalisasi Variabel

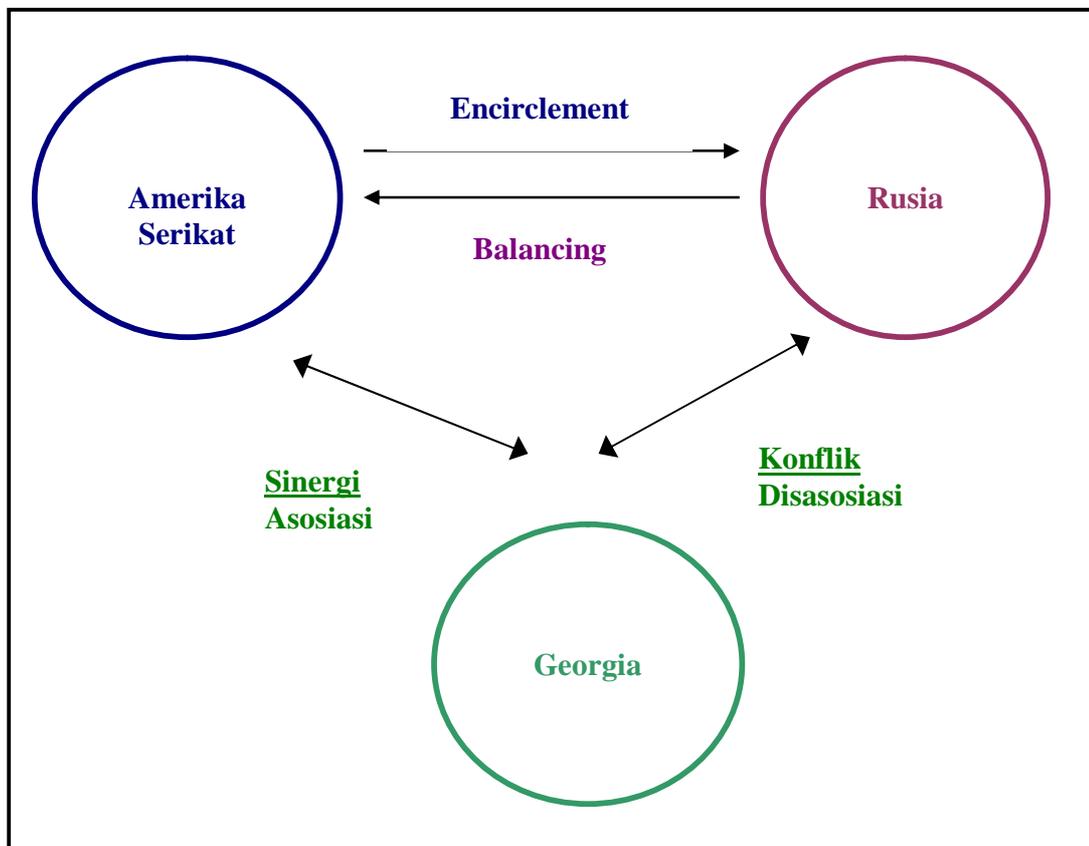
Kerangka Teori Teori Offensive Realism
Dependen Variabel Dukungan AS di Georgia
Independen Variabel Kepentingan negara
Indikator ✓ Militer ✓ Ekonomi ✓ Pengaruh ✓ Hegemoni
Outcome Ekspansi

I.9 Hipotesis

Berdasarkan teori *Offensive Realism*, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

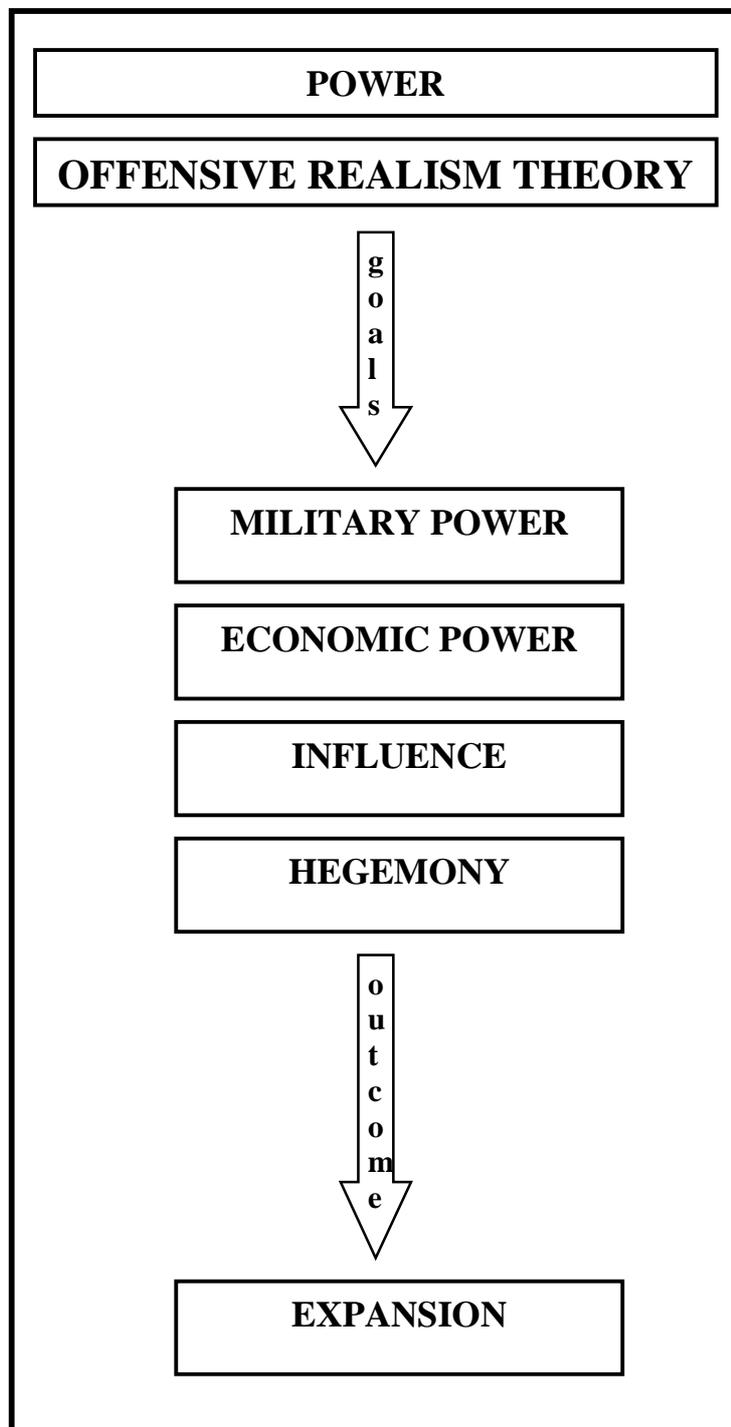
1. Dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik Rusia-Georgia pada periode 2001-2010 adalah karena keinginan AS untuk melakukan ekspansi di kawasan Eropa Timur dan kawasan Kaukasus. Sebagai *great power* AS berusaha untuk mengimbangi kekuatan Rusia di Eropa Timur dan kawasan Kaukasus.
2. Kepentingan AS di Georgia adalah faktor ekonomi. AS ingin mendapatkan keuntungan dibidang ekonomi terkait dengan jalur pipa gas.
3. Kepentingan AS di Georgia adalah untuk memperbesar pengaruhnya. Tidak hanya untuk di Georgia, AS juga ingin memperbesar pengaruhnya di kawasan Eropa Timur dan kawasan Kaukasus.

I.10. Model Analisis



I.11 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini konsep dan teori digunakan sebagai dasar untuk mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang didapat sehingga menjawab rumusan permasalahan. Penelitian ini menggunakan dua pemikiran, yaitu teori *offensive realism* dan konsep power yang dijabarkan pada diagram berikut di bawah ini:



I.12. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap AS yang mendukung Georgia dalam konflik Georgia dengan Rusia dan menganalisis kepentingan-kepentingan AS di Georgia dengan menggunakan teori *Offensive Realism* sebagai alat analisis.

Analisis dukungan AS ke Georgia yang dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh AS di Georgia akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antarvariabel yaitu variabel dependen dan independen atau interaksi sebab-akibat antar variabel yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisis yang bersifat eksplanatif. Penelitian ini menganalisis dan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.³¹

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif terhadap data-data yang berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Informasi yang diperoleh dituangkan dalam bahasa yang dapat menjelaskan hubungan antara data satu dengan data lainnya sehingga dapat diperoleh kebenaran atas informasi tersebut.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai bahan seperti buku teks, jurnal, surat kabar, dokumen, internet, dan bahan-bahan lainnya. Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dan diolah oleh penulis pertamanya. Penulis menggunakan dokumen tertulis yang dihasilkan dari tindakan aktor lain yang berkaitan dengan permasalahan, pernyataan-pernyataan, dan tulisan-tulisan politik publik atau perseorangan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan luar negeri serta publikasi dari lembaga-lembaga yang bertugas mencatat aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan masalah luar negeri

³¹ Masri Singarimbun, *Metode dalam Proses Penelitian*. Dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed. *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. (Jakarta, LP3ES, 1989), hlm 5.

I.13 Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, operasionalisasi variabel, hipotesis, operasionalisasi konsep, model analisis, teknik pengumpulan data serta sistematika penulisan.
- Bab II : Berisi tentang gambaran umum konflik antara Rusia dan Georgia
- Bab III : Berisi tentang AS dan Rusia di Kawasan Kaukasus
- Bab IV : Berisi tentang alasan AS memberi dukungan kepada Georgia dalam konflik Georgia dengan Rusia.
- Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KONFLIK ANTARA GEORGIA DENGAN RUSSIA

II.1 Gambaran Umum

Secara historis konflik Georgia dengan Rusia tidak lepas dari intervensi Rusia dalam konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan dengan Abkhazia. Georgia, Ossetia Selatan dan Abkhazia ketiganya dulu merupakan bagian dari teritorial Uni Soviet. Pada saat Perang Dingin Ossetia Selatan merupakan bagian dari teritorial Georgia. Ketika Perang Dingin usai Ossetia Selatan berusaha untuk mendapatkan kemerdekaannya sendiri.

Pada tahun 1991 dan awal tahun 1992, militer Georgia melancarkan tindakan *offensive* untuk melawan pergerakan pemberontak Ossetia Selatan. Pada awalnya sekitar tahun 1990-an Rusia ikut terlibat dalam konflik antara Georgia dengan dua wilayah *secessionist*-nya namun hanya sebagai penjaga perdamaian yang pada saat itu perang baru saja terjadi.¹ Konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan terjadi pada Desember 1990 dan berlangsung selama 1,5 tahun. Konflik tersebut menyebabkan 3.000 jiwa meninggal, kehancuran ekonomi, dan kerusakan jalur transportasi yang menghubungkan Georgia dengan Rusia melalui Ossetia Selatan, serta adanya pengakuan secara *de facto* atas pisahnya wilayah Ossetia Selatan dari Georgia.²

Perang antara Georgia dengan Abkhazia terjadi tidak lama setelah perang antara Georgia dengan Ossetia Selatan berakhir. Pada tahun 1993 Georgia kembali terlibat dalam perang untuk mempertahankan integritas teritorialnya, kali ini ditujukan untuk mencegah pemberontak Abkhazia melepaskan diri dari teritorial Georgia.³ Pada akhirnya kedua provinsi tersebut secara fungsional terpisah dari Georgia sudah sekitar 15 tahun, dengan sistem parlemen, ekonomi, pendidikan, dan pertahanannya sendiri.

¹ Robert Nalbandov, *Loc. Cit.*

² *Ibid.*

³ Charles King. *Loc. Cit.*

Namun secara historis konflik antara Abkhazia dengan Georgia mulai terlihat di akhir abad ke-20. Secara historis kedua negara tersebut memang terlibat konflik terkait dengan kedaulatan negaranya masing-masing. Pada tahun 1917 Abkhazia merasa bahwa mereka bukan bagian dari Georgia, sehingga Abkhazia mendirikan Dewan Rakyat Abkhazia sebagai bentuk legitimasi kekuatan Abkhazia yang bukan merupakan wilayah kesatuan dari Georgia.⁴ Pada 26 Mei 1918 Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya dan pada 11 Juni 1917 Georgia menandatangani perjanjian dengan Abkhazia dimana perjanjian tersebut berisikan pengakuan bahwa Abkhazia bukan merupakan satu kesatuan dengan Georgia. Pada saat itu pemerintahan di Georgia yang masih dibawah perwakilan pemerintah Inggris menginginkan Abkhazia kembali ke wilayah Georgia. Sehingga akhirnya pada Agustus 1919, Pemerintah Abkhazia mengeluarkan memorandum yang bernama *Memorandum of the Abkhazian Question* yang berisikan agar Pemerintah Georgia keluar dari wilayah kekuasaan Abkhazia. Memorandum tersebut berbunyi sebagai berikut :

”The Abkhazian nation threatened by Bolshevism concluded a temporary treaty with Georgia on July 11th 1918. This treaty was signed without the knowledge of the majority of members of the Abkhazian People’s Council; when the Abkhazian nation heard of that factitious treaty it criticized and rejected it. . . Later, during the. . . elections [to the Abkhazian People’s Council], the most open pressure upon the will of the electors was made and the elections themselves took place under threat of Georgian bayonets. . . We beg the representatives of Great Britain to inform the British Government that the Abkhazian Nation request Georgia to lead Georgia troops and [the] Georgian Administration away from Abkhazian territory”.⁵

Pada tahun 1921 pemerintahan Georgia memberikan otonomi ke Abkhazia yang tidak memiliki ikatan secara legal dengan pemerintah pusat Georgia. Kebijakan Georgia. Pada tahun 1921 pemerintahan Rusia mulai menguasai wilayah Georgia dan

⁴George Hewitt. Abkhazia, Georgia, and the Crisis of August 2008 : Roots and Lessons. *Global Dialogue*. Winter/Sping 2009, hlm 11-22.

⁵ *Ibid.*

Abkhazia. Rusia sempat menyatakan membentuk negara Abkhazia Republik Sosialis Soviet pada 31 Maret 1921 dan negara Georgia Republik Sosialis Soviet pada 21 Mei 1921. Pada masa pemerintahan Stalin posisi Abkhazia sangat tidak menguntungkan. Stalin menginginkan Abkhazia kembali ke wilayah Georgia. Pada tahun 1931 Abkhazia menjadi bagian dari Georgia. Pada tahun 1938 banyak sekolah yang memakai bahasa Abkhazia ditutup dan diganti oleh sekolah dengan memakai kurikulum Georgia. Selama 10 tahun Abkhazia menjadi bagian dari Georgia yang selalu berusaha untuk mendapatkan status negara yang berdaulat.

Pada masa Pemerintahan Mikhail Gorbachev dengan kebijakannya yang populer yaitu *perestroika* dan *glasnost*, Abkhazia mengambil kesempatan untuk mengangkat kembali posisi mereka yang dibawah posisi Georgia sejak tahun 1931.⁶ Disaat yang bersamaan, Georgia pada tahun 1989 mengumandangkan keinginanannya untuk berdiri menjadi negara berdaulat yang lepas dari wilayah Rusia dengan slogannya "Georgia for Georgians". Pada tahun 1989, populasi Georgia hanya berjumlah sekitar 500.000 jiwa. Dari total tersebut hanya 18% atau sekitar 96.000 jiwa yang merupakan bangsa asli Abkhazia, sisanya sekitar 45% penduduk Georgia, dan 14% penduduk Rusia.⁷ Pada 25 Agustus 1990 Abkhazia mendeklarasikan kemerdekaannya. Hal ini merupakan respon dari Abkhazia setelah pemerintah Georgia mengumumkan bahasa Georgia sebagai bahasa nasional.

⁶*Glasnot* dan *Perestroika* merupakan program reformasi politik yang dilancarkan oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Menurut *Glasnot* dan *Perestroika* merupakan suatu perubahan yang berwatak revolusi yang berasal dari atas ke bawah. Tujuan revolusi ini untuk mencapai masyarakat Uni Soviet "lebih sosialisme dan lebih demokratis". *Glasnot* dianggap sebagai revolusi mental dan *Perestroika* sebagai revolusi teknologis-ekonomis. Kedua-duanya merupakan suatu keharusan mendesak dan berintikan program intensifikasi dan perombakan total terhadap struktur ekonomi Uni Soviet dengan mengintroduksi metode ekonomi universal (sistem pasar), menghapuskan manajemen pemerintah dan mendorong motivasi (Departemen Luar Negeri RI. 1994. *Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Negara-Negara Bekas Uni Soviet*. Jakarta : Departemen Luar Negeri R)

Secara sederhana, *Glasnot* dan *Perestroika* merupakan program demokratisasi di Uni Soviet, atau yang disebut dengan *Demokratizatsiya*. *Glasnot* berarti *openness* (keterbukaan) atau *transparency* (transparansi). *Perestroika* berarti restrukturisasi ekonomi. (Archie Brown & Llia Shevtsova. 2001. *Gorbachev, Yeltsin and Putin : Political Leadership in Russia's Transition*. [Washington : Carnegieen Downemty International Peace] Hlm.13)

⁷ Ted Hopf, Identity, legitimacy, and the use of military force : Russia's Great Power identities and military intervention in Abkhazia, *Review of International Studies* (2005, 31, 225-243), hlm 228.

Pada 17 Maret 1991 referendum yang dikumandangkan oleh Gorbachev yang dimaksudkan untuk pembaharuan Uni Soviet diboikot oleh Abkhazia yang tetap ingin mempertahankan kekuatan Uni Soviet seutuhnya. Hal ini sangat terlihat bahwa Abkhazia menolak gagasan untuk menjadi bagian dari wilayah Georgia yang merdeka. Ketika Georgia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1991, sehingga perang antara Georgia dan Abkhazia dimulai.

Sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 Georgia dipimpin oleh Zviad Gamsakhurdia seorang pemimpin yang secara agresif memimpin kampanye menentang otonomi bagi negara minoritas yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia.⁸ Pada tahun 1992 Gamsakhurdia digantikan oleh Shevardnadze. Keadaan semakin memanas karena empat bulan setelah Shevardnadze memimpin Georgia, *Abkhazia Spremene Soviet* mendeklarasikan Abkhazia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada 14 Agustus 1992 Tentara Georgia *The Georgia National Guard* dengan cepat memasuki wilayah Abkhazia dan menguasai Sukhumi, ibukota Abkhazia. Militer lokal Rusia yang tergabung dalam *the Mountain Peoples of the Caucasus* (MPC) saat itu membantu militer Abkhazia. Namun, pada Desember 1991 terjadi kesepakatan antara militer Rusia dengan republik Soviet yang lain yang sepakat untuk memberikan senjata bagi pemerintahan Georgia. Pada 27 Agustus 1992 Presiden Rusia Boris Yeltsin secara resmi mengumumkan kebijakan pemerintah Rusia yang mendukung integritas teritorial Georgia dan menolak keinginan Abkhazia untuk menjadi negara merdeka.⁹

Pada Februari dan Maret 1993 pejuang lokal Rusia membantu Abkhazia dengan mengirimkan bom serta 70 tank untuk mengambil-alih kembali ibukota Sukhumi yang sedang dikuasai oleh Georgia. Keadaan semakin memanas dimana perang antara Georgia dan Abkhazia semakin memburuk. Pada 27 Juli 1993 Perdana Menteri Rusia Andrei Kozyrev dan Presiden Georgia Eduard Shevardnadze menyepakati perjanjian penghentian peperangan untuk mencegah peperangan yang semakin besar dimana Rusia menjadi mediator dalam konflik tersebut. Namun dua

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

bulan kemudian, Abkhazia kembali berusaha untuk merebut ibukota Sukhumi. Setelah mendapatkan bantuan dari negara-negara Kaukasus Utara, negara-negara Baltik, dan bantuan militer serta dukungan dari militer lokal Rusia di Abkhazia, tentara Abkhazia mengambil alih ibukota Sukhomi pada Oktober 1993. Perang antara Georgia dengan Abkhazia tersebut menyebabkan 20.000 orang meninggal dari kedua pihak.

Pada Oktober 1993 Shevardnadze menyetujui keinginan Rusia untuk menempatkan tentara Rusia di empat titik. Selain itu, Georgia masuk sebagai negara anggota CIS. Melalui kesepakatan tersebut, pasukan perdamaian dibentuk secara eksklusif oleh militer Rusia di Abkhazia dan menjadi penjaga perdamaian. Pada tahun 1994 Shevardnadze masih berusaha untuk meyakinkan Rusia untuk mendukung integritas teritorial Georgia dan melawan gerakan separatis. Pada Maret 1994 Georgia dan Rusia menandatangani perjanjian *Treaty of Friendship, Neighbourliness, and Cooperation*. Kemudian pada Juli 1994 Rusia mengirimkan 3.000 pasukan perdamaian ke Abkhazia, namun beberapa anggota CIS belum menyetujui hal tersebut sampai akhir Oktober. Pada bulan berikutnya Arzinba mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden pertama Republik Abkhazia.

Situasi pada tahun 2008 tidak jauh berbeda pada saat terjadi perang berskala besar antara Georgia dengan Ossetia Selatan. Titik puncaknya adalah pada tanggal 7 Agustus 2008 pada saat Georgia melakukan serangan besar-besaran kepada Ossetia Selatan dimana saat itu Presiden Saakashvili mendeklarasikan perang secara unilateral. Tentara Georgia yang sebelumnya sepakat ikut menjaga perdamaian di wilayah perbatasan antara Georgia dengan Ossetia Selatan dapat menguasai kota-kota di Ossetia Selatan yang mayoritas berpenduduk etnis Georgia. Dengan cepat tentara Georgia dapat menguasai seluruh wilayah Ossetia Selatan.

Sebelum perang antara Georgia dengan Ossetia Selatan kembali terjadi, sejak awal terjadinya konflik penduduk Ossetia Selatan mencari bantuan kepada militer Rusia untuk melindungi Ossetia Selatan, yang penduduknya mayoritas warga Rusia. Sehingga dengan cepat Rusia memberikan bantuan berupa pasukan penjaga perdamaian Rusia, sukarelawan dari Ossetia Utara dan Kaukasus Utara. Yang paling

menjadi sorotan adalah ketika Rusia melakukan serangan besar-besaran terhadap Georgia. Serangan tersebut memperlihatkan serangan balasan terhadap serangan Georgia pada Ossetia Selatan. Dua hari setelah perang terjadi, pihak Georgia mengalami banyak kekalahan sehingga memukul mundur pasukan Georgia dari Ossetia Selatan. Namun militer Rusia tetap melaksanakan serangan offensif terhadap Georgia, menghancurkan fasilitas militer Georgia di daerah konflik dan daerah lainnya yang menjadi basis militer Georgia. Perdamaian diakui secara *de facto* pada tanggal 12 Agustus 2008 setelah enam butir kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh Presiden Medvedev dan Presiden Saakashvili dimana Presiden Perancis Nicholas Sarkozy bertindak sebagai mediator. Perang antara Georgia dengan Rusia ini menyebabkan 1692 orang meninggal dan lebih dari 1500 orang terluka.¹⁰

Perang yang terjadi antara Georgia dengan Ossetia Selatan, mengubah keadaan di Abkhazia pada Agustus 2008. Abkhazia dengan berani melakukan mobilisasi besar-besaran ke wilayah perbatasan pada saat terjadi perang di Ossetia Selatan, dan tidak merasa takut oleh serangan dari Georgia mengingat Georgia tidak mungkin dalam posisi menyerang ke dua pihak. Abkhazia pun pada akhirnya berhasil melakukan serangan kepada militer Georgia dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Abkhazia. Tidak beberapa lama setelah perang, Rusia secara resmi melakukan intervensi dalam konflik tersebut dan mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai negara baru yang merdeka dan menjadi anggota komunitas internasional. Saat ini Ossetia Selatan dan Abkhazia memperkuat kekuatan politik mereka dengan mencari bantuan militer dan aliansi politik dengan Rusia, dengan cara mengizinkan pembangunan basis militer Rusia di wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia, serta berkeinginan untuk bergabung dalam *Commonwealth of Russia and Belorussia*.

II.2. Serangan Rusia ke Georgia

Serangan Rusia terhadap Georgia yang terjadi pada 8 Agustus 2008 lalu yang cukup mengagetkan dunia internasional. Secara historis konflik antara Rusia dan

¹⁰ Robert Nalbandov. *Loc.Cit.*

Georgia ini tak terlepas dari masa lalu Ossetia Selatan dan Abkhazia yang merupakan bagian dari teritorial Georgia. Usaha Georgia dalam mempertahankan keutuhan teritorialnya adalah dengan menggunakan cara kekerasan, yaitu menyerang Ossetia Selatan dan Abkhazia.¹¹ Namun usaha tersebut dihalangi oleh negara Rusia yang mendukung kemerdekaan kedua wilayah tersebut. Pada tahun 1992 dan 1993 militer Soviet terlibat dalam perang tersebut sebagai usaha mendukung kemerdekaan Ossetia Selatan dan Abkhazia. Setelah perang antara Georgia dengan kedua provinsi *secessionist*-nya berakhir, Rusia tetap bertugas sebagai *peacekeepers* dalam usaha negosiasi diantara mereka. Pasukan Rusia sudah bertugas di Georgia sebagai penjaga perdamaian selama 15 tahun sejak lepasnya provinsi Ossetia Selatan dan Abkhazia dari Georgia. Sejak saat itu, keterlibatan Rusia dalam konflik antara Georgia dengan provinsi *secessionist*-nya ini menjadi bentuk dukungan Rusia terhadap Ossetia Selatan dan Abkhazia agar mendapatkan pengakuan diplomatik dari Georgia sebagai negara merdeka.¹²

Tindakan Georgia yang menyerang Ossetia Selatan kembali pada 2008 menimbulkan reaksi keras dari Rusia. Penyerangan tersebut sebagai usaha Georgia untuk mengembalikan Ossetia Selatan ke teritorialnya.¹³ Pada 8 Agustus 2008 tank-tank Rusia melintasi batas negara memasuki teritorial negara Georgia. Rusia yang mendukung Ossetia Selatan melakukan *full-scale invasion* ke wilayah Georgia. Selain itu, Rusia juga mengirimkan pasukannya ke Abkhazia, provinsi *secessionist* yang lain, untuk mengamankan Abkhazia. Serangan Rusia pada tahun 2008 tak pelak menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat internasional. Karena tindakan Rusia ini menimbulkan banyak korban sipil yang meninggal, banyak pengungsi yang membutuhkan tempat yang aman. Rusia menyerang 42 titik di wilayah Georgia, sehingga menyebabkan banyak kerusakan di Georgia.¹⁴ Lihat gambar 2.1.

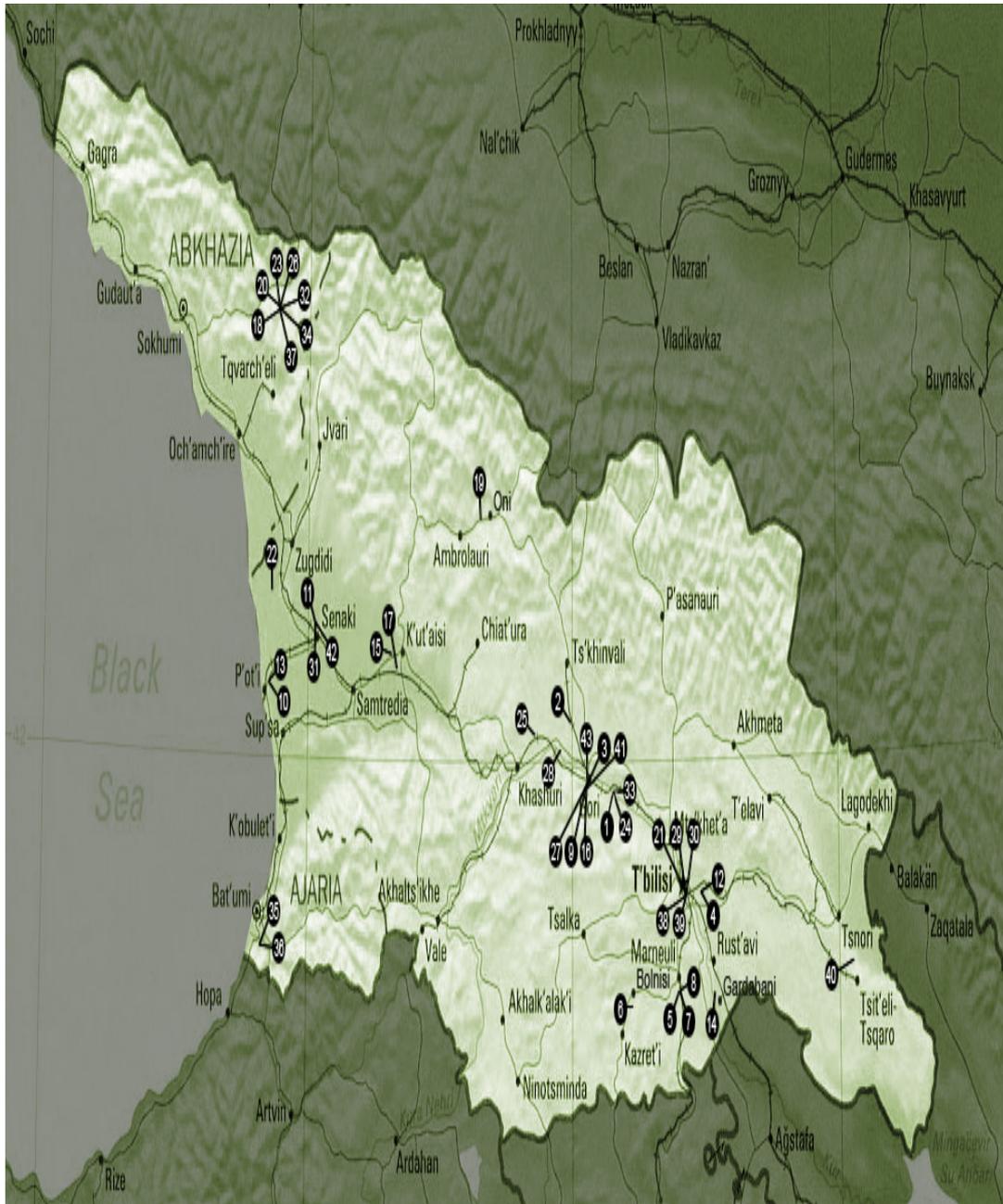
¹¹Charles King, *Loc. Cit.*

¹²The Economist, *Advancing, Blindly*. 20 September 2008.

¹³Charles King, *Loc. Cit.*

¹⁴Global Security. *Georgian territories bombed by Russian jets*. Diunduh dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/georgia-2008-bomb.htm>. Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.

Gambar 2.1
42 Titik Serangan Rusia di Georgia



Sumber : Global Security. *Georgia Territory Bombed By Russian Jets*, diunduh dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/georgia-2008-bomb.htm> Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.

Setelah Perang Dingin berakhir, Rusia mengalami masa yang dapat dikatakan *humiliated* atau memalukan akibat kekalahannya dalam Perang Dingin. Serangan Rusia ke Georgia memang dikatakan Rusia sebagai bentuk dukungannya terhadap pengakuan kedaulatan terhadap negara merdeka, dalam hal ini Ossetia Selatan dan Abkhazia. Namun yang menarik adalah upaya Rusia untuk mendukung kedua wilayah tersebut dari agresi Georgia adalah dengan menggunakan kekuatan militer. Dalam hal ini, Rusia memiliki alasan mengapa negara tersebut menyerang Georgia yaitu Rusia menganggap bahwa Georgia menggunakan kekerasan dalam upaya menguasai lagi provinsi Ossetia Selatan yang merdeka yang memang pro-Rusia. Walaupun agresi Georgia tidak ditujukan kepada Rusia, namun serangan Rusia ke Georgia adalah sebagai upaya Rusia untuk menghentikan agresi Georgia ke Ossetia Selatan.

Tindakan Rusia tersebut menandakan kebangkitan Rusia setelah hampir 20 tahun mengalami masa memalukan atas kekalahannya dalam Perang Dingin. Dalam pidatonya, Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa Rusia sebenarnya tidak ingin memperburuk situasi internasional, namun yang diinginkan Rusia adalah *respect*.¹⁵

“We do not wish to aggravate international situation.
We simply want respect for our state, for our people,
for our values.”¹⁶

Tindakan Rusia tersebut juga memunculkan ketakutan bagi negara-negara tetangganya. Bagi negara-negara tetangga Rusia, agresi Rusia ke Georgia merupakan awal baru bagi Rusia untuk menunjukkan kekuatannya seperti yang dimilikinya pada masa era Perang Dingin. Dengan serangan Rusia tersebut dunia internasional dapat melihat bahwa keberadaan Rusia masih dapat diperhitungkan, terlebih dengan bukti kekuatan militer Rusia dalam serangannya ke Georgia.

Perdana Menteri Vladimir Putin menyebut serangan militer Rusia tersebut sebagai “a punch in the face” bagi Georgia.¹⁷ Sebelum menyerang Georgia, Rusia

¹⁵ Owen Matthews, *Loc.Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ The Economist. *Loc.Cit.*

sendiri telah memperingatkan Georgia agar tidak bertindak agresif terhadap Ossetia Selatan dan Abkhaztan. Sehingga ketika Georgia menyerang kedua provinsi *secessionist* tersebut, Rusia mengerahkan kekuatan militernya pada Georgia. Sebenarnya sebelum perang dengan Georgia, Rusia telah mengumumkan rencana ambisius negaranya untuk membangun *aircraft carriers* baru dan menguji senjata *missile ballistic*-nya. Dengan upaya-upaya peningkatan kekuatan militer tersebut, keinginan Rusia untuk mengulang kejayaan Uni Soviet di masa lalu sangat terlihat, yaitu menjadi negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat.

Bagi beberapa negara tetangga Rusia seperti Polandia dan negara-negara Baltik, perang tersebut menandakan kembalinya “NATO lama” yaitu aliansi klasik sebagai penjaga keamanan karena adanya agresi eksternal, dibandingkan dengan “NATO modern” yang mempromosikan demokrasi dan *good governance*.¹⁸ Serangan Rusia juga membawa hubungan Rusia dan AS kembali pada titik terendah sejak berakhirnya Perang Dingin.¹⁹ Sejak berakhirnya Perang Dingin AS terlihat menjadi negara yang sangat kuat dan paling berpengaruh dalam peredaran dunia internasional. Pengaruh AS tersebut juga terlihat dikawasan Eropa Timur, yaitu seperti kedekatan AS dengan Georgia. Serangan Rusia ke Georgia tidak dapat menghilangkan kesan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap Georgia yang sangat pro-Barat. Ketika tank-tank Rusia memasuki batas negara Georgia banyak yang beranggapan bahwa ini juga merupakan perang melawan AS di kawasan Eropa. Karena yang terlihat dalam perang ini adalah perang Rusia melawan Georgia yang didukung sepenuhnya oleh AS. Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin pernah mengatakan bahwa Rusia akan terus berusaha untuk meningkatkan kekuatannya di “pekarangannya”, dalam hal ini Eropa Timur.²⁰

Konflik Georgia-Rusia ini juga berkaitan erat dengan ambisi pribadi Putin. Perbedaan jalur politik luar negeri yang dipilih oleh Shakashvili yang lebih pro-Barat, membuat Putin selalu mencurigai dan menentang politik luar negeri yang

¹⁸ Charles King, *Loc.Cit.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm 3.

²⁰ Owen Matthews, *Loc.Cit.*

dilakukan Shakashvili. Selain itu, visi politik Putin yang ingin mewujudkan kembali persatuan Soviet walaupun secara gradual, membuat kebijakan yang diambil Putin terhadap negara ex-Soviet cenderung ekspansif dan berpola militeristik. Hal ini terlihat dari dukungan militer besar-besaran yang diberikan Putin terhadap 3 etnis yang menuntut independensi dari Georgia, yaitu etnis Azeri di wilayah Adjaria, etnis Ossets di Ossetia Selatan, dan etnis Abkhaz di Abkhazia.

Semangat nasionalisme yang sangat kuat dari Putin mendapat dukungan dari sebagian rakyat Rusia. Kecenderungan untuk mengembalikan Rusia kepada pola Soviet tersebut terlihat dari dirubahnya hari libur nasional kemerdekaan di Rusia, yang sebelumnya jatuh pada tanggal 7 November (tanggal Revolusi Bolshevik) menjadi tanggal 4 November yang disebut Putin sebagai hari kemerdekaan persatuan nasional.²¹ Perubahan perayaan kemerdekaan tersebut adalah satu dari sekian janji politik Putin pada rakyatnya, yang pada garis besarnya menjanjikan kembalinya Rusia yang besar, bersatu, dan berpengaruh di dunia internasional.

Antara tahun 2000 dan 2004 rezim pro-Moscow di Ukraina dan Georgia digantikan oleh rezim pro-Barat. Kedekatan pemimpin Georgia dengan Barat, terutama AS, membuat Rusia terancam akan pengaruh AS yang dapat semakin meluas di Eropa. Ditambah lagi keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO semakin membuat Rusia marah. Perang di Ossetia Selatan menggambarkan ketidaksukaan Rusia akan ekspansi NATO ke negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Sehingga serangan Rusia ke Georgia tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Rusia tidak ingin ditekan oleh keberadaan Barat di Eropa.

Pemerintahan Georgia yang berkiblat ke Barat dan keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO dan Uni Eropa (UE) tidak terlepas dari pemikiran pemimpinnya. Pemimpin Georgia Presiden Sakaashvili yang mendapatkan posisinya melalui *Rose Revolution*, memiliki pemikiran yang bertolak belakang dengan para pemimpin Rusia. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, Presiden Sakaashvili mempunyai latar belakang pendidikan di Amerika dimana Shakashvili adalah seorang lulusan Columbia University yang juga menjadi aktivis *Open Society*, sebuah

²¹ Alexander Cooley, *Op.Cit*, hlm 85.

Non-Governmental Organization (NGO) AS yang berusaha mengembangkan demokratisasi di negara-negara pecahan Uni Soviet.²² Jalur politik pro-Barat yang dijalankan Shakashvili setelah menjabat menjadi Presiden adalah salah satu proses pembuktian janji politiknya pada rakyat Georgia untuk merubah pemerintahan Georgia yang sebelumnya terkenal sangat korup dan cenderung represif. Jalur itu juga dipilih Presiden Shakashvili untuk menunjukkan perbedaan dirinya dengan Presiden sebelumnya yang digulingkan, yaitu Eduard Shevarnadze yang cenderung mengikuti Uni Soviet. Perbedaan jalur politik ini cukup menjadi alasan bagi Presiden Medvedev dan Perdana Menteri Putin untuk memasukkan pemerintahan Georgia yang sekarang dalam daftar *black list*. Namun kurangnya perhatian Shakashvili terhadap titik-titik disintegrasi di wilayahnya seperti, Abkhazia, Ossetia Selatan, dan Adjaria, membuat legitimasi Shakashvili sebagai Presiden tak diakui di wilayah-wilayah itu. Celah ini dimanfaatkan dengan baik oleh Rusia dengan suplai bantuan total terhadap ketiga wilayah tersebut.

Ketidaksukaan Rusia terhadap pengaruh AS yang besar tidak hanya ditunjukkan pada keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO, tetapi juga pada hal-hal lain seperti keinginan AS untuk membangun *ballistic missile defenses* di Eropa Timur, dominasi dalam hal energi di Asia Tengah dan Kaukasus, dan pengakuan kedaulatan Kosovo.²³ Melihat semua itu, terlihat bahwa masih adanya sisa-sisa persaingan antara Rusia dengan AS yang masih ada sejak berakhirnya era Perang Dingin.

²² *Ibid.*, hlm 85.

²³ Stephen Sestnovich, *Loc.Cit.*

BAB III

AS DAN RUSIA DI KAWASAN KAUKASUS

III.1 Kebijakan Luar Negeri Rusia dan Dinamika Rusia di Kaukasus

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia seperti dipaksa untuk menjawab pertanyaan paling fundamental mengenai identitas negaranya dan hubungannya dengan negara-negara barat dalam sistem dunia pasca Perang Dingin berakhir.¹ Setelah disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1991, Rusia mengalami proses transisi baik di dalam negeri maupun mengenai prioritas politik luar negerinya. Rusia yang tidak lagi memproyeksikan politik luar negerinya dalam skala global kecuali di bidang perlucutan senjata, mulai mengembangkan hubungan kemitraan dengan AS dan Eropa Barat, mengalami deideologisasi, dan pendekatan pragmatisme. Dengan kebijakan luar negeri seperti ini, Rusia mulai melakukan peninjauan hubungannya dengan berbagai negara.² Saat ini Rusia sebagai bagian dari pewaris adidaya Uni Soviet di masa lalu saat perang dingin, merupakan kekuatan militer tandingan AS yang amat diperhitungkan reputasinya.

Kebangkitan Rusia pada akhir tahun 1990-an, Presiden Rusia terdahulu, Vladimir Putin, mengejar kebijakan luar negeri Rusia yang mengedepankan peran penting Rusia di dunia. Dalam dokumen resmi kebijakan politik luar negeri Rusia, terutama dalam *Foreign Policy Concept* dan *The National Security Concept*, menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia akan terus fokus pada menciptakan dan mempertahankan sistem internasional dimana negara-negara besar tetap menjadi pemimpin dalam tatanan global, bebas mengejar kepentingan nasional yang ingin dicapai, menghargai negara-negara dalam koridor *sphere of influence*, dan mempertahankan *balance of power* diantara negara-negara besar yang ada.³ Pernyataan Putin mengenai kebijakan luar negeri Rusia tersebut tertuang dalam

¹ Jeffrey Mankoff, *Foreign Policy : The Return of Great Power Politics*, (UK : Rowman & Littlefield Publishers, Inc), hlm 11.

² Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia. *Rusia dan Asia Mutakhir*. 2005. Jakarta.

³ Jeffrey Mankoff, *Op.Cit.*, hlm 12.

dokumen resmi yang dimana didalamnya tertuang prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia pada era Putin, yang berbunyi :

“Promoting the interest of Russian Federation as a great power and one of the most influential centers in the modern world [by] ensuring the country’s security preserving and strengthening its sovereignty and territorial integrity and its strong authoritative position in the world community [in order to promote] the growth of its political, economic, intellectual, and spiritual potential.”⁴

“ ...shaping a stable, just, and democratic world order.... [based] on equitable relations of partnership among states”.⁵

Penyataan Putin tersebut diartikan sebagai kedaulatan negara, *great power*, dan kemitraan diantara negara-negara. Sebenarnya inti dari *Foreign Policy Concept* Rusia tersebut adalah geopolitik, yaitu dimana negara-negara di dunia mengejar kekuasaan dan kepentingan nasionalnya, yang berarti *balance of power*. Pemerintahan pada era Putin terlihat lebih mengedepankan pada konsep *great power*, dimana Putin mengharapkan Rusia menjadi negara kuat yang dapat memimpin dunia terutama didalam dunia yang multipolar. Hal ini terlihat dalam pernyataan Putin mengenai dunia multipolar dimana dalam sistem internasional yang multipolar negara-negara besar menjadi aktor-aktor utama dalam tatanan global yang hubungannya dengan negara-negara lain berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional negaranya.

“We must clearly recognize that the critical responsibility. . . for securing global stability will be borne by the leading world powers [*vedushchie mirovye derzhavy*] – powers possessing nuclear weapons [and] powerful levers of military-political influence”⁶

⁴ *Ibid.*, hlm 13.

⁵ *Ibid.*, hlm 13.

⁶ *Ibid.*, hlm 16.

Pada masa pemerintahan Presiden Rusia Dimitry Medvedev pada tahun 2008, *Foreign Policy Concept* Rusia pada masa pemerintahan Putin mengalami pembaharuan. Konsep *great power* yang diangkat ke permukaan oleh Putin tidak ada lagi. Presiden Medvedev mengeluarkan konsep *A New Russia*, dimana Rusia menjadi salah satu aktor terdepan dalam dunia internasional. Kebijakan luar negeri era Presiden Medvedev lebih memperlihatkan posisi Rusia sebagai salah satu kekuatan besar yang tidak hanya mementingkan kekuatan negara semata, namun juga mengedepankan sisi sosial ekonomi negaranya yang masih lemah.

”..... one of the leading centers of the contemporary world”

“Creating favorable external conditions for the modernization of Russia, transformation of its economy through innovation, enhancement of living standards, consolidation of society, strengthening of the foundations of the constitutional system, rule of law and democratic institutions, realizations of human rights and freedoms and, as consequence, ensuring national competitiveness in a globalizing world”.⁷

Hubungan Rusia dengan negara-negara Barat menjadi hal yang paling banyak disorot dalam kebijakan luar negeri Rusia. Interaksi Rusia dengan negara-negara di seluruh belahan dunia, termasuk negara-negara pecahan Uni Soviet disekitar batas-batas negaranya, berdasarkan hubungan negara-negara tersebut dengan komunitas Barat terutama dengan ”negara pemimpin” di komunitas Barat tersebut yaitu AS. Kenangan masa lalu saat Perang Dingin antara Rusia dengan AS masih mewarnai hubungan kedua negara tersebut. Walaupun bayangan Perang Dingin masih ada, pada saat ini Rusia tidak lagi menjadi bentuk ancaman seperti pada saat Perang Dingin.

Ketika serangan teroris terjadi di AS pada 11 September 2001, Rusia mengeluarkan pernyataan bahwa negaranya berperang melawan teroris, sejalan dengan kebijakan luar negeri AS yang memerangi terorisme. Walaupun Rusia bersama-sama dengan AS melawan terorisme, bukan berarti Rusia selalu memiliki

⁷ *Ibid.*, hlm 13.

arah kebijakan luar negeri yang sama dengan AS. Ambisi Rusia dalam tatanan global masih sangat terlihat yaitu untuk menjadi negara besar didunia. Hal ini tertuang laporal *Trilateral Comission* yang berisikan :

”Russia is essentially and independent rather than aggressive and expansionist. Russia will use pressure of many kinds on less powerful neighboring states and use leverage with the major powers where it has it . . . but it does not seek confrontation with them . . . The ambition of the present leadership, supported by the majority of the electorate, is to re-establish Russia as a strong, independent, and unfettered actor on the global stage”.⁸

Kemudian pada 13 Mei 2009, Presiden Medvedev mengganti *National Security Concept* Rusia dengan dokumen baru yang berisikan tentang berbagai macam ancaman negara yang akan dihadapi di masa yang akan datang,

“Moscow’s biggest threat is the policy of some foreign states aimed at attaining an overwhelming military superiority, particularly in the area of strategic nuclear weapons, through targeted, informational, and other high-technology means of conducting armed conflict, non-nuclear strategic arms, the development of missile defenses, and the militarization of space.”⁹

Rusia saat ini menjadi negara pengekspor minyak dan gas alam yang paling utama. Pertumbuhan ekonomi Rusia pada beberapa dekade terakhir digerakan oleh ekspor energi yang meningkatkan produksi minyak Rusia dan harga minyak dunia selama beberapa periode. Secara internal, Rusia memenuhi kebutuhan dalam negerinya dari minyak alam. Bagi Rusia, energi adalah jantung dari perekonomian Rusia. Energi adalah aset penting bagi Rusia, yang menunjukkan kekuatan Rusia. Pertumbuhan ekonomi Rusia perlahan namun pasti berasal dari energinya. Energi Rusia dapat berjalan seimbang dengan harga minyak dunia. Lihat grafik 3.1

⁸ *Ibid.*, hlm 23.

⁹ Dale R. Herspring, *Is Military Reform in Russia For “Real”? Yes, But..*. Dalam Stephen J. Blank dan Richard Weitz, *The Russian Military Today and Tomorrow : Essays in Memory of Mary Fitzgerald, Strategic Studies.*, Juli 2010, hlm 159.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Rusia dan Harga Minyak Dunia
Tahun 1997-2003



Sumber : Fiona Hill, *Energy Empire: Oil, Gas and Russia's Revival*, The Foreign Policy Centre, September 2004, hlm 31.

Rusia memiliki persediaan gas alam terbesar di dunia, yaitu sebesar 1,680 triliun meter kubik. Persediaan gas alam Rusia tersebut sebesar seperempat total persediaan gas alam di dunia. Kebanyakan sumber persediaan gas alam tersebut terletak di Siberia, dengan Yamburg, Urengoy, dan Medvezhnye sendiri terhitung sekitar 45% dari total persediaan Rusia. Lebih dari separuh sumber persediaan gas alam Rusia terletak di Siberia. Beberapa sumber gas alam juga terletak di Rusia bagian utara.

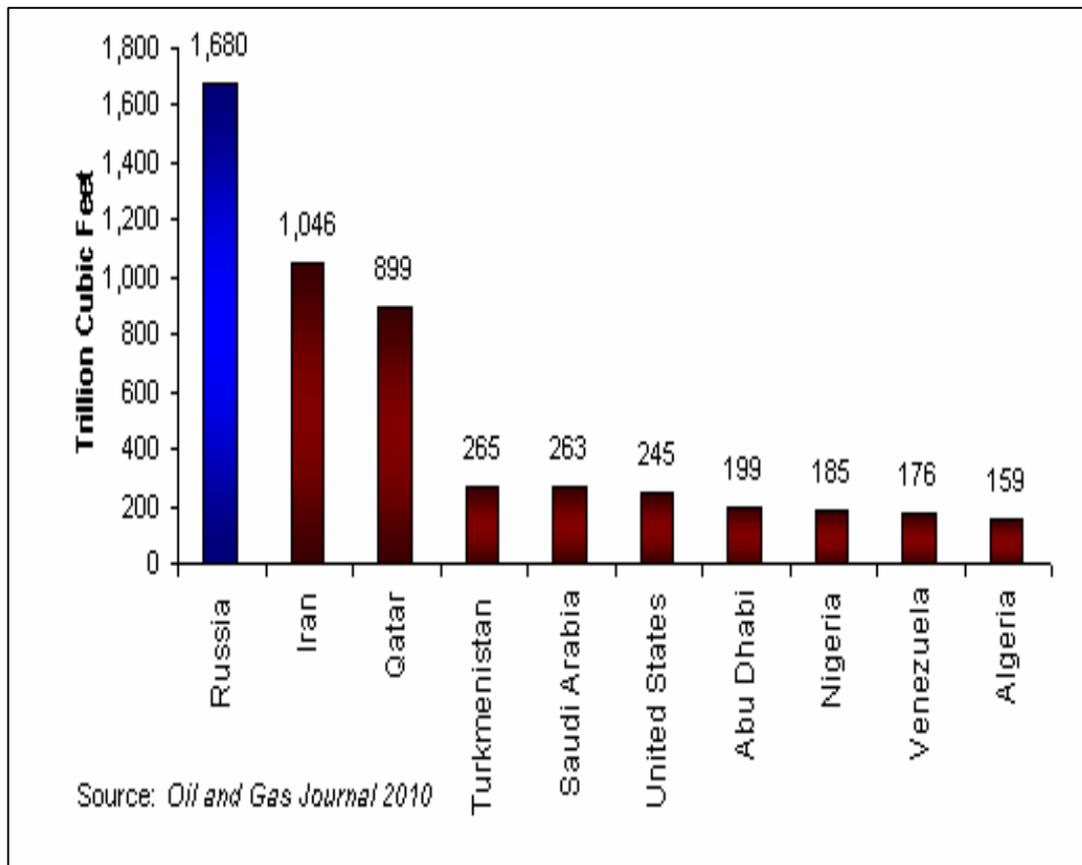
Pada tahun 2007 Rusia termasuk dalam negara dengan persediaan gas alam terbesar. Lihat Diagram 3.1 Diagram perbandingan jumlah persediaan gas alam Rusia dengan negara lain dapat dilihat dalam diagram 3.2.

Diagram 3.1
Persediaan Gas Alam Negara-Negara Tahun 2007

Saudi Arabia			264,300,000,000 bbl
Canada			178,800,000,000 bbl
Iran			136,200,000,000 bbl
Iraq			112,500,000,000 bbl
Venezuela			79,140,000,000 bbl
Russia			60,000,000,000 bbl
Libya			45,000,000,000 bbl
United States of America			21,760,000,000 bbl
Mexico			14,700,000,000 bbl
China			12,800,000,000 bbl
Brazil			11,720,000,000 bbl
Norway			7,705,000,000 bbl
India			5,700,000,000 bbl
Indonesia			4,430,000,000 bbl
Egypt			3,750,000,000 bbl
United Kingdom			3,560,000,000 bbl
Syria			2,500,000,000 bbl
Argentina			2,086,000,000 bbl
Australia			1,437,000,000 bbl
Denmark			1,328,000,000 bbl
Italy			621,700,000 bbl
Ukraine			395,000,000 bbl
Pakistan			376,800,000 bbl
Germany			367,200,000 bbl
Turkey			300,000,000 bbl
Thailand			291,000,000 bbl
France			158,400,000 bbl
Spain			157,600,000 bbl
Philippines			152,000,000 bbl
Poland			96,380,000 bbl

Sumber : Global Fire Power. *Proven Oil Reserves*. Diunduh dalam <http://www.globalfirepower.com/proven-oil-reserves-by-country.asp>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Diagram 3.2
Perbandingan Persediaan Gas Alam 10 Negara



Sumber : U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Ekspor Rusia sangat penting bagi negara-negara CIS. Negara-negara di Eropa sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia. Sekitar 30% minyak Eropa adalah impor dari Rusia, dan 50% gas alam Rusia. Diperkirakan pada tahun 2030, sekitar 80% energi Eropa akan bergantung pada sumber minyak dan gas Rusia.

Lihat gambar 3.1.

Gambar 3.1
Jalur Pipa Minyak ke Eropa



Sumber : U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Selain itu pasokan gas alam dari Rusia mendapatkan permintaan yang cukup tinggi di negara-negara Uni Eropa, Turki, Jepang, dan negara-negara Asia lainnya. Pada tahun 2009 mayoritas tujuan ekspor Rusia ditujukan bagi pasar Eropa, terutama Jerman dan Belanda. Sekitar 12 persen dari ekspor Rusia tersebut ditujukan bagi Asia, 6 persen untuk Amerika Utara dan Selatan, dimana mayoritas ekspor untuk

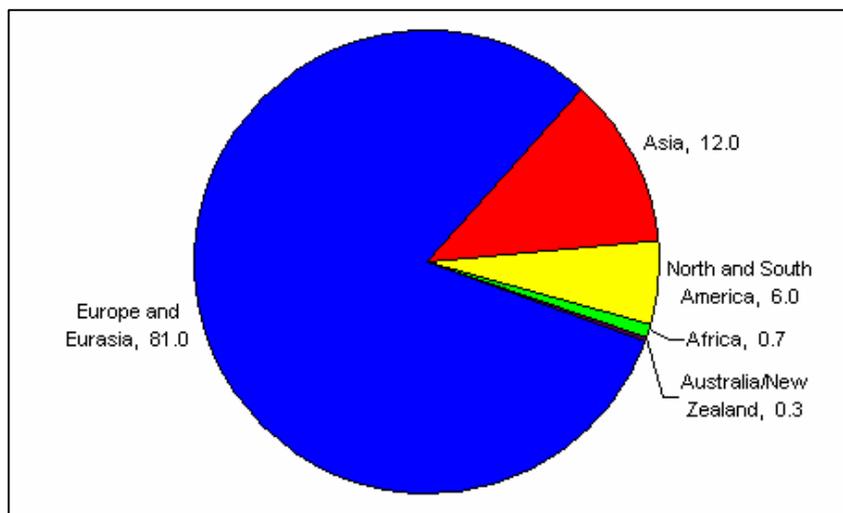
benua Amerika tersebut ditujukan untuk AS. Ekspor Rusia pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 3.1 dan diagram 3.3.

Tabel 3.1
Ekspor Rusia Tahun 2009

Tujuan	Volume Ekspor Tahun 2009 (dalam juta meter kubik)
Negara-Negara CIS	2.239
Eropa Barat	3.267
Eropa Timur	1.275

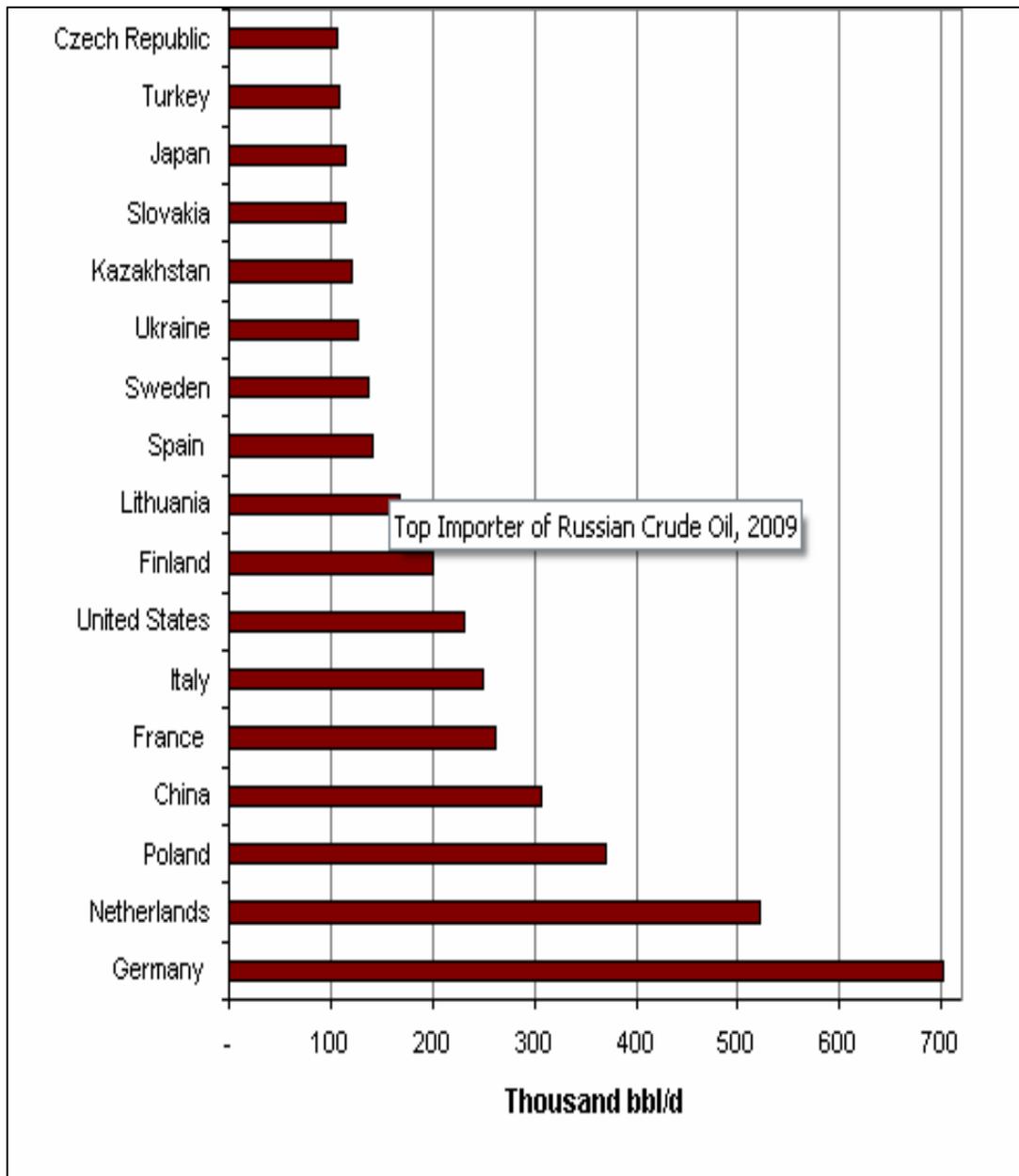
Sumber : U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Diagram 3.3
Ekpor Minyak Rusia Tahun 2009



Sumber : U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Diagram 3.4
Importir Utama Minyak Rusia Tahun 2009



Sumber : U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Rusia masih memandang wilayah Kaukasus rawan konflik sehingga merasa perlu ikut turun tangan guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah itu. Selama ini Rusia juga masih menerapkan kebijakan yang keras di kawasan Kaukasus dengan mengedepankan kekuatan militernya. Para pembuat kebijakan Rusia menyadari bahwa saat ini semua negara berusaha untuk memperluas pengaruhnya baik dengan menggunakan *hard power* maupun *soft power*.¹⁰ Bagi Rusia kekuatan militer merupakan cara yang dapat digunakan dalam kebijakan luar negerinya, dan perang dapat digunakan sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan luar negerinya, serta pencegahan terhadap perang sangat sulit dilakukan.¹¹ Bagi para pembuat kebijakan Rusia tersebut, negara-negara terfokus pada kemampuan militernya masing-masing dibandingkan dengan pendekatan politik diantara sesama negara. Dengan kata lain, negara-negara dengan kekuatan militer yang besar dapat menjadi ancaman bagi Rusia.

Rusia beberapa kali melancarkan operasi militer ketika Georgia berusaha mempertahankan Abkhazia dan Ossetia Selatan. Selain itu upaya Rusia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur terlihat pada perilaku Rusia terhadap Georgia terkait dengan keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO dan UE. Rusia memiliki sejumlah kekhawatiran bahwa negara tersebut akan tersedot dalam pengaruh UE. Begitu pula perlakuan Rusia terhadap Ukraina. Ketika Ukraina mendapat tawaran untuk menjadi anggota terakhir UE, keinginan Ukraina untuk menjadi anggota UE tersebut terus mendapat halangan dari Rusia. Misalnya, Rusia melihat pemilihan umum di Ukraina pada November 2004 lalu mendapat pengaruh usaha Barat untuk menyedot Rusia dalam struktur NATO-EU yang akhirnya berujung pada terjadinya Revolusi Oranye.¹²

Rencana perluasan NATO ke Timur memberikan ketakutan tersendiri bagi Rusia. Perluasan NATO tersebut dikhawatirkan akan merusak perimbangan strategis

¹⁰Dmitri Trenin. Russia's Threat Perception and Strategic Posture. *Strategic Studies*. November 2007. hlm 35.

¹¹*Ibid.*

¹²Deborah Sanders, Ukraine After The Orange Revolution : Can It Complete Military Transformation and Join The U.S.-Led War On Terrorism?, *Strategic Studies*, 2006, hlm vi.

AS dan Rusia di Eropa Timur, karena pengaruh AS di kawasan tersebut akan semakin besar. Rusia terlihat melancarkan usaha pembendungan terhadap rencana ekspansi dan perluasan pengaruh negara-negara Barat di Eropa Timur. Hal ini tak terlepas dari fokus utama kebijakan luar negeri Rusia yang masih terkait dengan kebijakan luar negeri AS dan kebijakan keamanan.¹³ Para pemikir strategis Rusia melihat AS sebagai “dangerous nation”. Dari perspektif politik, Rusia percaya bahwa setelah Perang Dingin berakhir AS masih memandang Rusia sebagai lawan, seperti AS melihat China, Iran dan Korea Utara. Bagi Rusia, AS tidak menginginkan Rusia menjadi negara yang kuat, dan AS melihat Rusia sebagai pesaing yang kompetitif dimana AS sangat menolak kebangkitan Rusia. Sehingga, perilaku dan kebijakan AS, terutama di area vital kepentingan Rusia seperti Eurasia, menjadi suatu ancaman bagi Rusia dan kepentingan-kepentingan Rusia.

Dalam *White Paper* pada Oktober 2003, Departemen Pertahanan Rusia mengeluarkan Doktrin Ivanov yang berisi bahwa setelah Perang Dingin usai bagi Rusia NATO tetap sebagai organisasi militer yang dapat mempengaruhi Rusia dalam mengeluarkan doktrin militer maupun kebijakan-kebijakan nuklir.¹⁴

“Russia . . . expects NATO member states to put a complete end to direct and indirect elements of its anti- Russian policy, both from military planning and from the political declarations of NATO member states. . . . Should NATO remain a military alliance with its current offensive military doctrine, a fundamental reassessment of Russia’s military planning and arms procurement is needed, including a change in Russia’s nuclear strategy.”

Dari segi geostrategis, Rusia melihat kehadiran militer AS di batas-batas negara Rusia sebagai suatu bentuk ancaman.¹⁵ Sejak tahun 2000 AS telah membangun basis pertahanannya di Romania, Bulgaria, dan Asia Tengah. Selain itu AS juga melatih dan melengkapi persenjatan personel-personel militer Ukraina.

¹³ Dmitri Trenin. *Loc.Cit.*

¹⁴ Stephen J. Blank. The NATO-Russia Partnership : A Marriage of Convenience or A Troubled Relationship?, *Strategic Studies*, November 2006., hlm 7.

¹⁵ Dmitri Trenin, *Loc.Cit.*

Selama beberapa waktu ini, pemerintah AS berupaya mencapai kesepakatan dengan pemerintah Polandia dan Ceko untuk membangun sistem pertahanan misil di kedua negara tersebut. Sebagai bagian dari sistem pertahanan misilnya, AS berencana menempatkan 10 penangkal rudal di Polandia serta radar pembimbing di Ceko. Rencana dengan anggaran dana sebesar 1,6 Miliar USD ini telah diratifikasi tahun 2007 oleh pemerintah George W. Bush, mantan Presiden AS. Rencananya proyek ini akan dioperasikan tahun 2013. AS mengatakan bahwa sistem tersebut akan melindungi AS dan negara-negara sekutu di Eropa dari serangan sistem kerja rudal yang diluncurkan oleh Iran dan Korea Utara.¹⁶

Akan tetapi rencana ini ditentang oleh Rusia karena dianggap mengancam keamanan Rusia. Menurut Rusia rencana penempatan sistem anti-rudal AS di Polandia dan Ceko ini adalah langkah strategis NATO untuk melakukan perluasan NATO ke arah timur yang tentunya akan mengancam Rusia. Selain itu menurut Rusia rencana ini juga akan memperkuat NATO dalam mengawasi penempatan dan pengerahan tentara Rusia, yang akan meningkatkan kemampuan NATO untuk menyerang Rusia. Reaksi Rusia tersebut menyiratkan ketakutan akan bertambahnya kekuatan AS di Eropa Timur dengan merangkul negara-negara pecahan Uni Soviet. Padahal sejak awal rencana penempatan sistem antirudal AS tersebut sudah dikatakan bahwa alasan pemerintah Bush terkait rencana ini kembali pada kemampuan rudal Iran dan ancaman terhadap kepentingan Amerika di Timur Tengah, bukan Rusia. Namun pernyataan tersebut ditentang keras oleh Rusia. Rusia meresponnya dengan mengatakan bahwa sangat tidak mungkin jika misil-misil dari Iran atau Korea Utara dapat melintasi Eropa dan mencapai AS.

Selain masalah pergerakan NATO ke arah timur dan penempatan basis pertahanan AS di Eropa Timur, masalah politik energi juga menjadi suatu kekhawatiran bagi Rusia. Keberadaan kawasan Kaukasus sangat vital bagi kepentingan energi Rusia. Pipa-pipa gas dan minyak banyak yang melintasi kawasan

¹⁶VOA News. Rusia: Rencana Penempatan Rudal Amerika di Kaukasus. 21 September 2009. Diunduh dalam <http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-2009-09-21-voa2-85217397.html?rss=topstories>. Diakses pada 2 Juni 2011. Pukul 10.00 WIB.

Kaukasus sampai ke Rusia. Sehingga stabilitas keamanan di wilayah Kaukasus ini menjadi penting untuk menjaga kelancaran dan keberlangsungan proyek-proyek pengangkutan dan pendistribusian minyak dan gas ke pasar-pasar Barat. Georgia, Azerbaijan, dan Ukraina memiliki jalur strategis gas dari Rusia ke Eropa sehingga hal ini membenarkan politik luar negeri Rusia yang terus ingin Georgia, Azerbaijan, dan Ukraina berada dalam pengaruh Rusia.

Selain itu saat ini Laut Kaspia merupakan laut yang diakui dan ditemukan memiliki kandungan sumber daya gas alam dan minyak yang sangat besar. Laut Kaspia menjadi tempat incaran baru bagi negara-negara Barat. Sejak lama AS mengincar kekayaan migas di sekitar Laut Kaspia, yang relatif baru sedikit dimanfaatkan ketika wilayah itu menjadi bagian dari Uni Soviet. Tidak mengherankan AS berjuang mati-matian untuk merangkul negara-negara bekas Soviet di sekitar Laut Kaspia, yang belum sepenuhnya lepas dari komunisme.¹⁷ Pada pertengahan 1990-an, pemerintahan AS di bawah Presiden Clinton mendapatkan dua proyek jaringan pipa utama untuk mengekspor migas Kaspia, dengan tidak melalui wilayah Iran, Rusia, dan China.¹⁸ Proyek pertama adalah rencana mengekspor gas Turkmenistan melalui Afganistan dan Pakistan ke Samudra Hindia. Akan tetapi, proyek ini akhirnya gagal karena keamanan di Afganistan dan Pakistan yang hingga kini sangat tidak mendukung. Proyek kedua adalah rencana membangun jaringan pipa melingkar ke barat melalui negara-negara pro-AS di Kaukasus, yaitu Georgia dan Azerbaijan. Jaringan itu akan digabung dengan jaringan pipa bawah laut yang menghubungkan Kazakhstan dan Turkmenistan di sisi timur Kaspia, yang menyambung dengan jaringan pipa Baku (Azerbaijan)-Tbilisi (Georgia)-Ceyhan (Turki) atau BTC. Jaringan pipa ini menjadi jalan utama untuk mengirimkan sebagian besar ekspor energi Kaspia ke kawasan Mediterania, dan diproyeksikan akan menjadi pukulan besar terhadap dominasi rute energi Rusia dari Kaspia ke Barat.

¹⁷ *Kompas Cyber Media*. Perburuan Migas di Kaspia. Minggu 14 September 2008. Diunduh dalam <http://internasional.kompas.com/read/2008/09/14/22234348/perburuan.migas.di.kaspia>. Pada 2 Juni 2011, Pukul 10.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

Ancaman-ancaman yang juga dihadapi oleh Rusia adalah masalah-masalah yang sebagian besar terkait dengan penganiayaan terhadap minoritas, revolusi-revolusi dan tuntutan kemerdekaan di negara-negara pecahan Soviet dan negara-negara di Balkan. Contohnya adalah geopolitik Rusia di pecahan Yugoslavia yang terkait dengan isu etnis minoritas yaitu seperti muslim, Serbia, Slavia, Albanese dan Macedonia. Yugoslavia dikenal sebagai wilayah yang memiliki banyak perbedaan kultur dan agama yang menyebabkan ketidakstabilan politik, isu kemanusiaan, dan pengungsi sampai sekarang. Dalam beberapa kasus AS sering kali terlibat dalam tuntutan kemerdekaan di beberapa negara-negara pecahan Soviet.¹⁹ Selain itu, deklarasi perang melawan terorisme oleh AS menjadi momentum yang digunakan AS untuk memasuki media dibawah pengaruh Rusia seperti Kirgiztan, Uzbekistan, dan Georgia. Dapat dikatakan daerah tersebut memiliki banyak peluang bagi kekuatan eksternal seperti NATO dan AS untuk masuk ke dalam wilayah Eropa Timur.

Selain itu Rusia juga sangat sensitif terhadap nilai-nilai yang ada dalam kebijakan luar negeri AS yang mengusung demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Rusia menganggap bahwa nilai-nilai AS tersebut hanya merupakan kamufase untuk mencapai kepentingan nasional AS. Dalam *Russian Federal Assembly* pada 10 Mei 2006, secara sarkatis Perdana Menteri Putin mengatakan bahwa HAM dan demokrasi berdiri diatas suatu kepentingan tertentu.²⁰

“We see, after all, what is going on in the world. The wolf knows who to eat, as the saying goes. It knows who to eat and is not about to listen to anyone, it seems. How quickly all the pathos of the need to fight for human rights and democracy is laid aside the moment the need to realize one’s own interests comes to the fore. In the name of one’s own interests everything is possible, it turns out, and there are no limits.”

Keinginan Rusia untuk tetap mendominasi negara-negara pecahan Uni Soviet di Kaukasus telah terlihat sejak tahun 1999 dimana Rusia mencoba untuk memberi

¹⁹ R. Craig Nation, U.S. Interests in The New Eurasia, *Strategic Studies*, November 2007, Hlm 1.

²⁰ Stephen J. Blank, *Op.Cit.*, hlm 20.

sanksi terhadap semua negara-negara Baltik, hal ini berkaitan erat dengan program perluasan NATO yang mulai memperluas cakupan keanggotaannya ke wilayah Kaukasus tersebut. Kepentingan Rusia untuk terus mencari ladang minyak baru di Kaukasus sangat besar, mengingat posisi Rusia sebagai pemasok gas terbesar bagi UE dan penyalur minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi.

II.2 Kebijakan Luar Negeri AS dan Dinamika AS di Kawasan Kaukasus

Sejak runtuhnya Uni Soviet, kebijakan *containment policy* AS tidak lagi menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS. Para pembuat kebijakan AS membentuk suatu kerangka baru untuk menginterpretasikan sistem internasional dan menciptakan strategi-strategi baru yang menjadi acuan AS dalam berperilaku di sistem internasional.

Seperti yang tertuang dalam *U.S. National Security Strategy of Engagement*, AS memiliki beberapa prinsip yang menjadi formula dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Prinsip yang pertama adalah prinsip kebebasan yang diterapkan dalam pemerintahan demokratis dan ekonomi pasar. Selain itu AS juga mendukung Hak Asasi Manusia (HAM).²¹ AS juga berusaha menciptakan kerjasama internasional dengan negara-negara di dunia. Seperti yang tercantum dalam *U.S. National Security Strategy of Engagement* yaitu :

"Our national security strategy is based on enlarging the community of market democracies while deterring and containing a range of threats to our nation, our allies, and our interests."²²

Strategi-strategi AS dalam mempromosikan demokrasi didukung dengan beberapa argumen yaitu pertumbuhan ekonomi dan iklim demokrasi yang ada di AS merupakan contoh yang dapat diadopsi di negara-negara lain.²³ Dengan adanya demokrasi akan menciptakan kebebasan individu dan transparansi dalam institusi-

²¹ Stephen J. Blank, et.all., U.S Policy in Balkans : A Hobson's Choice, *Strategic Studies*, 2008, hlm 3.

²² *Ibid.*, hlm 3.

²³ R. Craig Nation and Michael McFaul, The United States and Russia Into The 21st Century, *Strategic Studies*, 1997, hlm 55.

institusi pemerintahan sehingga dapat menciptakan kondisi negara yang demokratis. Kemudian kerjasama yang dilakukan oleh AS dengan negara-negara lain merupakan cerminan kebijakan luar negeri untuk menciptakan tatanan dunia yang baik yang didukung oleh institusi dunia yang menjadi wadah kerjasama tersebut.

Pasca Perang Dingin AS menggelar sejumlah strategi baru dalam memasuki abad ke-21. Diantara butir-butir strategi AS itu antara lain adalah²⁴ :

1. Visi Eropa yang bebas nuklir.
2. Bergantung pada pasukan AS dengan mengupayakan perang jangka pendek.
3. AS akan memobilisasi struktur kekuatan perimbangan untuk menghadapi kekautan yang akan muncul.
4. Menggunakan senjata konvensional modern, bukan senjata strategis.
5. Pengaturan konflik dengan intensitas menengah.

Ketika Uni Soviet kalah pada Perang Dingin, negara-negara Eropa Timur banyak menjalin hubungan dengan negara-negara Barat, misalnya dengan bergabung dengan NATO. Bahkan ada pula dari negara-negara tersebut yang mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan UE, seperti Bulgaria dan Rumania. Walaupun tidak semua negara-negara Eropa Timur tergabung dalam NATO atau UE, negara-negara tersebut merasakan bentuk dukungan lain dari negara-negara Barat seperti peluang masuk ke pasar internasional melalui kerjasama minyak dan gas, dukungan terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI), usaha mediasi untuk mengatasi masalah separatis, bantuan teknis untuk mempercepat akses masuk ke *World Trade Organization* (WTO), pelatihan dan bantuan peralatan untuk memberantas *drug trafficking* dan *nuclear smuggling*, kerjasama dalam hal *counterterrorism*, dan sebagainya.

Dalam *U.S. National Security Strategy of Engagement and Enlargement* disebutkan bahwa kepentingan nasional AS di kawasan Eropa adalah²⁵ :

1. ikut menciptakan kawasan Eropa yang stabil dan aman melalui kerjasama dan kekuatan militer.

²⁴ Asep Setiawan, *Doktrin Strategi Perang Dingin dan Sesudahnya*, diunduh dalam <http://theglobalpolitics.com/?p=10> Diakses pada 15 Februari 2011, Pukul 09.30 WIB.

²⁵. Stephen J. Blank, et.all., *Op.Cit.*, hlm 3.

2. AS ingin mendapatkan akses di pasar ekonomi Eropa
3. Mendukung pertumbuhan demokrasi dan kebebasan individu di Eropa Tengah dan Timur.

Tujuan jangka panjang yang akan dicapai AS sesuai dengan apa yang disebutkan dalam *U.S. National Security Strategy of Engagement and Enlargement* tersebut adalah AS ingin menciptakan dunia yang tidak saja aman, namun lebih baik yang bertujuan untuk menciptakan kebebasan ekonomi dan politik, hubungan yang selaras dengan negara lain dan penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya AS akan bekerjasama dengan pihak lain untuk menghindari konflik regional, menciptakan era baru bagi pertumbuhan ekonomi global lewat pasar dan perdagangan bebas, dan lain-lain

Sehingga secara garis besar pada masa setelah berakhirnya Perang Dingin pemerintah AS memiliki beberapa tujuan politik luar negeri AS yang ingin dijalankan yakni²⁶ :

1. untuk mempertahankan AS, warga negaranya di dalam maupun luar negeri, para sekutu AS dari berbagai bentuk serangan langsung,
2. untuk mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional,
3. untuk mempertahankan kepentingan ekonomi AS,
4. untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai demokrasi,
5. untuk mencegah proliferasi senjata nuklir,
6. untuk menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap AS. Untuk itu AS harus selalu mempertahankan komitmen-komitmen internasionalnya,
7. memerangi kemiskinan, kelaparan serta pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

AS dan negara-negara Barat telah mengumumkan program perluasan NATO ke negara-negara Timur, yaitu ke negara-negara Blok Sosialis (Pakta Warsawa) dan ke negara-negara pecahan Uni Soviet. Khusus untuk beberapa negara di kawasan

²⁶ Indrya Smita Notosusanto, "Politik Global Amerika Serikat Pasca Perang Dingin", dalam Juwono Sudarsono, dkk., *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996), hlm 117.

Kaukasus, NATO dan AS telah melakukan beberapa aktivitas pendahuluan guna mempersiapkan keikutsertaan negara tersebut dalam keanggotaan NATO tersebut. Berikut adalah tabel mengenai kegiatan-kegiatan tersebut. Lihat tabel 3.2

Tabel 3.2
Kegiatan Persiapan Negara-Negara Pecahan Uni Soviet
dalam Keanggotaan NATO

No.	Tahun	Kegiatan	Negara	Tujuan
1	1998	Pembentukan Dewan Keamanan Internasional untuk Georgia. Dikepalai oleh Jend. G. Jhonson dari Inggris	Georgia	Memberikan bantuan konsultasi penyempurnaan infrastruktur sistem pertahanan dan pengendalian angkatan bersenjata
2	1998	Sejak bulan Oktober, AS menambahkan Georgia, Armenia, dan Azerbaijan ke dalam zona tanggung jawab komando AU-nya di kawasan Eropa	Georgia, Armenia, dan Azerbaijan	
3	1999	AS mengucurkan dana sebesar 12,3 juta USD bagi pembangunan infrastruktur Penjaga Pantai Georgia. Pentagon menyetujui pemasukan 14 heli tempur dan pembuatan beberapa jet tempur SU-39 Modern di pabrik pesawat di Tbilisi Mengirim 17 kapal bagi Departemen Perbatasan Pantai Georgia dari Dinas Penjaga Pantai Georgia	Georgia	Memperkuat perbatasan darat dan pantai Georgia.
4	Sejak 1994	Dalam kerangka “Partnership for Peace” dan “Individual	Georgia, Armenia, dan Azerbaijan	Kesiapan menjadi anggota NATO

		Parnership”, NATO telah menjadwalkan kemungkinan beberapa negara-negara pecahan Uni Soviet akan bergabung, dan beberapa negara-negara Kaukasus seperti Georgia, Armenia, dan Azerbaijan diikutsertakan dalam pelatihan militer.		
--	--	---	--	--

Sumber : A. Fahrurroji, Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus. *Glasnotst*, Vol 4 No. 2, Oktober 2008 - Maret 2009, hlm 23-24.

AS sempat berencana untuk menempatkan peralatan anti-rudalnya di Republik Polandia dan Ceko, yang memicu kemarahan Rusia. Namun rencana tersebut akhirnya batal dilaksanakan. AS membantah bahwa pembatalan rencana pembangunan pangkalan missil penangkal di Polandia dan sistem radar canggih di Ceko disebabkan karena keberatan Rusia.²⁷ Seperti yang dikatakan oleh Presiden Barack Obama bahwa keputusannya untuk mengubah rencana pangkalan missil itu jangan dilihat sebagai suatu konsesi kepada Rusia. Katanya adalah suatu hal yang baik apabila dengan pembatalan rencana itu pemerintah Rusia merasa lebih aman dan mau menghadapi berbagai ancaman seperti misil-misil balistik Iran atau pengembangan kekuatan nuklirnya.²⁸ Menteri pertahanan AS Robert Gates mengatakan bahwa AS tidak meninggalkan rencana pertahanan missil di Eropa, sebuah rencana baru sudah akan berfungsi beberapa tahun sebelum rancangan semula yang diajukan oleh Presiden George Bush.²⁹ Sistem pertahanan baru itu akan menggunakan missil-missil pencegat yang ditempatkan di kapal-kapal di Laut Tengah dan juga nantinya dipangkalkan di Eropa Tengah dan Selatan. Sistem pertahanan missil yang dipasang di kapal-kapal perang itu sudah akan berfungsi tahun 2011 dan teknologi serupa akan dipasang di daratan Eropa empat tahun kemudian.

Peranan AS dan negara-negara Barat lainnya di kawasan Eropa terutama di Kaukasus cukup besar dan tidak bisa diabaikan. Krisis Georgia menjadi kesempatan

²⁷ Kompas Cyber News, *Loc.Cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

bagi AS untuk memperkuat eksistensi militer AS di Georgia dan negara-negara tetangga Rusia lainnya.

III.3 Kedekatan Georgia dengan AS

Sejak *glasnost* dan *perestroika* Georgia menjadi negara yang paling vokal dalam mengumandangkan kemerdekaan negaranya. Georgia menjadi negara yang paling kuat yang menuju pada kemerdekaan negaranya. Selain itu Georgia juga menjadi negara yang paling berani menyatakan keinginan untuk bergabung dalam CIS dan menyatakan ambisinya untuk menjadi anggota NATO sebelum negara-negara pecahan Soviet lainnya menyatakan keinginan yang serupa.

Pada awal pemerintahan Georgia, pengaruh Rusia banyak mempengaruhi jalannya pemerintahan Georgia. Hal ini disebabkan oleh latar belakang historis antara Rusia dengan Georgia. Presiden pertama Georgia pasca-Soviet Zviad Gamskhurdia, mengalami kudeta pada tahun 1992. Eduard Shevardnadze diminta kembali pulang ke Georgia dari Moscow untuk memimpin pemerintahan Georgia. Negara-negara Barat menyetujui pergantian kepemimpinan Gamskhurdia yang dianggap membuat negara Georgia menjadi tidak stabil dan menyulut perang dengan Ossetia Selatan. Shevardnadze ikut berpartisipasi dalam negosiasi untuk mengakhiri perang di Ossetia Selatan. Namun yang terjadi kemudian adalah pengaruh Gamskhurdia masih kuat di Abkhazia dimana Gamskhurdia menginginkan Abkhazia kembali ke wilayah Georgia yang pada akhirnya pada tahun 1992 terjadi perang antara Georgia dengan Abkhazia. Perang dapat dihentikan pada tahun 1993 dengan Abkhazia keluar sebagai pemenang.

Setelah perang antara Georgia dengan Abkhazia berakhir, Shevardnadze sepakat untuk menghentikan pertikaian dengan Rusia sebagai mediator diantara kedua negara tersebut. Intervensi Rusia dalam pertikaian tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Shevardnadze yang ingin menciptakan perdamaian antara kedua negara dan mencegah pergerakan Gamskhurdia yang masih ingin memegang kendali. Peredaan ketegangan berusaha dicapai oleh Shevardnadze dengan dikeluarkannya perjanjian formal antara kedua negara di Moscow pada tahun 1994, dimana dibentuk demiliterisasi sepanjang zona sungai Ingur dan wilayah negara-negara CIS yang

bertindak sebagai penjaga perdamaian. Selain itu Rusia yang bertindak sebagai mediator juga membentuk tripartite yang terdiri dari Georgia, Ossetia dan Rusia yang bertugas untuk mengamankan wilayah perbatasan di Ossetia Selatan.

Pada tahun 2003 Mikhail Saakashvili muncul ke permukaan dengan Revolusi Bunga. Kemudian pada tahun 2004 Saakashvili memenangkan pemilihan umum sebagai Presiden Georgia. Saakashvili dikenal sebagai presiden dengan pemikirannya yang pro-Barat. Negara-negara Barat, terutama AS, dengan cepat mendukung pemerintahan Saakashvili yang baru, tidak seperti pada masa pemerintahan Shevardnadze yang memang pro-Rusia. Sejak pemerintahan Saakashvili inilah Georgia menjalin kedekatannya dengan AS baik secara politik maupun non politik.

Setelah pemerintahan negara Georgia baru yang pro-Barat dan menjunjung demokrasi muncul pada tahun 2003, Russia mulai menunjukkan ketidaksukaannya pada Georgia yang pro-Barat. Rusia yang sebelumnya bertindak sebagai mediator dan penjaga perdamaian dalam konflik Georgia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan, perlahan ikut menjadi bagian dari konflik tersebut.³⁰ Rusia secara konsisten mendukung gerakan *secessionism* melawan Georgia, baik secara politik maupun militer sejak awal tahun 1990-an. Rusia menolak untuk menarik pasukannya dari basis militernya di wilayah Georgia. Rusia juga menjatuhkan bom di beberapa targetnya di wilayah Georgia. Berbagai cara dilakukan Rusia untuk menjatuhkan pemerintahan Rusia, termasuk tekanan ekonomi melalui ketergantungan Georgia akan energi Rusia.

Rusia secara nyata terlihat mendukung Abkhazia dan Ossetia Selatan, dan berani memberikan sanksi atau hukuman bagi Georgia sebagai bentuk ketidaksukaannya pada Georgia. Pada tahun 2006 Rusia menjatuhkan embargo ekonomi bagi Georgia. Rusia menutup semua jaringan transportasi, perdagangan, dan telekomunikasi. Di tahun berikutnya, Rusia menyerang bangunan pengawas tempat Georgia mengontrol wilayah Abkhazia.

³⁰ Svante E. Cornell, *Georgia After The Rose Revolution : Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy*, *Strategic Studies*, Februari 2007, Hlm 5.

Tekanan Rusia tersebut terlihat untuk mempertahankan kontrol Rusia di Georgia di masa yang akan datang. Karena semenjak pemerintahan Georgia yang pro-Barat, Georgia menjalankan prioritas kebijakan luar negeri yang terlihat berusaha menjauhi pengaruh Rusia yaitu mendekatkan diri dengan institusi Euro-Atlantic dan menjalin kerjasama keamanan yang erat dengan AS. Ketakutan Rusia terlihat ketika AS secara nyata memperlihatkan keinginannya untuk mencapai kepentingan negaranya di kawasan Kaukasus Selatan, dan Georgia secara khusus.

Konflik antara Georgia dengan Rusia seringkali disamakan sebagai konflik antara Rusia dengan Barat sejak awal tahun 1990-an.³¹ AS dipandang memiliki tujuan emas untuk mengejar hubungan dengan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet dengan memanfaatkan kondisi Rusia yang pada saat itu secara politik dan ekonomi lemah. Negara-negara Barat, khususnya AS, bertindak sebagai penyelamat ekonomi negara-negara tersebut dengan menjalin kerjasama ekonomi dengan menyalurkan bantuan ekonomi. Selain di bidang ekonomi perlahan tapi pasti AS mempengaruhi sistem pemerintahan negara-negara tersebut dengan mempromosikan HAM, demokrasi, sistem ekonomi pasar, serta secara terbuka mengkritik pemerintah Rusia yang diktator.³² Kemudian disaat yang bersamaan AS mendukung negara-negara pecahan Uni Soviet tersebut untuk ikut ke dalam keanggotaan NATO dan UE, serta mempengaruhi negara-negara tersebut untuk tidak mengindahkan segala penolakan Rusia terhadap kedekatan mereka dengan AS.

Di Georgia rezim Presiden Mikheil Saakashvilli dilihat sebagai rezim yang pro-Barat. Hal ini terlihat dari misi Saakashvilli dalam memimpin Georgia, yaitu dengan reformasi pembangunan ekonomi dengan sistem ekonomi liberal, menciptakan institusi pemerintahan yang demokratis, dan mempromosikan pemberantasan terhadap korupsi dan kriminalitas.³³ Kemudian, Saakashvilli juga mengumumkan keinginannya untuk mengembalikan Ossetia Selatan dan Abkhazia ke Georgia. Dibawah pemerintahan Saakashvilli Georgia dengan cepat meningkatkan hubungannya dengan UE, dan pada tahun 2006 menandatangani perjanjian *European*

³¹ Alexander Cooley. *Op.Cit.*, hlm 83.

³² *Ibid.*, hlm 84.

³³ *Ibid.*

Neighbourhood Policy. Sebelumnya pada tahun 2004 militer Georgia mulai bekerjasama dengan NATO dalam *International Security Assistance Force* di Afghanistan, dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu tentara AS di Irak disaat banyak negara-negara yang menarik kembali pasukannya. Pada akhir tahun 2004 Georgia menjajaki kerjasama dengan NATO dengan mengikuti *Individual Partnership Action Plan*.

Pemerintah AS sangat mendukung pemerintahan Georgia yang baru, yang dipimpin oleh Presiden Sakaashvilli, terutama pada saat Georgia memberikan dukungannya pada kebijakan luar negeri AS contohnya saat perang di Irak. Rezim Presiden Sakaashvilli juga menciptakan gambaran negara Georgia yang demokratis sebagai usahanya untuk mendapatkan dukungan politik dari AS. Tidak sedikit para pejabat pemerintahan di Georgia yang memiliki latar belakang pendidikan di AS, sehingga memiliki pengetahuan yang banyak mengenai sistem pemerintahan AS yang ingin diaplikasikan ke Georgia.

Program pemerintahan Georgia banyak yang diberi dukungan oleh pemerintah AS. *Georgia Train and Equip Programme* (GTEP) dibentuk pada 29 April 2002 oleh Departemen Pertahanan Georgia.³⁴ Program ini mendapat bantuan dari AS untuk membantu pemerintah Georgia dalam menghadapi terorisme yang saat itu sedang dialami oleh Georgia di Pankisi Georg. GTEP diharapkan dapat melengkapi upaya-upaya melawan terorisme yang telah ada di dunia internasional, dan dapat meningkatkan stabilitas dikawasan Kaukasus. Pembentukan GTEP ini diharapkan dapat diikuti oleh negara-negara lain. GTEP dibentuk berdasarkan pada *military-to-military relationship*. GTEP juga mencerminkan bentuk dukungan AS terhadap kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Georgia. Melalui GTEP Georgia mendapatkan peralatan militer dari AS. Peralatan militer tersebut meliputi seragam bagi personel militer AS, senjata dan amunisi, peralatan komunikasi, perlengkapan pelatihan, peralatan medis, dan berbagai material untuk konstruksi.

³⁴Global Security. *Georgia Train and Equip program (GTEP)*, Diunduh dalam <http://www.globalsecurity.org/military/ops/gtep.htm>, Pada 15 Februari 2011, Pukul 9.30 WIB.

Pelatihan GTEP dilaksanakan dengan dibantu oleh *U.S. Special Operations Forces* dan *U. S. Marine Corps Forces* dari bulan Mei 2002 sampai dengan Mei 2004. Selama masa pelatihan ini sekitar 2.600 tentara Georgia termasuk kepala staff dan lima divisi menerima pelatihan. Selain GTEP, Pemerintah Georgia juga membentuk program *Georgia Sustainment and Stability Operations Programme* (SSOP) yang bertujuan untuk melatih pasukan Georgia dalam menjaga perdamaian, salah satunya dalam misi perdamaian *Operation Iraqi Freedom* di Irak.³⁵ SSOP ini dibentuk untuk melanjutkan program GTEP yang sukses yang bertujuan untuk mengimplementasikan standar Barat dalam pelatihan pasukan Georgia. Pelatihan SSOP berlangsung selama 18 bulan dengan menghabiskan dana sebesar 60 Juta USD.

SSOP dan GTEP mulai menunjukkan kekuatannya pada 1 Maret 2005 ketika Georgia menempatkan pasukannya dengan jumlah besar untuk mendukung operasi militer AS di Irak. Pasukan Georgia juga membantu operasi militer di Afghanistan dan Kosovo. Sebagai hasil dari GTEP ini, militer Georgia secara signifikan dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan operasi dalam pengamanan wilayahnya, meningkatkan kemampuannya dalam melindungi kedaulatan Georgia, meningkatkan kekuatan dalam melawan teroris transnasional, dan juga menjaga stabilitas wilayah dari potensi ancaman teroris.

Melalui program *Georgia Border Security and Law Enforcement* (GBSLE), pemerintah AS membantu pemerintah Georgia dalam meningkatkan keamanan wilayah dan menegakkan hukum yaitu dengan memberikan fasilitas peralatan komunikasi, kendaraan, helikopter beserta suku cadangnya, yang berguna untuk transportasi dan patroli, peralatan untuk mendeteksi, komputer dengan pengaplikasian program yang modern, sistem regulator dan lisensi, serta laboratorium forensik.

Secara umum AS akan memberikan dukungannya kepada Georgia terutama dalam bidang ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan Georgia dan juga untuk memastikan posisi Georgia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi

³⁵Global Security, *Georgia Security & Stability Operations (Georgia SSOP)*, Diunduh dalam <http://www.globalsecurity.org/military/ops/gssop.htm>, Pada 15 Februari 2011, Pukul 9.30 WIB.

yang terbilang cepat. Secara garis besar komitmen AS terhadap Georgia adalah sebagai berikut³⁶ :

1. AS akan memberikan bantuan ekonomi bagi Georgia untuk mengembalikan ekonomi Georgia dan kebutuhan masyarakat Georgia. Pemberian bantuan akan ditujukan untuk pembangunan jangka panjang yang ditujukan untuk pemerintah Georgia, rehabilitasi infrastruktur, pembiayaan sektor swasta, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan-pembangunan lainnya.
2. Bantuan kemanusiaan untuk membantu masyarakat Georgia yang terkena dampak invasi. Bantuan tersebut berupa bantuan makanan dan obat-obatan.
3. AS bekerja sama dengan beberapa bank untuk memformulasikan beberapa rencana yang ditujukan untuk kebutuhan rekonstruksi Georgia dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi Georgia. Sejak tahun 2007 Georgia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. AS mendukung strategi Georgia dengan *International Monetary Fund* (IMF) untuk mendorong kembali rasa kepercayaan investor terhadap Georgia.
4. AS akan memperdalam hubungan perdagangan dan investasi dengan Georgia. AS akan memperluas kerangka kerjasama perdagangan dan investasi dengan Georgia, mengeksplorasi kemungkinan yang dapat memperluas kerjasama investasi bilateral, menawarkan bentuk regulasi baru yang memungkinkan pasar AS untuk lebih mudah masuk di Georgia, dan sebaliknya. Kemudian berusaha untuk membantu Georgia mendapatkan investor, sehingga dapat memperbesar hubungan AS dan Georgia dalam komunitas bisnis.

Konflik antara Georgia dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia memberikan keuntungan bagi Georgia. Georgia mendapatkan bantuan sebesar 1 Miliar USD dari AS sebagai bentuk kerjasama bilateral diantara kedua negara pada Juni 2009.³⁷ Selain

³⁶ White House Government. *Fact Sheet : US Support for Georgia, The United States Supports The Recovery, Stability, And Continued Growth Of Georgia's Economy*. 3 September 2008. Diunduh dalam <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/09/20080903-6.html>. Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.

³⁷ United States Department of States. Office of the Coordinator of U.S Assistance to Europe and Eurasia. *Foreign Operations Appropriated Assistance Fact Sheet*. December 2009. Diunduh dalam <http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/140638.htm>. 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.

itu, AS juga memberikan dukungan berupa paket bantuan ekonomi untuk Georgia untuk pembangunan infrastruktur yang rusak dan membantu mengembalikan kepercayaan investor pada ekonomi Georgia.³⁸

Selain itu Georgia juga mendapatkan bantuan sebesar 3,5 Miliar USD dari dunia internasional yang ditujukan untuk bantuan finansial dan rekonstruksi. AS juga mendukung upaya Georgia untuk mempertahankan keamanan sumber daya energi minyak yang dimiliki Georgia dengan melakukan diversifikasi sumber-sumber energi. Kemudian AS juga menyatakan untuk membantu membangun kembali militer Georgia, terutama untuk memodernisasi sistem pertahanan Georgia.

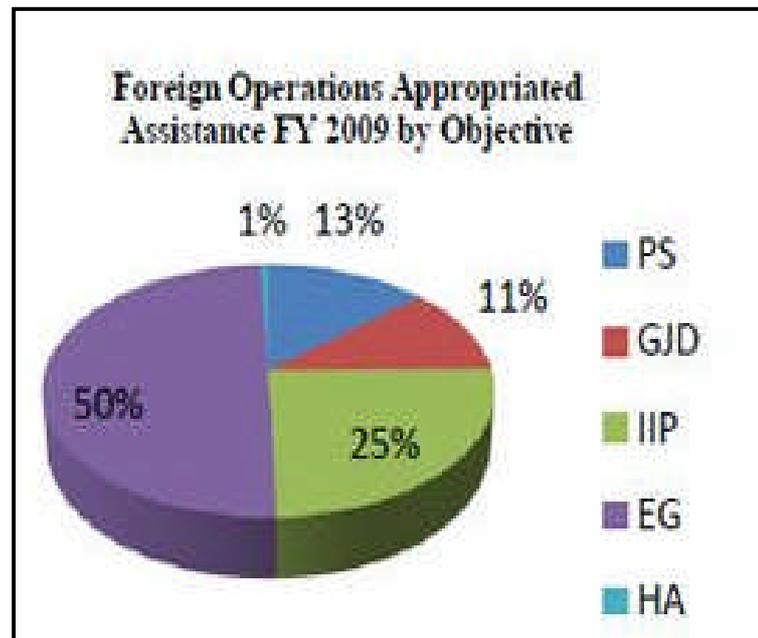
Dukungan AS ke Georgia terlihat dengan adanya kerjasama antar kedua negara yang lebih terfokus pada bidang pertahanan, seperti pelatihan militer Georgia, dan penandatanganan *strategic partnership* pada awal 2010. Seperti yang tercantum dalam *Assistance Fact Sheet United States Department of States*, prioritas bantuan yang diberikan oleh AS kepada Georgia adalah menciptakan perdamaian dan keamanan (*Peace and Security/PS*) di Georgia, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan yang adil dan demokratis (*Governing Justly and Democratically/GJD*), kesejahteraan warga (*Investing in People/IIP*), pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth/EG*) dan bantuan kemanusiaan (*Humanitarian Assistance/HG*). Diagram prioritas bantuan AS ke Georgia dapat dilihat pada diagram 3.5³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Diagram 3.5

Diagram prioritas bantuan AS ke Georgia



Sumber : United States Department of States. Office of the Coordinator of U.S Assistance to Europe and Eurasia. *Foreign Operations Appropriated Assistance Fact Sheet*. December 2009. Diunduh dalam <http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/140638.htm>. Pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.

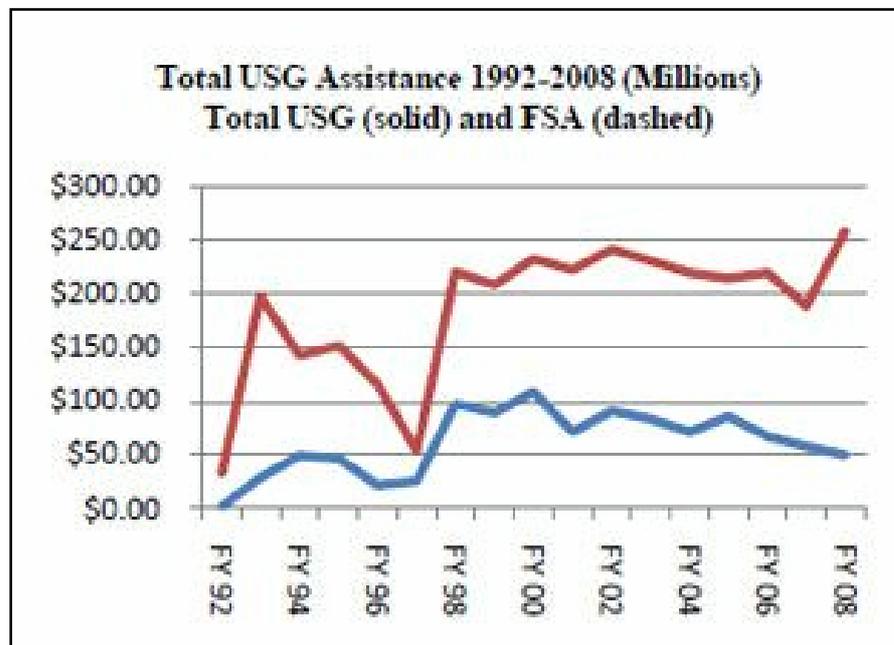
Berikut adalah poin-poin penting dari pernyataan pemerintah AS mengenai bantuan ke Georgia *peace and security* tersebut :⁴⁰

1. Reform, train and equip the Georgian military to meet NATO standards and to support contributions to international peacekeeping and security operations.
2. Improve the capacity of the Georgian Border Police and Custom Service to fight smuggling, increase revenue and improve border control.
3. Increase the skills of the Georgian judicial and law enforcement officials.
4. Enhance forensic capabilities to meet international standards.

⁴⁰ *Ibid.*

Berikut adalah total bantuan yang telah diberikan AS kepada Georgia sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2008. Lihat diagram 3.6. Sedangkan rincian pemberian bantuan oleh AS ke Georgia dan *FREEDOM Support Act (FSA)* dari tahun 1992 sampai 2008 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Diagram 3.6
Total Bantuan AS ke Georgia
1992-2008



Sumber : United States Department of States. Office of the Coordinator of U.S Assistance to Europe and Eurasia. *Foreign Operations Appropriated Assistance Fact Sheet*. December 2009. Diunduh dalam <http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/140638.htm>. Pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.

Tabel 3.3
FSA dan Bantuan AS ke Georgia
Tahun 1992 - 2008

Tahun	FSA (dalam juta dollar)	USG (dalam juta dollar)
1992	1,83	30,99
1993	29,22	169,01
1994	49,6	143,08
1995	46,77	152,18
1996	21,97	116,43
1997	25,79	54,09
1998	97,95	221,32
1999	89,45	208,99
2000	109,13	233,64
2001	71,92	223,15
2002	91,68	242,49
2003	84,17	231,81
2004	71,92	220,21
2005	86,23	215,33
2006	67,49	220,21
2007	58	131,58
2008	50,09	209,59

Sumber : United States Department of States. Office of the Coordinator of U.S Assistance to Europe and Eurasia. *Foreign Operations Appropriated Assistance Fact Sheet*. December 2009. Diunduh dalam <http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/140638.htm>. Pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.

Georgia sendiri sangat berharap untuk dapat meningkatkan kerjasama bilateral dengan AS, hal ini terkait dengan prioritas negara Georgia yang diinginkan dicapai. Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Georgia Grigol Vashadze menyebutkan beberapa prioritas negara Georgia, yaitu⁴¹ :

1. To continue to advance democracy, human rights, and the establishment of effective state institutions;
2. To further our economic development in the midst not only of a global crisis, but of the investment chill that comes with war;
3. To continue to work with our friends on how best to peacefully restore our territorial integrity;
4. To accelerate our European and Euro-Atlantic integration; and
5. To ensure security for all of Georgia, without which the previous goals are simply impossible to achieve.

Dalam pidato Vashadze tersebut, selain keinginan untuk meningkatkan kerjasama dengan AS, Georgia juga membutuhkan AS untuk mengembalikan situasi di Georgia pasca perang dengan Rusia. Selain itu terlihat bahwa Georgia membutuhkan AS untuk melawan Rusia.

“As we all know, these past ten months have been extremely difficult ones for my country, the interests and values our nations share have been endangered by Russia. This is why Georgia, now more than ever, needs the continuous and firm U.S. support. The effects of the Russia-Georgia war have put my country in a difficult situation, compelling us to stay vigilant against external provocations and threats, while also advancing our reform agenda. Yet despite all the hindrances and problems caused by Russia, Georgia is committed to its democratic

⁴¹ Georgia and the United States : Strategic Partnership for Democracy and Security. *Remarks by the Minister of Foreign Affairs of Georgia H. E. Mr. Grigol Vashadze at the Carnegie Endowment for International Peace*. Washington DC, June 23rd 2009. Diunduh dalam <http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/January/20090109145313caifas0.2139093.html> Diakses pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.

reform efforts, which we know contribute to security and stability in the region.”⁴²

Selain itu, Vashadze juga menyatakan bahwa Georgia memiliki visi yang sama dengan AS yaitu mengedepankan demokrasi dan berusaha menciptakan perdamaian. Georgia siap untuk melakukan reformasi di segala aspek pembangunannya untuk mengatasi krisis ekonomi yang dialami negaranya sebagai upaya Georgia untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian negaranya. Georgia menyadari bahwa pasca terjadinya Revolusi Mawar Georgia membutuhkan hukum yang kuat, meningkatkan pluralisme politik, dan membuka peluang untuk kebebasan berekspresi. Hal-hal tersebut adalah pembaharuan yang ingin dilakukan oleh Georgia pasca agresi Rusia.

“My people have always aspired to democracy and peace. In fact, Georgia has chosen democracy as its weapon of resistance against Russian aggression. Our Government remains as firm in pushing forward with reforms and development. We recognize that many Georgians face real poverty and economic pressure, a fact exacerbated by the global crisis. Therefore, our Government is ready and willing to continue pressing for reforms in all directions. The second wave of the Rose revolution—which is aimed at further strengthening the rule of law, increasing political pluralism and bolstering freedom of expression—is our answer to challenge we face in the aftermath of the Russian aggression”.⁴³

Peran AS dalam upaya Georgia melakukan pembaharuan dinilai sangat penting. Karena Georgia menganggap negaranya memiliki nilai-nilai fundamental yang sama dengan AS, yaitu nilai-nilai demokratis. Selain itu, isu keamanan dan demokrasi menjadi inti dari kepentingan bersama antara Georgia dengan AS. Keinginan Georgia untuk menintegrasikan nilai-nilai negaranya pada institusi Barat

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

dipercaya akan menciptakan suatu bentuk dimana negara-negara akan memilih mengedepankan kebebasan, integrasi wilayah, dan keamanan negara.

“I will never tire in saying how important US engagement is to Georgia. Our countries are natural partners with shared democratic values. Security and the spread of democracy stand at the core of our mutual interest. Our common efforts can deter those who want to thwart our freedoms. Georgia’s integration into western institutions will serve as a model for all states in the region to emulate, by choosing freedom over captivity, territorial integrity over territorial problems, and security over fear. With this in mind, I remain hopeful and optimistic”.⁴⁴

Pada Januari 2010 Georgia dan AS resmi menandatangani kerjasama *strategic partnership* terutama dalam bidang pertahanan dan ekonomi yang tertuang dalam *United States-Georgia Charter on Strategic Partnership*. Dalam pembukaan perjanjian kerjasama strategis tersebut disebutkan bahwa AS dan Georgia akan memperdalam hubungan keduanya untuk mendapatkan keuntungan diantara sesamanya dan memperluas kerjasama yang lebih luas lagi. Isi dari pembukaan kerjasama strategis tersebut adalah⁴⁵ :

1. Affirm the importance of our relationship as friends and strategic partners. We intend to deepen our partnership to the benefit of both nations and expand our cooperation across a broad spectrum of mutual priorities.
2. Emphasize that this cooperation between our two democracies is based on shared values and common interests. These include expanding democracy and economic freedom, protecting security and territorial integrity, strengthening the rule of law and respect for human rights, including the right of dignified, secure and voluntary return of all internally displaced persons and refugees, supporting innovation and technological advances, and bolstering Eurasian energy security.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

3. Stress our mutual desire to strengthen our relationship across the economic, energy, diplomatic, scientific, cultural and security fields.

Bagi Georgia, kedekatan Georgia ke negara-negara Barat menjadi prioritas kebijakan luar negeri Georgia. Georgia berharap dapat meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Barat, sehingga dapat membantu Georgia dalam menyelesaikan masalah-masalah negaranya baik masalah internal maupun dengan Rusia. Dalam pidatonya Vashadze menyebutkan bahwa Georgia mencari keamanan dan kestabilan negaranya dengan mendekati diri pada negara-negara Barat.

“In this regard, our effort to join western structures derives from the shared values and principles that Georgians hold very dear. European and Euro-Atlantic integration remains Georgia’s foreign policy priority. We are determined to undertake all the necessary steps in order to advance the integration process and comply with required standards. This integration is a natural process for Georgia. It is critical to our country’s security, and also serves the interest of our allies, who seek security and stability more broadly throughout Europe. Georgia by no means wants to import its problems into NATO or other structures. But there is truth in the notion that had Georgia been accepted into NATO prior to August, Russian aggression would simply have been deterred and avoided. Let us remain hopeful that the Alliance will not let the same thing happen ever again”⁴⁶

“Georgia greatly appreciates the continuous support of the US for deepening our integration into Euro-Atlantic institutions and enhanced security cooperation between our two countries. Georgia will work fervently in order to strengthen its candidacy for NATO membership and take full advantage of the Annual National Plan (ANP), which is a great opportunity for my country to get

⁴⁶ *Ibid.*

closer to NATO on our way to eventual membership”⁴⁷

AS sendiri memiliki komitmen untuk berusaha menciptakan perdamaian dan menegakkan demokrasi, serta menjunjung HAM di Kaukasus, terutama di Georgia. Hal ini dikatakan oleh Duta Besar AS di Vienna, Ian Kelly, mengenai upaya AS untuk mengedepankan upaya-upaya resolusi konflik di Kaukasus, serta menciptakan resolusi damai di Georgia.⁴⁸

As we work to improve the security and humanitarian situation in Georgia, we will continue to urge respect for the human rights of all individuals in the conflict areas; to call for free and unhindered access to the whole of Georgia; and to seek the safe, dignified and voluntary return of internally displaced persons and refugees. We will also continue to urge the re-establishment of an appropriate OSCE presence throughout Georgia. Along with the European Union, we remain convinced that the OSCE and other international actors can play a valuable role in resolving ongoing problems and providing critical monitoring of human rights and humanitarian conditions.

Selain itu Ian Kelly juga menyatakan bahwa AS berusaha menciptakan perdamaian jangka panjang di Georgia dan tetap mendukung kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Georgia.

“Like other OSCE partners, we are focused on efforts to achieve a long-term, peaceful resolution to the conflict in Georgia and to develop better mechanisms for preventing and resolving crises. While we note that the findings contained in the independent international fact-finding mission's report on the origins and causes of the August 2008 conflict in Georgia are solely those of the mission

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ The U.S. Department of State Official Website. *U.S. Response to Efforts for Conflict Resolution in Caucasus (May 27)*. Diunduh dalam <http://georgia.usembassy.gov/latest-news/official-statements-2010/u.s.-response-to-efforts-for-conflict-resolution-in-caucasus-may-27>. Diakses pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.

itself, the report should not be used to assess blame but to identify lessons learned by all sides for the future.”

“The United States remains committed to achieving a long-term, peaceful resolution to the conflict and will continue to support Georgia's sovereignty, independence, and territorial integrity within its internationally recognized borders”.

Pada 19 November 2010 Presiden AS Barack Obama bertemu dengan Presiden Saakashvili di Lisbon membicarakan tentang penguatan hubungan bilateral dan meningkatkan kerjasama antara AS dengan Georgia.⁴⁹ Presiden Obama meyakinkan Presiden Saakashvili bahwa pemerintah AS mendukung kedaulatan Georgia dan integritas wilayah Georgia. Presiden Obama menyatakan penghargaan negaranya kepada Georgia atas kontribusi Georgia di Afghanistan dan pengorbanan yang berani dari pasukan negaranya. Kedua pemimpin negara tersebut mendiskusikan tentang upaya-upaya Georgia untuk mengimplementasikan kepentingan bersama mereka dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan, serta nilai-nilai bersama dalam hal mengamankan demokrasi, stabilitas, dan kesejahteraan di Georgia.

III.4. Jalur Pipa Minyak dan Gas Kaukasus

Kaukasus adalah sebuah daerah di Eropa Timur dan Asia Barat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia yang termasuk Pegunungan Kaukasus dan daerah-daerah rendah lainnya. Kaukasus kadang dianggap sebagai bagian dari Asia Tengah. Negara-negara merdeka yang membentuk Kaukasus kini adalah Rusia (Distrik Kaukasus Utara), Georgia, Armenia dan Azerbaijan. Wilayah besar non-independen di Kaukasus meliputi Ossetia, Chechnya, Ingushetia dan Dagestan di antaranya. Kaukasus adalah salah satu daerah yang mempunyai keanekaragaman linguistik dan budaya yang paling luas di dunia. Wilayah Kaspia mempunyai cadangan hidrokarbon

⁴⁹ The U.S Department of States Official Website. Read-out of the President's Bilateral Meeting with President Saakashvili of Georgia. (November 19). Diunduh dalam <http://georgia.usembassy.gov/latest-news/official-statements-2010/-read-out-of-the-presidents-bilateral-meeting-with-president-saakashvili-of-georgia.-november-19>. Diakses pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.

yang sangat besar yang belum tersentuh. Cadangan gas terukur di Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kazakhstan lebih dari 236 Triliun kaki kubik.⁵⁰ Sedangkan total cadangan minyak di wilayah itu kemungkinan lebih dari 60 Miliar barrel. Cukup untuk melayani kebutuhan minyak Eropa selama 11 tahun. Bahkan, ada perkiraan cadangan minyak Kaspia mencapai 200 Miliar barrel.⁵¹ Sejak 100 tahun lalu industri minyak internasional lahir di Kaspia atau Asia Tengah setelah ditemukannya minyak di sana. Keberadaan migas di wilayah itu secara umum juga telah banyak diketahui pada masa Uni Soviet, tetapi baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan.

Pada tahun 1995, wilayah itu memproduksi 870.000 barrel per hari (44 juta ton per tahun). Menurut perhitungan proyeksi, tahun 2010 perusahaan Barat bisa meningkatkan produksi minyak dari Kaspia mencapai 4,5 Juta barrel per hari. Naik lebih dari 500 persen hanya dalam 15 tahun.⁵² Oleh karena itulah diperlukan sejumlah rute baru untuk jaringan pipa migas di wilayah Asia Tengah karena jaringan pipa yang ada saat ini praktis berada di bawah kekuasaan Rusia.

Salah satu negara yang paling sering mendapatkan sorotan di kawasan Kaukasus adalah Georgia, terutama terkait dengan dinamika hubungan negaranya dengan AS dan Rusia. Negara Georgia menyatakan kemerdekaannya dari Rusia pada tahun 1992. Pengangguran di Georgia masih terbilang cukup tinggi. Namun Presiden Georgia saat itu Eduard Shevardnadze memiliki visi untuk negara Georgia yaitu meningkatkan perekonomian Georgia khususnya perdagangan. Shevardnadze ingin menjadikan Georgia sebagai negara transit yang terpenting di dunia.⁵³ Jalan-jalan utama, kereta api dan rute jalur pipa antara Asia dan Eropa melewati batas-batas wilayahnya.

Georgia memang memiliki persediaan hidrokarbon yang sangat sedikit, namun letaknya yang strategis menjadi tempat transit yang penting dalam

⁵⁰ *Kompas Cyber Media*, Perburuan Migas di Kaspia, Minggu 14 September 2008. Diunduh dalam <http://internasional.kompas.com/read/2008/09/14/22234348/perburuan.migas.di.kaspia>. Pada 2 Juni 2011, Pukul 10.00 WIB.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Global Security. *Loc. Cit.*

pendistribusian minyak dan gas. Misalnya pengiriman gas dari Rusia ke Armenia, atau minyak dan gas dari Laut Kaspia ke pasar-pasar Barat. Pada masa pemerintahan Presiden Saakashvilli rute jalur pipa baru dibangun mulai dari Laut Kaspia yang kaya minyak melalui Georgia menuju pelabuhan Ceyhan Turki di Laut Medditerania. Terbentang sepanjang 249 km jalur pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) yang melewati Georgia.⁵⁴ Jalur ini membawa minyak dan gas dari Azerbaijan untuk dikonsumsi di negara-negara Barat.

Georgia mungkin bukanlah negara yang paling penting di kawasan Kaukasus. Dapat dikatakan negara Azerbaijan yang dapat dikategorikan memainkan peranan penting di kawasan tersebut. Azerbaijan memiliki luas negara yang lebih besar jika dibandingkan dengan Georgia. Selain itu, Azerbaijan adalah satu-satunya negara yang berbatasan dengan Rusia dan Iran, sehingga menjadi koridor antara Timur dengan Barat. Azerbaijan juga memiliki sumber daya energi yang melimpah. Walaupun demikian keberadaan Georgia dapat diperhitungkan di kawasan tersebut. Georgia memainkan peran yang strategis dalam menghubungkan Laut Kaspia dan Azerbaijan dengan Barat.⁵⁵ Georgia memainkan peranan dalam pengembangan sumber daya energi di kawasan Kaukasus baik dalam hal distribusinya, maupun pengembangan proyek-proyek jalur pipa minyak dan gas baru yang dapat menghubungkan kawasan Kaukasus dengan negara-negara Barat.

Georgia memang bukan negara penghasil minyak terbesar di dunia, namun keberadaan Georgia menjadi sangat penting karena Georgia merupakan tempat transit pengiriman minyak dari produsen minyak di wilayah Laut Kaspia dan Asia Tengah menuju Eropa dan AS.⁵⁶ Georgia merupakan satu-satunya negara transit bagi produsen minyak dunia yang jalur pengirimannya tidak melewati Rusia dan Iran. Saat

⁵⁴ *Times Online*. Georgia: Europe fears for oil supply as clash threatens pipeline. Diunduh dalam http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article4499863.ece . Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.

⁵⁵ Svante E. Cornell, Georgia After The Rose Revolution : Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy, *Strategic Studies*, Februari 2007, hlm 5.

⁵⁶ *Times Online*. Analysis: energy pipeline that supplies West threatened by war Georgia conflict. 8 Agustus 2008. Diunduh dalam <http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4484849.ece> Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.00 WIB.

ini jalur pipa Baku-Tbilisi-Ceyhan terbentang sepanjang 1.770 km yang dapat memompa pengiriman minyak sebanyak satu juta barrel per hari dari Baku Azerbaijan menuju Yumurtalik, Turki. Pengiriman minyak per hari membutuhkan tank yang sangat besar. AS dan negara-negara di Eropa merupakan negara yang paling banyak mengkonsumsi minyak untuk kebutuhan negaranya. Lihat Diagram 3.7.

Diagram 3.7
Negara Pengkonsumsi Minyak Terbesar

United States of America			20,800,000 bbl
China			6,930,000 bbl
Japan			5,353,000 bbl
Russia			2,916,000 bbl
Germany			2,618,000 bbl
India			2,438,000 bbl
Canada			2,290,000 bbl
South Korea			2,130,000 bbl
Brazil			2,100,000 bbl
Mexico			2,078,000 bbl
Saudi Arabia			2,000,000 bbl
France			1,999,000 bbl
United Kingdom			1,820,000 bbl
Italy			1,732,000 bbl
Iran			1,630,000 bbl
Spain			1,600,000 bbl
Indonesia			1,100,000 bbl
Thailand			929,000 bbl
Australia			903,200 bbl
Taiwan			816,700 bbl
Turkey			660,800 bbl
Egypt			635,000 bbl
Venezuela			599,000 bbl
South Africa			519,000 bbl
Argentina			480,000 bbl
Poland			462,700 bbl
Greece			415,700 bbl
Sweden			363,200 bbl
Pakistan			345,000 bbl
Philippines			340,000 bbl
Iraq			295,000 bbl
Ukraine			284,600 bbl

Sumber : Global Fire Power. *Oil Consumption*. Diunduh dari <http://www.globalfirepower.com/oil-consumption-by-country.asp>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Pada awalnya jalur pipa listrik yang dikenal untuk membawa minyak dan gas adalah *South Caucasus Pipeline* (SCP). SCP memiliki rute yang sama dengan BTC, yaitu membawa minyak dan gas dari Azerbaijan melalui Georgia menuju Turki. Namun rute SCP lebih pada jalur dari Baku-Tbilisi-Erzurum. SCP dikontrol oleh konsorsium non-Rusia, yang menggambarkan bahwa jalur pipa ini juga sangat penting dimana saat ini pengiriman minyak dan gas lebih banyak melalui Rusia sebagai pemasok gas alam terbesar saat ini. Contohnya adalah Jerman yang mendapatkan 40% pasokan gas alam melalui SCP dan sisanya dari Rusia. Lihat gambar 3.2.

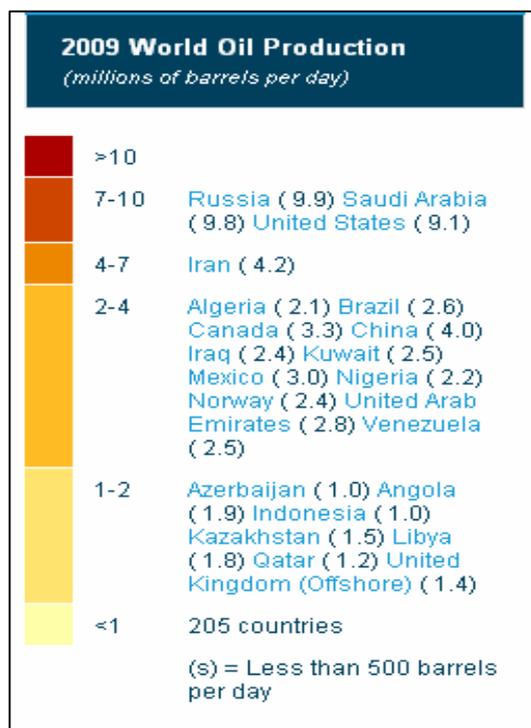
Gambar 3.2
Jalur Pipa SCP, BTC, dan Alternatif.



Sumber : New Energy News diunduh dari <http://newenergynews.com/2008/08/georgias-pipelines-and-europes-choice.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

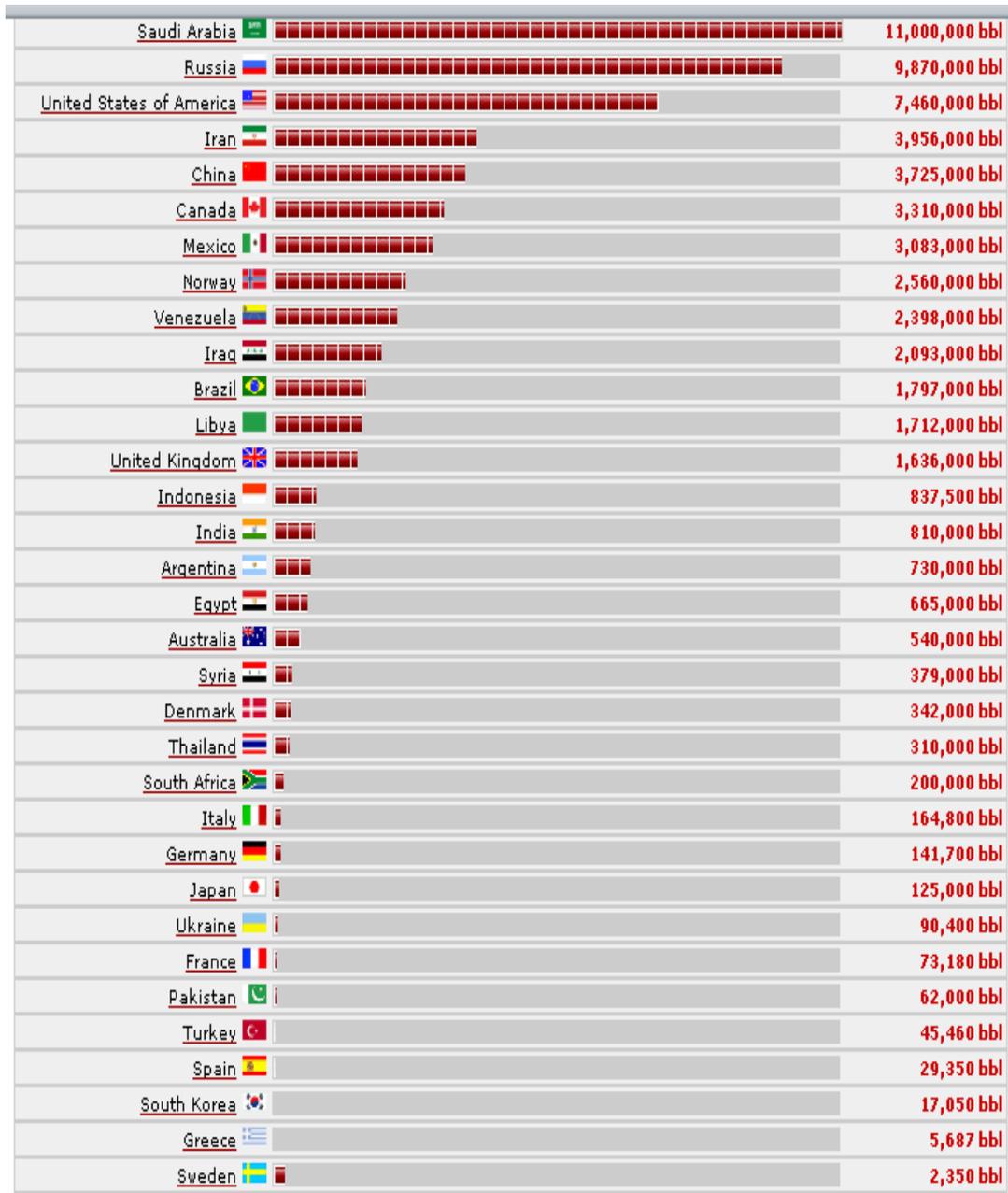
Rusia seringkali menggunakan isu gas sebagai senjata untuk melawan negara-negara anggota UE, seperti halnya ketika Rusia menghentikan pengiriman gas dan minyak ke Ukraina, Belarus dan Republik Chehnya pada tahun 2005. Sehingga Eropa harus memikirkan alternatif lain selain pasokan minyak dan gas dari SCP. Karena tidak dapat dipungkiri pada tahun 2007 Rusia muncul sebagai negara penghasil minyak terbesar setelah Arab Saudi. Namun pada tahun 2009, Rusia muncul sebagai negara penghasil minyak terbesar setelah AS. Lihat diagram 3.8 dan 3.9.

Diagram 3.8
Negara Penghasil Minyak Terbesar Tahun 2009



Sumber : U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Diagram 3.9
Negara Penghasil Minyak Terbesar Tahun 2007



Sumber : Global Fire Power. *Oil Production*. Diunduh dari <http://www.globalfirepower.com/oil-production-by-country.asp>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Jalur pipa BTC dan SCP memiliki peran yang sangat penting bagi negara-negara pengimpor minyak di dunia. Selain itu, jalur pipa BTC dan SCP memberikan keuntungan bagi Azerbaijan, Georgia dan Turki sebagai negara-negara yang dilalui jalur pipa tersebut. Jalur-jalur pipa tersebut merupakan jalur transportasi yang dapat membawa sekitar satu juta barel minyak per hari ke Eropa. Walaupun pasokan tersebut hanya menggambarkan 1% dari konsumsi minyak di dunia, namun jalur pipa tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan minyak yang dikonsumsi oleh Eropa sangat meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Biaya transit yang dihasilkan dari jalur pipa tersebut memberikan pendapatan yang sangat menguntungkan bagi Azerbaijan, Georgia dan Turki. Bagi Azerbaijan, pendapatan dari jalur pipa tersebut meningkatkan pendapatan sampai dengan 25% per tahun. Pertumbuhan ini memberikan kesempatan baru bagi Azerbaijan untuk membantu pembangunan negaranya.

Pipa minyak dan gas alam ini BTC tentu saja membawa manfaat ekonomi langsung. Azerbaijan dan Georgia untuk pertama kalinya akan bebas dari ketergantungan terhadap Rusia. Melalui terminal minyak di Ceyhan, Turki juga akan bisa memetik keuntungan. Sedangkan perusahaan-perusahaan minyak terkait akan bisa mengeruk keuntungan besar sebagai imbalan investasi milyaran dolar. Negara tetangga Kazakhstan, juga akan memetik hasil dari keberadaan pipa BTC itu. Azerbaijan terbukti tidak mampu menghasilkan minyak dengan memadai sehingga bisa mengambil keuntungan dari jaringan pipa BTC. Jadi minyak dari Kazakhstan juga akan segera dipompa ke Laut Tengah.

Proyek jalur pipa BTC dan SCP dijadikan sebagai mesin penggerak bagi kerjasama regional antara Azerbaijan, Georgia, dan Turki, yang pada akhirnya berkembang ke wilayah negara lain. Perkembangan proyek jalur pipa ini memperlihatkan kemampuan negara-negara kecil untuk mengembangkan proyek infrastruktur yang besar, sehingga dapat menarik minat investor. Selain itu jalur pipa yang melewati negara-negara di Kaukasus Selatan ini merupakan bentuk dari diversifikasi atas pasokan minyak dan gas yang dapat memberikan keuntungan bagi

wilayah Kaspian yaitu saat ini dilihat sebagai pemasok alternatif yang dapat diperhitungkan.

Pembangunan jalur pipa BTC dan SCP menciptakan infrastruktur baru di wilayah Eropa Timur bagi pengiriman minyak dan gas alam ke negara-negara Barat. Proyek ini memberikan prospek yang cukup menjanjikan sebagai jalur alternatif bagi negara-negara Asia Tengah dan investor-investor yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Kaspian. Pembangunan jalur pipa kembar BTC dan SCP memberikan konsep bagi pembangunan jalur pipa gas yang lain, yaitu proyek jalur pipa gas Nabucco. Proyek ini akan membawa minyak dan gas alam dari wilayah Kaspian dan Timur Tengah menuju ke Eropa. Proyek ini bertujuan untuk membangun jalur pipa dari Turki menuju negara Eropa Tengah melalui Bulgaria, Romania, dan Hungaria, yang nantinya akan menjadi sumber gas alam dari wilayah Laut Kaspia atau Timur Tengah.

BAB IV

ALASAN DUKUNGAN AS TERHADAP GEORGIA DALAM KONFLIK GEORGIA-RUSIA

IV.1. Ekspansi AS di Eropa Timur dan Kawasan Kaukasus

Pada akhir dekade abad ke-20 dan akhir Perang Dingin, hubungan antar negara dalam sistem internasional menunjukkan bentuk hubungan yang beragam, baik kerjasama, kompetisi, maupun konflik.¹ Periode setelah berakhirnya Perang Dingin telah menciptakan geopolitik baru dan menimbulkan beberapa jenis persaingan dan konflik baik internal maupun eksternal.² Namun selain kompetisi dan konflik, kerjasama antar negara-negara pun banyak terbentuk. Tidak hanya kerjasama dalam satu kawasan tetapi juga antar kawasan. Walaupun banyak terjadi kerjasama antar negara, pencapaian kepentingan nasional masing-masing negara tetap diutamakan.

Pola kerjasama yang dilakukan saat ini lebih banyak kepada kerjasama antara negara-negara kecil dengan negara-negara besar. Misalnya kerjasama negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Karena dengan melakukan kerjasama dengan negara-negara maju diharapkan dapat meningkatkan kekuatan negara-negara berkembang tersebut baik melalui kerjasama ekonomi, pertahanan, dan sebagainya. AS adalah negara yang paling banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.

Alasan pertama mengapa AS mendukung Georgia dalam konflik Georgia dengan Rusia pada periode 2001-2010 karena terkait dengan keinginan AS untuk melakukan ekspansi ke kawasan Eropa Timur. Saat ini dunia mengakui posisi AS sebagai pemimpin dunia. AS saat ini masih memimpin dalam hal ekonomi, moneter, teknologi, dan budaya di seluruh lapisan dunia.³ Dalam hal militer, AS masih unggul dari negara-negara lain, baik dari segi kuantitas maupun kualitas peralatan dan personel militer. Selain itu biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan militer

¹ Robert Nalbandov, *Loc. Cit.*

² Alexander George, dalam Robert Nalbandov, *Loc. Cit.*

³ G. John Ikenberry, *America Unrivaled : The Future of The Balance of Power.*, (USA : Cornell University Press), hlm 2.

negaranya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Lihat Diagram 4.1

Diagram 4.1
Anggaran dan Belanja Pertahanan Militer Negara-Negara

United States of America			\$515,400,000,000	2009
France			\$61,571,330,000	2008
China			\$59,000,000,000	2008
United Kingdom			\$53,148,770,000	2008
Germany			\$45,930,000,000	2008
Japan			\$44,300,000,000	2005
Russia			\$43,200,000,000	2008
Italy			\$40,050,000,000	2008
India			\$32,350,000,000	2006
Saudi Arabia			\$31,255,000,000	2006
Turkey			\$30,936,000,000	2009
South Korea			\$25,500,000,000	2007
Brazil			\$24,400,000,000	2008
Australia			\$22,000,000,000	2009
Canada			\$19,500,000,000	2009
Israel			\$18,700,000,000	1999
Iraq			\$17,900,000,000	2008
Spain			\$17,700,000,000	2009
Poland			\$11,800,000,000	2009
Taiwan			\$10,500,000,000	2008
Greece			\$9,350,000,000	2007
Venezuela			\$7,700,000,000	2004
Sweden			\$7,000,000,000	2008
Iran			\$6,300,000,000	2007
Norway			\$6,200,000,000	2007
Mexico			\$6,070,000,000	2006
North Korea			\$5,500,000,000	2005
Thailand			\$5,000,000,000	2009
Indonesia			\$4,740,000,000	2008
Pakistan			\$4,260,000,000	2006
South Africa			\$3,700,000,000	2007

Sumber : Global Fire Power. *Defense Spending Budget*. Diunduh dari <http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp> pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Dengan kekuatan AS yang besar tersebut, AS sering kali menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, misalnya dengan negara-negara Eropa Timur. Di kawasan Kaukasus sendiri kepentingan AS di kawasan ini semakin terlihat dengan adanya kedekatan AS dengan beberapa negara-negara Kaukasus. Kemerdekaan beberapa negara-negara di kawasan tersebut yang pro-Barat semakin penting bagi keberadaan AS di Kaukasus. Peristiwa 11 September 2001 memberikan pengalaman yang berharga bagi AS. Reaksi dan respon dari negara-negara kawasan Asia Tengah dan Kaukasus terhadap tindakan teroris tersebut menunjukkan dukungan mereka terhadap AS. Negara-negara seperti Azerbaijan, Georgia, dan Uzbekistan merupakan negara-negara yang paling pertama memberikan bantuan dan dukungan terhadap AS dalam peristiwa 11 September 2001. Di sisi lain, negara-negara yang dekat dengan Rusia, seperti Armenia dan Tajikistan, tidak dapat memberikan keputusan sendiri, melainkan menunggu reaksi dari Rusia.

Kerjasama yang dilakukan oleh AS tidak terlepas dari kepentingan nasional AS yaitu pertahanan negara, mempromosikan nilai-nilai demokratis AS, menciptakan tatanan dunia yang baru, dan memperbesar kesejahteraan ekonomi negaranya.⁴ Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh AS ini tersirat dalam *National Security Strategy* tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :

“In keeping with our heritage and principles, we do not use our strength to press for unilateral advantage. We seek instead to create a balance of power that favors human freedom: conditions in which all nations and all societies can choose for themselves the rewards and challenges of political and economic liberty. In a world that is safe people will be able to make their own lives better. We will defend the peace by fighting terrorists and tyrants. We will preserve the peace by building good relations among the great powers. We will extend the peace by encouraging free and open societies on every continent.”⁵

⁴ Thomas D. Kraemer, *Addicted To Oil : Strategic Implications of American Oil Policy*, *Strategic Studies*, May 2006, hlm 9

⁵ *Ibid.*, hlm 9.

Selain kepentingan nasional AS tersebut, kondisi internasional yang saat ini sangat dinamis ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Kebijakan pertahanan negara sangat dikedepankan mengingat kondisi internasional yang dapat membahayakan AS, yaitu seperti terorisme, idealisme radikal, dan sebagainya. Perang melawan terorisme secara terang-terangan dikumandangkan oleh AS dan sekutu-sekutunya.

Negara-negara Barat, terutama AS, memiliki kepentingan juga dalam hal menyebarkan prinsip kebebasan dan demokrasi. Mempromosikan stabilitas regional, demokrasi, *good governance*, merupakan dasar dari kebijakan luar negeri AS. Ancaman terorisme transnasional, perdagangan ilegal, dan sebagainya merupakan bentuk ancaman yang menjadi perhatian AS saat ini. Sejak tragedi 11 September 2001, kebijakan luar negeri AS meluas kepada perlawanan terhadap teroris. AS secara gencar menyuarakan perang terhadap teroris dan mencari aliansi. Selain perang melawan teror, AS juga mempromosikan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld sebagai berikut:

“to win the war on terror, we must also win the war of ideas.”⁶

Gagasan AS untuk mempromosikan kebebasan dan nilai-nilai demokrasi tercantum dalam *National Security Strategy* yang berbunyi sebagai berikut :

“Freedom is the non-negotiable demand of human dignity; the birthright of every person—in every civilization. Throughout history, freedom has been threatened by war and terror; it has been challenged by the clashing wills of powerful states and the evil designs of tyrants; and it has been tested by widespread poverty and disease. Today, humanity holds in its hands the opportunity to further freedom’s triumph over all these foes. The United States welcomes our responsibility to lead in this great mission”.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm 9.

⁷ *Ibid.*, hlm 9.

“The great struggles of the 20th century between liberty and totalitarianism ended with a decisive victory for the forces of freedom—and a single sustainable model for national success: freedom, democracy, and free enterprise”.⁸

Dalam *The National Security AS* secara eksplisit disebutkan bahwa tipe pemerintahan yang menjadi dasar jalannya pemerintahan suatu negara mencerminkan nilai-nilai demokratis AS :

“The great struggles of the 20th century between liberty and totalitarianism ended with a decisive victory for the forces of freedom—and a single sustainable model for national success: freedom, democracy, and free enterprise.”⁹

Ketika *Rose Revolution* terjadi Georgia memiliki elemen yang dijunjungnya yaitu demokrasi. Prinsip demokrasi tersebut diusung Georgia tidak hanya di negaranya namun juga bagi Eurasia. Presiden Saakhsvilli menyuarakan demokrasi sebagai salah satu elemen negaranya. Saakashvilli menyebut Georgia sebagai “beacon of democracy” pasca periode runtuhnya Uni Soviet. Sejak saat itu, demokrasi menjadi elemen yang dalam pembangunan politik yang mengalami stagnasi di Eurasia. Ukraina, Asia Tengah, dan kawasan Kaukasus berharap bahwa demokrasi dapat membawa kawasan tersebut pada masa depan yang lebih baik.

Perkembangan ini sangat menguntungkan AS yang mengusung kebebasan dan demokrasi dalam kebijakan luar negerinya. Presiden AS pada saat itu, Presiden George W. Bush, sedang giatnya mempromosikan demokrasi lebih jauh ke kawasan Timur Tengah. Kebijakan luar negeri AS saat itu adalah mengedepankan elemen demokrasi. Pada bulan Mei 2005 Presiden Bush berkunjung ke Tbilisi Georgia. Dimana kunjungan tersebut merupakan pertama kalinya presiden AS berkunjung ke Asia Tengah atau kawasan Kaukasus. Kunjungan tersebut menandakan bentuk apresiasi AS terhadap Georgia yang menjadikan demokrasi sebagai elemen penting

⁸ *Ibid.*, hlm 9.

⁹ *Ibid.*, hlm 9.

dalam kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, Georgia secara simbolis merupakan gambaran dari keberadaan AS di kawasan tersebut. Georgia dipandang AS sebagai negara yang dapat mencerminkan betapa pentingnya pembentukan demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi yang ada di Georgia merupakan bentuk kepentingan AS di kawasan Kaukasus.

Georgia memiliki arti penting bagi AS yaitu Georgia membantu AS dalam menjunjung prinsip-prinsip yang diusung oleh AS yaitu keadulatan negara, demokrasi, dan keamanan. Sehingga Georgia menjadi titik utama *sphere of influence* AS di Kaukasia, yang membentuk mata rantai politik luar negeri AS di Eurasia.

IV.2 Kepentingan Ekonomi AS

Alasan kedua mengapa AS mendukung Georgia dalam konflik Georgia dengan Rusia pada periode 2001-2010 adalah karena adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai AS yaitu kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi AS di Georgia terkait dengan sumber daya alam minyak dan gas.

AS merupakan negara adidaya yang memiliki sistem perekonomian yang cukup stabil. Walaupun beberapa kali mengalami pasang surut dalam perekonomiannya, namun tidak terlalu berpengaruh banyak dalam perekonomiannya. Dalam hal minyak dan gas, pada tahun 2009 AS menempati posisi paling puncak sebagai negara yang mengkonsumsi minyak paling besar di dunia. Dengan kebutuhan minyak yang sangat besar tersebut, AS merasa memerlukan negara-negara yang memiliki pasokan minyak yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan minyak negaranya. Sehingga negara-negara dengan persediaan sumber daya alam minyak dan gas, serta negara-negara yang menjadi negara transit dalam pendistribusian minyak dan gas menjadi sangat penting keberadaannya bagi AS.

Lihat diagram 4.2.

Diagram 4.2

Negara Pengonsumsi Minyak Terbesar Tahun 2009



Sumber : U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Pada tahun 2006 mantan Presiden AS George W. Bush pernah menyatakan bahwa AS bergantung pada minyak. Dalam pernyataannya tersebut George W. Bush menambahkan bahwa kebutuhan minyak AS yang sangat banyak sangat bergantung pada kawasan Timur Tengah. Kemudian lebih lanjut George W. Bush menyatakan akan mengganti 75% kebutuhan minyak yang didatangkan dari Timur Tengah dengan negara-negara penghasil minyak lainnya.

“America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. It was time for the United States to move beyond a petroleum-based economy and make our dependence on Middle Eastern oil a thing of the

past. It's time to replace more than 75 percent of our oil imports from the Middle East by 2025".¹⁰

Namun sebenarnya kebijakan negara AS akan minyak telah dinyatakan sebelumnya oleh mantan Presiden AS Richard Nixon pada tahun 1973 mengenai keinginan Rusia untuk mengedepankan kebutuhan akan energi yang sangat besar. Politik internasional yang terjadi pada saat itu adalah adanya embargo minyak oleh negara-negara Arab sehingga menyebabkan keterbatasan sumber daya minyak yang dapat diimpor oleh AS dan harga minyak yang melambung tinggi. Sehingga muncul gagasan untuk menggantungkan sumber daya minyak ke kawasan lain yang terbilang cukup aman.

Sebenarnya AS telah sangat berhati-hati terhadap kebutuhannya akan minyak, terutama setelah terjadinya kenaikan harga minyak yang sangat drastis pada tahun 1973-1973 dan 1978-1980. AS sempat menyatakan untuk mengurangi ketergantungannya akan minyak dari luar negeri. Namun yang terjadi adalah AS justru semakin meningkatkan ketergantungan minyaknya dari luar negeri. Bahkan tidak hanya ke negara-negara Arab saja, namun ke negara-negara yang memiliki sumber energi minyak yang banyak.

AS memperluas cakupan kebijakan negaranya kepada negara-negara pecahan Uni Soviet sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Hancurnya Uni Soviet tahun 1991 tersebut langsung disikapi sejumlah investor AS dengan berburu ke negara-negara pecahan Uni Soviet, khususnya industri migas di cekungan Kaspia. Sejak saat itu investor AS menginvestasikan uangnya kepada negara-negara tersebut, terutama pada industri minyak dan gas Teluk Kaspia. Pada awal tahun 1990-an perusahaan energi Barat mengembangkan beberapa proyek seperti ladang minyak Tengiz di Kazahstan, ladang minyak Azeri-Chirag-Guneshli (ACG) di Azerbaijan, dan ladang gas alam Dauletabad di Turkmenistan. Sejak saat itu, negara-negara pecahan Uni Soviet yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan AS setuju untuk membangun rute jalur pipa minyak dan gas dengan memotong beberapa negara-negara yang dianggap AS

¹⁰ *Ibid.*, hlm 9.

dapat menghambat kepentingan negaranya, seperti Rusia dan Iran. Jalur pipa tersebut tidak hanya memotong pendapatan kedua negara tersebut dari biaya transit, namun juga dapat mengurangi hambatan yang mungkin terjadi akibat ketegangan politik yang ada. Selain itu, pemotongan jalur pipa minyak dan gas tersebut memberikan peluang kepada AS untuk membangun aliansi yang pro-AS. Sudah sejak lama jalur pipa di Eropa Timur didominasi oleh Rusia, terutama rute jalur pipa minyak dari Teluk Kaspia menuju negara-negara Barat.

Perusahaan-perusahaan dan konsultan AS mendesak negara-negara bekas Uni Soviet menyetujui rute jaringan pipa migas yang menghindari negeri-negeri yang dianggap AS sebagai musuh, yaitu Rusia dan Iran. Usaha AS untuk memenuhi kepentingan ekonominya terkait dengan jalur pipa minyak dan gas adalah melalui negara-negara kecil yang pro-AS di kawasan Kaukasus yaitu Georgia dan Azerbaijan. AS menjalin kerjasama dengan kedua negara tersebut, bersama dengan Kazakhstan dan Turkmenistan, membangun jalur pipa minyak dan gas dibawah laut yang dapat menghubungkan Kazakhstan dan Turkmenistan di bagian timur pesisir Teluk Kaspia, dan Azerbaijan di bagian baratnya. Jalur pipa minyak dan gas Baku (Azerbaijan)-Tbilisi (Georgia)-Ceyhan (Turki) ini akan menjadi jalur ekspor energi yang sangat besar menuju Mediterania. Jalur pipa minyak ini akan sangat menguntungkan bagi AS, dan akan mengurangi dominasi Rusia dalam hal rute energi dari Kaspia menuju Barat.

Jalur pipa minyak dan gas ini menghabiskan dana sampai dengan 4 miliar USD dengan saham sebesar 30% dimiliki oleh *British Petroleum* Inggris. Jalur ini terpusat di Georgia, tidak membawa minyak Kaspia melalui Iran, Afghanistan dan Pakistan, atau Rusia. Jalur pipa minyak dan gas Baku- Tbilisi - Ceyhan (BTC) ini diresmikan pada masa pemerintahan Presiden AS Bill Clinton, dimana bersama Azerbaijan, Georgia, dan Turki, menyatakan bahwa jalur pipa tersebut merupakan pencapaian yang sangat penting pada akhir abad ke-20.

Dalam kalkulasi kepentingan ekonomi AS akan minyak dan gas di Georgia, ketika *Rose Revolution* terjadi membuka peluang bagi AS. Saat itu pemerintah Georgia yang mengganti rezim Eduard Shevardnadze dengan pemimpin yang

nasionalis menjadikan Georgia sebagai negara yang tidak lagi dalam pengaruh Rusia. Sehingga, peluang untuk mengembangkan proyek-proyek jalur pipa minyak yang menguntungkan bagi AS menjadi terbuka lebar.

Pembukaan jalur pipa minyak dan gas ini, selain untuk kepentingan ekonomi AS, juga merupakan bagian rencana geostrategis besar AS untuk mendapatkan pengaruh di negara-negara bekas wilayah Uni Soviet, sejak adikuasa ini bubar pada tahun 1991. Strategi AS punya tiga tujuan utama yaitu, pertama, memastikan pintu masuk dunia Barat pada cadangan energi di wilayah Kaspia dan Asia Tengah. Kedua, mengurangi pengaruh Rusia di wilayah bekas Uni Soviet Selatan, serta ketiga meningkatkan demokrasi di negara-negara kawasan, yaitu dari Georgia di ujung Barat sampai Kirgizia yang berbatasan dengan Cina. Wilayah ini sampai disebut pipastan, karena begitu besarnya cadangan energi yang ada.

Pentingnya keberadaan minyak Laut Kaspia juga semakin meningkat. Kawasan Kaspia terbilang sangat strategis sebagai pemasok minyak, mengingat kondisi kawasan tersebut yang stabil dan tidak penuh konflik. Tidak seperti pemasok minyak lainnya yang cenderung rawan konflik dengan kondisi politik negara yang tidak stabil seperti di Iran, Arab Saudi, dan Venezuela. Selama beberapa dekade terakhir, kawasan Kaukasus dipandang sebagai suatu kesempatan yang bagus untuk menciptakan tempat transit yang menghubungkan Eropa ke Asia Tengah, China, dan India melalui Laut Hitam, Georgia, Azerbaijan, dan Laut Kaspia.

Kesempatan untuk mengembangkan perdagangan di kawasan tersebut sangat besar. Georgia dan Azerbaijan menjadi jembatan bagi pengembangan proyek tersebut. Pembangunan jalan yang menghubungkan Kars di Turki dengan Akhalkalaki di Georgia, serta rehabilitasi jalur rel Akhalkalaki-Tbilisi, bersama dengan jalur-jalur yang telah ada, akan menghubungkan Istanbul ke Laut Kaspia. Selain itu, bersama dengan pembangunan rel yang menghubungkan Kazakhstan ke China, akan membangun rel yang menghubungkan Istanbul ke China, akan membuat sistem transportasi dan distribusi lebih cepat dan tidak mahal.

Dari segi geoekonomi Georgia merupakan jalur minyak Kaspia dan Laut Hitam menambah pentingnya posisi Georgia di mata AS. Georgia menjadi negara

yang krusial dalam pengembangan proyek koridor transportasi Timur-Barat. Koridor ini masih dalam upaya pengembangan jalur pipa minyak dan gas, namun dengan signifikansi yang lebih luas. Disini Georgia memainkan peranan dalam pengembangan sumber daya energi di kawasan Kaukasus baik dalam hal distribusi maupun pengembangan proyek-proyek jalur pipa minyak dan gas baru yang dapat menghubungkan kawasan Kaukasus dengan negara-negara Barat. Kepentingan energi AS di Kaukasus bersinggungan langsung dengan kepentingan Rusia untuk mendominasi ladang-ladang minyak disana, di sisi lain, AS terus mendukung negara-negara Kaukasia untuk menyalurkan minyak dan gasnya langsung pada AS, tanpa melewati jalur yang telah ditetapkan Rusia.

Sehingga sangat terlihat bahwa konflik di Georgia bukan semata konflik politik peninggalan masa lalu saat Uni Soviet pecah. Lebih dari itu adalah konflik perebutan perdagangan minyak dan gas di kawasan Kaukasus antara AS dengan Rusia.

IV.3 Mengimbangi Kekuatan Rusia di Eropa Timur

AS memiliki kepentingan-kepentingan yang sangat vital di kawasan Eropa, yaitu menciptakan kawasan yang demokratis, stabil, makmur, perdagangan terbuka, peluang investasi yang besar, serta kerjasama ekonomi, politik dan militer AS di kawasan Eropa dan kawasan penting lainnya. Kerjasama di kawasan ini tidak hanya meningkatkan keuntungan di masing-masing negara, tapi juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan tersebut.

Selain karena kepentingan ekspansi dan ekonomi AS di Eropa Timur, alasan Rusia mendukung Georgia adalah untuk mengimbangi kekuatan Rusia di Eropa Timur. Kawasan Kaukasus terdiri dari negara-negara yang baru merdeka, yaitu Kaukasus Selatan (Armenia, Azerbaijan, Georgia), dan negara federal Rusia yaitu Kaukasus Utara (Chechnya, Ingushetia, Ossetia Utara, Kabardino-Balkaria, Karachai-Cherkessia, dan Adygea.). Setelah runtuhnya Uni Soviet, kawasan ini menjadi kawasan yang tidak stabil kondisinya dalam dunia politik. Struktur negara yang

lemah, konflik negara secessionis yang tidak selesai, kemiskinan, dan ketidakstabilan politik.

Selain karena permasalahan internal kawasan, kawasan Kaukasus digambarkan sebagai kawasan tempat persaingan antara Rusia dengan AS. Kedua negara tersebut saling mengejar kepentingan negaranya di kawasan tersebut. AS dan Rusia berusaha saling mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Kaukasus untuk mempertahankan kepentingan negaranya. Seperti halnya dalam konflik antara Rusia dengan Georgia dimana mendapatkan dukungan dari AS.

Bentuk dukungan AS ke Georgia secara tidak langsung terlihat sebagai perlawanan AS terhadap Rusia. Sejak berakhirnya Perang Dingin, AS terlihat menjadi negara yang sangat kuat dan paling berpengaruh dalam percaturan dunia internasional. Pengaruh AS tersebut juga terlihat dikawasan Eropa Timur, yaitu seperti kedekatan AS dengan Georgia. Serangan Rusia ke Georgia tidak dapat menghilangkan kesan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap Georgia yang sangat pro-Barat. Georgia banyak mendapatkan dukungan baik secara moral maupun material dari AS.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia muncul sebagai kekuatan yang besar baik dari segi demografi maupun sumber daya yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Rusia yang sempat turun perlahan mulai meningkat. Dari segi kekuatan militer, sampai saat ini Rusia masih menempati posisi teratas.

Lihat tabel 4.1

Tabel 4.1
Tabel Kekuatan Militer Negara-Negara Pecahan Uni Soviet
Tahun 1995-1996

No.	Negara	Jumlah Personil	Tank	Kapal Perang	Helikopter	Artileri
1.	Rusia	1.520.000	19.000	2.150	2.851	20.650
2.	Ukraina	542.000	4.775	846	204	3.685
3.	Kazakhstan	40.000	624	133	44	1.850
4.	Belarus	98.400	2.348	349	40	1.579
5.	Uzbekistan	25.000	179	126	43	325
6.	Turkmenistan	11.000	530	171	20	345
7.	Tajikistan	2.000-3.000	?	?	13	?
8.	Kyrgyzstan	7.000	204	0	65	3.685
9.	Georgia	?	48	2	1	60
10.	Armenia	60.000	128	6	7	225
11.	Azerbaijan	86.700	325	46	18	343
12.	Moldova	11.850	0	27	8	61
13.	Estonia	3.500	0	0	1	0
14.	Latvia	6.950	0	0	5	45
15.	Lithuania	8.900	0	0	3	0

Sumber : Neil Macfarlane "Realism and Russian Strategy after the Collapse of the USSR" dalam Ethan B. Kapstain & Michael Mastanduno, 1999, *Unipolar Politics*, (USA : Colombia University Press), hlm 226.

Prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia adalah kebijakan ekonomi dan pertahanan. Yang pertama adalah Rusia fokus pada pencapaian kepentingan negara dalam hal pertahanan negara. Seperti yang tertuang dalam konsep kebijakan negara Rusia *Security Concept 1994* yang menyatakan bahwa ancaman utama negara Rusia

adalah melemahnya kekuatan negara dan posisi Rusia dalam komunitas dunia dan diantara hubungannya dengan negara-negara lain.¹¹

Keanggotaan NATO menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara Eropa khususnya negara-negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Antara tahun 2000 dan 2004 rezim pro-Moscow di Ukraina dan Georgia digantikan oleh rezim pro-Barat. Kedekatan pemimpin Georgia dengan Barat, terutama AS, membuat Rusia terancam akan pengaruh AS yang dapat semakin meluas di Eropa. Ditambah lagi, keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO semakin membuat Rusia marah. Perang di Ossetia Selatan menggambarkan ketidaksukaan Rusia akan ekspansi NATO ke negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Sehingga, serangan Rusia ke Georgia tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Rusia tidak ingin ditekan oleh keberadaan Barat di Eropa.¹²

Ketidaksukaan Rusia terhadap pengaruh AS yang besar tidak hanya ditunjukkan pada keinginan Georgia untuk menjadi anggota NATO, tetapi juga pada hal-hal lain seperti keinginan AS untuk membangun *ballistic missile defenses* di Eropa Timur, dominasi dalam hal energi di Asia Tengah dan Kaukasus, dan pengakuan kedaulatan Kosovo.¹³ Melihat semua itu, terlihat bahwa masih adanya sisa-sisa persaingan antara Rusia dengan AS yang masih ada sejak berakhirnya era Perang Dingin.

Menanggapi sikap Rusia yang lebih memilih menggunakan kekuatan militer dalam menghadapi Georgia, salah satu pejabat di AS mengatakan bahwa saat ini Rusia kembali menunjukkan keinginannya dalam menggunakan kekerasan.

“ the war in Georgia does not show the Russians have greater military capability, but it demonstrates a greater willingness to use force”¹⁴

¹¹ Neil Macfarlane. “Realism and Russian Strategy after the Collapse of the USSR”, dalam Ethan B. Kapstein & Michael Mastanduno, *Unipolar Politics*, (USA : Colombia University Press, 1999), hlm 232.

¹² Owen Matthews. *Loc.Cit.*

¹³ Stephen Sestanovich. *Loc.Cit.*

¹⁴ The Economist. *Loc.Cit.*

Walaupun Rusia menunjukkan kekuatan militernya pada serangannya ke Georgia, AS merasa bahwa persenjataan yang dimiliki Rusia tidak sebanding dengan yang dimiliki negara-negara Barat, terutama AS. AS menambahkan bahwa senjata-senjata tersebut hanya cukup untuk menakuti negara-negara pecahan Uni Soviet yang lain.¹⁵

Pernyataan AS tersebut ditanggapi oleh Rusia dengan mengatakan :

“Russian forces are not modern. Some of the weapons date back to the 1960s and 1970s. But that does not mean they cannot kill you”¹⁶

Georgia secara nyata terlihat sebagai objek konfrontasi terbuka antara AS dengan Rusia didalam kawasan Eropa Timur. Terlebih lagi ketika terjadinya *Rose Revolution* yang pada akhirnya menggeser posisi Presiden Georgia Eduard Shevardnadze pada Desember 2003. Pada saat itu AS mendukung oposisi yang mengambil alih pemerintahan. Militer Georgia yang mendapatkan pelatihan intensif dari AS tidak dapat berbuat banyak ketika AS mendesak Shevardnadze untuk mundur. Saat itu pengganti Shevardnadze, Mikail Sakhshvilli lebih membatasi pengaruh Rusia di Georgia, dan lebih dekat dengan AS.

Beberapa tindakan Rusia menunjukkan keinginan Rusia untuk menggunakan kekuatannya dalam mengontrol infrastruktur transportasi energi untuk mencegah negara lain menghalangi kepentingan luar negeri Rusia. Contoh konkritnya antara lain di Kazakhstan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh Kazakhtan dengan Chevron pada tahun 1993, Kazakhstan mendapatkan investasi dari AS sebesar 20 miliar USD untuk mengembangkan ladang minyak Tengiz. Disini oli akan diekspor ke pasar-pasar negara Barat. Rusia sangat tidak menyenangi kerjasama antara Kazakhstan dengan AS tersebut karena dapat mengganggu jalannya proyek jalur pipa Rusia di Novorossiisk di Laut Hitam. Rusia tidak suka dengan adanya pengembangan ladang minyak Tengiz karena mereka harus membagi proyek pengembangan energi Kazakhstan dengan negara lain. Rusia menggunakan kekuatannya dengan melakukan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

monopoli pada sektor jalur pipa untuk mengurangi pemasukan yang akan didapat oleh Kazakhstan dan negara-negara lain.

Dilihat dari perspektif geopolitik, monopoli jalur pipa minyak oleh Rusia mengakibatkan terbatasnya kemungkinan dari negara-negara lain untuk menggantikan posisi Rusia dalam sektor energi, terutama pengiriman minyak dan gas. Sehingga, untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan jalur pipa minyak di kawasan Kaukasus harus mendapatkan persetujuan dari Rusia. Yang terjadi kemudian adalah Chevron sempat menunda pengembangan proyek Tengiz tersebut, mengurangi rencana investasi di Kazakhstan, dan membagi sistem pemodalannya dengan perusahaan Mobil yang bertujuan untuk membagi resiko yang mungkin akan terjadi dan juga mengundang perusahaan minyak Rusia LUKOil untuk ikut serta dalam pengembangan proyek Tengiz tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir Laut Kaspia menjadi sumber pendapatan yang terbesar bagi AS dan Rusia terkait dengan sumber daya minyak dan gas. Laut Kaspia saat ini menjadi kawasan potensial sebagai sumber minyak yang baru bagi AS dan Rusia. Selain itu kawasan Kaukasus menjadi koridor untuk mengakses pendistribusian sumber daya minyak dan gas ke pasar dunia. Hal inilah yang menjadi faktor persaingan antara Rusia dengan AS yang saling mengedepankan kepentingan nasional negaranya. Kawasan Kaukasus seringkali disebut sebagai tempat persaingan baru antara Rusia dengan AS.¹⁷

Terkait dengan rute jalur pipa BTC yang merupakan proyek AS dengan Georgia, pada Desember 2007 menandatangani kerjasama dengan Kazakhstan dan Turkmenistan untuk membangun jalur pipa gas alam baru sepanjang Laut Kaspia timur, dimana jalur pipa tersebut dapat membawa kapasitas gas alam untuk ekspor sebanyak 20 miliar m³ per tahun. Pembangunan jalur pipa tersebut justru semakin mempertajam persaingan antara Rusia dengan AS di Eropa Timur.

Rusia sangat memahami betapa berharga energi minyak alam dan gas dalam meningkatkan pendapatan negara Rusia. Seperti AS, Rusia juga mengincar negara-

¹⁷ R. Craig Nation, Russia, The United States, and The Caucasus, *Strategic Studies*, Februari 2007, hlm 1-40.

negara tetangga untuk membuat kesepakatan dalam bidang minyak alam dan gas. Rusia berhasil membuat kesepakatan dengan Kazakhstan dan Turkmenistan untuk membangun sebuah jaringan pipa gas baru sepanjang pantai timur Kaspia menuju Rusia. Pembangunan jaringan pipa yang diharapkan bisa mengekspor 20 miliar meter kubik per tahun pada tahapan awalnya, dipandang sebagai sebuah pukulan atas harapan AS yang menginginkan pemerintah negara-negara Asia Tengah berkomitmen mengirimkan minyak dan gasnya ke jaringan pipa trans-Kaspia yang bersambung dengan jaringan pipa di Kaukasus yang dibangun dengan dukungan AS.

Persaingan yang terjadi antara Rusia dengan AS saat ini memang tidak terlihat secara eksplisit. Namun tindakan-tindakan dan pernyataan-pernyataan dari kedua negara tersebut menyiratkan adanya persaingan yang masih cukup terasa. Dalam *Foreign Policy Concept* Rusia tahun 1993, secara terang-terangan Rusia ingin meningkatkan perekonomiannya untuk menjadi negara *great power* pada abad 21.

“Without economic rebirth, Russia cannot become a full-fledged member of the club of great powers at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries, and, consequently, it will be more difficult to defend its own interest and the interests of Russians in the international arena.”

Dilihat dari segi ekonomi, kekuatan ekonomi Rusia memang tidak sebesar AS, namun pengaruh Rusia di Eropa Timur terutama di negara-negara bekas pecahan Uni Soviet masih terasa. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh Rusia untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara pecahan Uni Soviet masih sering terjadi. Rusia seringkali menggunakan elemen penggunaan kekerasan atau *use of force*, secara resmi atau tidak resmi, untuk mencampuri urusan negara-negara pecahan Uni Soviet untuk memperbesar pengaruh Rusia dan/atau mencegah keuntungan yang akan didapat oleh negara-negara lain yang berpotensi mengancam kekuatan Rusia.¹⁸

Georgia merupakan negara yang paling terbuka dan liberal diantara negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya. Letaknya strategis disepanjang koridor timur-

¹⁸ Neil Macfarlane. *Op.Cit.*, hlm 235.

barat yang menghubungkan Eropa ke Laut Kaspia, dan menjadi negara transit utama bagi operasi AS di Asia Tengah. Komitmen AS untuk memperjuangkan kemerdekaan Georgia mulai tumbuh sejak awal tahun 1990-an. Komitmen AS ini dibentuk sejak adanya kecenderungan penggunaan kekerasan oleh Rusia yang ditunjukkan kepada Rusia. Kemerdekaan Georgia sendiri tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan negara-negara Barat terutama AS yang terus mendukung Georgia. Kebijakan anti-Rusia dan kebijakan pemerintah demokratis di Georgia telah menjadikan Rusia meningkatkan pengawasannya terhadap Georgia.

Sejak runtuhnya Uni Soviet, negara-negara Eropa Tengah dan negara-negara pecahan Uni Soviet berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Bahkan beberapa negara tersebut berusaha untuk terbebas dari sistem pemerintahan komunis. Saat ini beberapa negara pecahan Uni Soviet berusaha untuk mendapatkan status keanggotaan dalam NATO. Sejak masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, AS berusaha mendekati beberapa negara-negara komunis untuk dapat menjalin kerjasama baik dengan negara-negara dalam satu kawasan tersebut, ataupun dengan AS sendiri, dan akhirnya membawa posisi NATO menjadi *Partnership for Peace* (PEP).

Melihat rencana perluasan keanggotaan yang saat ini sedang gencar dilakukan NATO di wilayah negara-negara pecahan Uni Soviet, rencana ini muncul berkaitan dengan keinginan NATO untuk memperluas peran militernya di seluruh Eropa dan juga untuk membuka jalur yang lebih efisien terkait dengan akses menuju Timur Tengah. Perluasan keanggotaan NATO ini, yang tentunya menyertakan Georgia sebagai negara pecahan Uni Soviet, ditentang oleh Rusia yang masih menyimpan keinginan untuk menjalankan peran militernya di negara-negara pecahan Uni Soviet, hal ini nampak jelas dalam penolakan Rusia atas permintaan Georgia untuk mengurangi personil militernya di wilayah Georgia.

Banyaknya negara-negara pecahan Uni Soviet yang ingin menjadi anggota UE juga sangat mengkhawatirkan Rusia, karena dengan integrasi negara-negara tersebut ke dalam UE, maka secara perlahan Rusia akan kehilangan pengaruhnya dan kesempatan untuk kembali mendominasi negara-negara tersebut. Walaupun rencana perluasan yang dijalankan oleh UE tidak secepat program perluasan NATO, tetapi

penolakan keras Rusia terhadap keinginan Georgia untuk menjadi anggota keduanya, baik NATO maupun UE, cukup menjadi bukti bahwa Rusia terus berusaha membangun kembali hegemoninya di Kaukasus, sekaligus membendung pengaruh negara-negara Barat kepada negara-negara Kaukasus.

Kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur merupakan area yang strategis bagi kepentingan AS. Selain menyebarkan nilai-nilai AS dan mendapatkan kepentingan ekonomi, AS berusaha untuk mendapatkan pengaruh yang negara-negara di kawasan tersebut. Rusia dan AS sama-sama memiliki kepentingan yang ingin dicapai di kawasan Kauskasus, terutama Georgia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik Georgia dengan Rusia adalah mengimbangi kekuatan Rusia di kawasan Eropa Timur dan Kaukasus. Dengan banyaknya negara-negara pecahan Uni Soviet yang ingin menjadi anggota UE dan NATO, dukungan negara-negara tersebut terhadap perang melawan terorisme yang dijalankan oleh AS, kerjasama ekonomi dan militer yang semakin intens dengan AS, serta beberapa negara pecahan Uni Soviet yang menunjukkan sistem pemerintahan yang pro Barat, semakin membuka peluang bagi AS untuk masuk ke kawasan Eropa Timur dan Kaukasus.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Serangan Rusia ke Georgia pada Agustus 2008 sangat mengagetkan dunia internasional. Selama beberapa hari pasukan Rusia menyerang militer Georgia menguasai Ossetia Selatan, dan mengancam ibukota Georgia, Tbilisi. Kemudian Rusia mengumumkan pengakuannya atas kemerdekaan Ossetia Selatan, dan provinsi separatis Georgia yang lain, Abkhazia. Serangan tersebut terjadi tak lama setelah beberapa hari sebelumnya Georgia menyerang Ossetia Selatan dan Abkhazia dalam upaya Georgia untuk mengembalikan kedua provinsi separatis tersebut kedalam teritorial Georgia.

Dalam konflik antara Rusia dan Georgia ini sangat jelas dukungan yang diberikan oleh AS terhadap Georgia. Ancaman tersebut merupakan bukti dukungan AS terhadap Georgia. Sejak itu hubungan antara Georgia dengan AS semakin dekat. Bahkan pada Januari 2010, Georgia dan AS resmi menandatangani kerjasama *strategic partnership* terutama dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Dengan adanya dukungan AS terhadap Georgia tersebut terlihat adanya persaingan yang terjadi diantara AS dan Rusia. Dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik antara Rusia dan Georgia menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Mengingat bahwa akar konflik ini berasal dari konflik antara Georgia dengan negara *secessionist* itu sendiri, dan tidak terkait dengan Rusia ataupun AS.

Penulis menggunakan teori *Offensive Realism* dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teori tersebut, penulis memiliki hipotesis terkait dengan penelitian terhadap dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik Georgia-Rusia periode 2001-2010 ini yaitu, pertama, alasan dukungan AS ke Georgia karena keinginan AS untuk melakukan ekspansi di kawasan Eropa Timur dan kawasan Kaukasus. Kedua, dukungan AS ke Georgia karena terkait dengan kepentingan AS yaitu kepentingan ekonomi. AS berusaha untuk mendapatkan keuntungan dibidang ekonomi yaitu terkait dengan jalur pipa gas. Ketiga, dukungan AS ke Georgia karena kepentingan

AS dalam menyebarkan pengaruhnya. Keinginan Georgia untuk bergabung dengan NATO semakin membuka peluang bagi AS untuk memperbesar pengaruhnya di Georgia, kemudian meluas kepada kawasan Eropa Timur dan kawasan Kaukasus. Dengan adanya kedekatan dengan Georgia, AS berharap dapat melakukan ekspansi ke seluruh kawasan Eropa Timur dan kawasan Kaukasus, baik dalam bidang militer maupun ekonomi, dengan tujuan akhir mencapai kepentingan nasionalnya.

Penelitian ini berhasil menjelaskan apa saja yang menjadi alasan AS mendukung Georgia dalam konflik Rusia dengan Georgia periode 2001-2010 tersebut., yaitu, pertama, karena terkait dengan keinginan AS untuk melakukan ekspansi ke kawasan Eropa Timur. Kerjasama yang dilakukan oleh AS tidak terlepas dari kepentingan nasional AS yaitu pertahanan negara, mempromosikan nilai-nilai demokratis AS, menciptakan tatanan dunia yang baru, dan memperbesar kesejahteraan ekonomi negaranya. AS memiliki kepentingan-kepentingan yang sangat vital di kawasan Eropa, yaitu menciptakan kawasan yang demokratis, stabil, makmur, perdagangan terbuka, peluang investasi yang besar, serta kerjasama ekonomi, politik, dan militer AS di kawasan Eropa dan kawasan penting lainnya. Georgia merupakan negara yang sangat pro-Barat. Pemimpin Georgia, presiden Sakaahsvilli yang berkiblat ke Barat sangat menjunjung nilai-nilai yang diusung oleh AS. Georgia memiliki arti penting bagi AS yaitu Georgia membantu AS dalam menjunjung prinsip-prinsip yang diusung oleh AS yaitu keadulatan negara, demokrasi, dan keamanan. Sehingga Georgia menjadi titik utama *sphere of influence* AS di Kaukasus, yang membentuk mata rantai politik luar negeri AS di Eurasia.

Kedua, alasan AS mendukung Georgia dalam konflik Rusia dengan Georgia periode 2001-2010 karena terkait dengan faktor ekonomi yaitu kepentingan ekonomi AS terkait dengan minyak dan gas. Usaha AS untuk memenuhi kepentingan ekonominya terkait dengan jalur pipa minyak dan gas adalah melalui negara-negara kecil yang pro-AS di kawasan Kaukasus yaitu Georgia. memastikan pintu masuk dunia Barat pada cadangan energi di wilayah Kaspia dan Asia Tengah. Kawasan Kaspia terbilang sangat strategis sebagai pemasok minyak, mengingat kondisi kawasan tersebut yang stabil dan tidak penuh konflik. Tidak seperti pemasok minyak

lainnya yang cenderung rawan konflik dengan kondisi politik negara yang tidak stabil seperti di Iran, Arab Saudi, dan Venezuela. Georgia merupakan jalur minyak Kaspia dan Laut Hitam menambah pentingnya posisi Georgia di mata AS. Georgia menjadi negara yang krusial dalam pengembangan proyek korridor transportasi Timur-Barat. Disini Georgia memainkan peranan dalam pengembangan sumber daya energi di kawasan Kaukasus baik dalam hal distribusinya, maupun pengembangan proyek-proyek jalur pipa minyak dan gas baru yang dapat menghubungkan kawasan Kaukasus dengan negara-negara Barat.

Ketiga, alasan AS mendukung Georgia dalam konflik Rusia dengan Georgia periode 2001-2010 karena terkait keinginan AS untuk mengimbangi kekuatan Rusia di Eropa Timur. Kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur merupakan area yang strategis bagi kepentingan AS. Selain menyebarkan nilai-nilai AS dan mendapatkan kepentingan ekonomi, AS berusaha untuk mendapatkan pengaruh yang negara-negara di kawasan tersebut. Selain untuk mendapatkan pengaruh, terkait juga dengan persaingan kepentingan ekonomi dengan Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, Laut Kaspia menjadi sumber pendapatan yang terbesar bagi AS dan Rusia terkait dengan sumber daya minyak dan gas. Kawasan Kaukasus menjadi koridor untuk mengakses pendistribusian sumber daya minyak dan gas ke pasar dunia. Hal inilah yang menjadi faktor persaingan antara Rusia dengan AS yang saling mengedepankan kepentingan nasional negaranya.

Melalui analisis dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik Georgia dengan Rusia diatas maka dapat disimpulkan bahwa dukungan AS terhadap Georgia mencakup kepentingan nasional AS dalam banyak hal seperti kepentingan ekonomi, keinginan ekspansi AS, dan mengimbangi kekuatan Rusia di kawasan Eropa Timur dan Kaukasus. Posisi Georgia merupakan negara yang strategis bagi AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya tersebut.

V.2 Rekomendasi

Dari berbagai temuan-temuan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan bahwa AS memiliki kepentingan-kepentingan nasional

yang ingin dicapai di kawasan lain. Bila dibandingkan dengan Rusia, kekuatan AS memang jauh lebih kuat, baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas.

Rekomendasi untuk penelitian lanjutan mengenai dukungan AS terhadap Georgia dalam konflik Georgia dengan Rusia adalah, pertama, perlu adanya pengembangan konsep selain dari interaksi *great powers* untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, misalnya dilihat dari geopolitik kawasan Kaukasus yang membuat *great powers* bersaing di kawasan tersebut.

Kedua, secara empiris dapat dilakukan perbandingan interaksi *great powers* di negara-negara Kaukasus yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan Georgia. Dengan begitu dapat dilihat pola interaksi *great powers* yang lebih mendalam.

Ketiga, analisis dukungan AS terhadap Georgia dapat digambarkan secara mendetail dilihat dari kepentingan keamanan energi (*energy security*) suatu negara, dalam hal ini ditujukan untuk AS. Keamanan energi bisa menjadi penelitian selanjutnya yang cukup menarik dimana merupakan sebuah konsep yang menggambarkan sebuah negara mampu mempertahankan diri dan melakukan pembangunan dengan mengutamakan keamanan dan ketersediaan cadangan energi yang memadai dengan harga yang terjangkau, baik minyak ataupun variasi jenis energi lainnya. Hal ini semakin penting dengan kenyataan bahwa dinamika ekonomi dan politik turut mempengaruhi pasokan energi yang sangat penting bagi setiap negara, terutama negara-negara besar.

Keempat, secara metodologis, dalam hal pengumpulan data diperlukan pengembangan data yang lebih mendalam mengenai kebijakan luar negeri AS di kawasan Eropa dan Kaukasus. Dengan melengkapi data-data melalui dokumen-dokumen milik pemerintah maka penggambaran mengenai dukungan AS terhadap Georgia dapat disajikan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Brown, Archie & Llia Shevtsova. 2001. *Gorbachev, Yeltsin and Putin : Political Leadership in Russia's Transation*. Washington : Carnegieen Dowmenty International Peace.
- Ikenberry, G. John. 1999. *American Foreign Policy*. USA : Longman.
- Ikenberry, G. John. 2002. *America Unrivaled : The Future of The Balance of Power*. Cornell University Press.
- Kegley Jr., Charles W. & Eugene R. Wittkopf, 1997. *World Politics: Trend and Transformation*. New York: St. Martin Press.
- Kapstern, Ethan B and Michael Mastanduno. 1999. *Unipolar Politics : Realism and State Strategies After the Cold War*. USA : Columbia University Press.
- Mankoff, Jeffrey. 2009. *Russian Foreign Policy : The Return of Great Power Politics*. UK : Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Mearsheimer, John J. 2005. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York : W.W. Norton & Company Ltd.
- Notosusanto, Indrya Smita. 1996. "Politik Global Amerika Serikat Pasca Perang Dingin", dalam Juwono Sudarsono, dkk., *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*. (Jakarta: Pustaka Jaya)
- Singarimbun, Masri, 1989. Metode dalam Proses Penelitian. Dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, ed. *Metode Penelitian Survei Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES.
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2001. *International Relations : Perspective and Themes*. England : Pearson Education Limited.

Dokumen Resmi

- _____. 2005. *Rusia dan Asia Mutakhir*. Jakarta : Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Indonesia.

_____. 1994. *Konsep Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Negara-Negara Bekas Uni Soviet*. Jakarta : Departemen Luar Negeri RI.

Jurnal

Blank, Stephen J, et.all. 2008. *U.S Policy in Balkans : A Hobson's Choice*. Strategic Studies. pp 1-39.

Blank, Stephen J dan Richard Weitz. 2010. *The Russian Military Today and Tomorrow : Essays in Memory of Mary Fitzgerald*. Strategic Studies. pp 1-474.

Blank, Stephen J. *The NATO-Russia Partnership : A Marriage of Convenience or A Troubled Relationship?*. November 2006. Strategic Studies. pp 1-102.

Cooley, Alexander. 2009. *Western Values as Power Politics : The Struggle for Mastery in Eurasia*. Global Dialogue : Winter 2009. pp. 82-91.

Cornell, Svante E. . 2007. *Georgia After The Rose Revolution : Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy*. Strategic Studies. February 2007. pp.1-47

Fahrurroji, A. 2008. *Konflik Ossetia Selatan dan Strategi Keamanan Rusia di Kawasan Kaukasus*. Glasnotst Vol 4 No. 2. Oktober 2008-Maret 2009.

Herspring, Dale R. 2010. *Is Military Reform in Russia For "Real"? Yes, But..*. Dalam Stephen J. Blank dan Richard Weitz. *The Russian Military Today and Tomorrow : Essays in Memory of Mary Fitzgerald*. Strategic Studies. Juli 2010.

Hewitt, George. *Abkhazia, Georgia, and the Crisis of August 2008 : Roots and Lessons*. Global Dialogue. Winter/Sping. 2009. hlm 11-22.

Hill, Fiona. 2004. *Energy Empire: Oil, Gas and Russia's Revival*, The Foreign Policy Centre September 2004. Strategic Studies. pp 1-38.

Hopf, Ted. 2005. *Identity, legitimacy, and the use of military force : Russia's Great Power identities and military intervention in Abkhazia*. Review of International Studies (2005, 31, 225-243).

King, Charles. 2008. *The Five-Day War*. Foreign Affairs : Volume 87, Number 6, November/December. pp. 2-11.

Kraemer, Thomas D. 2006. *Addicted To Oil : Strategic Implications of American Oil*

Policy. Strategic Studies. pp.1-18

Matthews, Owen. 2008. *A Respectable Russia*. NEWSWEEK Magazine. Vol. CLII No.9. September 1st. pp : 12-15.

Nalbandov, Robert. 2009. *Battle of Two Logics : Appropriateness And Consequentiality in Russian Interventions in Georgia*. Caucasian Review of International Affairs : Vol. 3 (1), Winter 2009. pp. 20-35.

Nation, R. Craig and Michael McFaul. 1997. *The United States and Russia Into The 21st Century*. Strategic Studies. pp. 1-84.

Nation, R. Craig. 2007 *Russia, The United States, and The Caucasus..* Strategic Studies. February 2007. pp 1-40.

Nation, R. Craig. *U.S. Interests in The New Eurasia*. November 2007. Strategic Studies. pp. 1-34.

Sanders, Deborah. 2006. *Ukraine After The Orange Revolution : Can It Complete Military Transformation and Join The U.S.-Led War On Terrorism?.* Strategic Studies. pp 1-50.

Sestanovich, Stephen. 2008. *What Has Moscow Done : Rebuilding U.S.-Russian Relations*. Foreign Affairs : Volume 87, Number 6, November/December. pp12-28.

Trenin, Dmitri. *Russia's Threat Perception an Strategic Posture*. Strategic Studies. November 2007. Hlm 35-49.

Tsygankov, Andrei P. *Blaming Moscow: The Power of the Anti-Russia Lobby*. Global Dialogue; Winter 2009; 11, ABI/INFORM Global. pg. 64-73

Welt, Cory. *Balancing the Balancer: Russia, the West, and Conflict Resolution in Georgia*. Global Dialogue; Summer 2005; 7, 3/4; ABI/INFORM Global. pg. 22-36.

Surat Kabar

The Economist. *Advancing, Blindly*. 20 September 2008.

Website

Asep Setiawan. 2008. *Doktrin Strategi Perang Dingin dan Sesudahnya*. Diunduh

dalam <http://theglobalpolitics.com/?p=10> Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.

Global Security. *Georgian territories bombed by Russian jets*. Diunduh dalam <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/georgia-2008-bomb.htm>. Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.

Global Security. *Georgia Train and Equip program (GTEP)*. Diunduh dalam <http://www.globalsecurity.org/military/ops/gtep.htm>. Diakses pada 15 Februari 2011. Pukul 9.30 WIB.

Global Security. *Georgia Security & Stability Operations (Georgia SSOP)*. Diunduh dalam <http://www.globalsecurity.org/military/ops/gssop.htm>. Pada 15 Februari 2011. Pukul 9.30 WIB.

Global Fire Power. *Proven Oil Reserves*. Diunduh dalam <http://www.globalfirepower.com/proven-oil-reserves-by-country.asp>. Diakses pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Global Fire Power, *Oil Consumption*. diunduh dari <http://www.globalfirepower.com/oil-consumption-by-country.asp>. Diakses pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Global Fire Power, *Oil Production*. diunduh dari <http://www.globalfirepower.com/oil-production-by-country.asp>. Diakses pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Global Fire Power. *Defense Spending Budget*. Diunduh dari <http://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp>. Diakses pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Kompas Cyber Media. *Perburuan Migas di Kaspia*. Minggu 14 September 2008. Diunduh dalam <http://internasional.kompas.com/read/2008/09/14/22234348/perburuan.migas.di.kaspia>. Pada 2 Juni 2011. Pukul 10.00 WIB.

Setiawan, Asep. 2008. *Doktrin Strategi Perang Dingin dan Sesudahnya*. Diunduh dalam <http://theglobalpolitics.com/?p=10> Diakses pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.

New Energy News diunduh dari <http://newenergynews.com/2008/08/georgias-pipelines-and-europes-choice.html>. Diakses pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.

Times Online. *Georgia: Europe fears for oil supply as clash threatens pipeline*.

- Diunduh dalam http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/natural_resources/article4499863.ece . Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.
- Times Online. *Analysis: Energy Pipeline That Supplies West threatened by War Georgia Conflict*. 8 Agustus 2008. Diunduh dalam <http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article4484849.ece> Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.00 WIB.
- U.S Energy Information Administration. *Country Brief Analysis : Russia*. Diunduh dari <http://www.eia.doe.gov/cabs/Russia/Background.html>. Diakses pada 26 Februari 2011, Pukul 10.00 WIB.
- The U.S. Department of State Official Website. *U.S. Response to Efforts for Conflict Resolution in Caucasus (May 27)*. Diunduh dalam <http://georgia.usembassy.gov/latest-news/official-statements-2010/u.s.-response-to-efforts-for-conflict-resolution-in-caucasus-may-27>. Diakses pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.
- The U.S Department of States Official Website. *Read-out of the President's Bilateral Meeting with President Saakashvili of Georgia*. (November 19). Diunduh dalam <http://georgia.usembassy.gov/latest-news/official-statements-2010/read-out-of-the-presidents-bilateral-meeting-with-president-saakashvili-of-georgia.-november-19>. Diakses pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.
- The U.S Department of States Official Website . 2009. *Georgia and the United States : Strategic Partnership for Democracy and Security*. Remarks by the Minister of Foreign Affairs of Georgia H. E. Mr. Grigol Vashadze at the Carnegie Endowment for International Peace. Washington DC, June 23rd 2009. Diunduh dalam <http://www.america.gov/st/texttrans-english/2009/January/20090109145313eaifas0.2139093.html> Diakses pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.
- The United States Department of States. 2009. Office of the Coordinator of U.S Assistance to Europe and Eurasia. *Foreign Operations Appropriated Assistance Fact Sheet. December 2009*. Diunduh dalam <http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/140638.htm>. Diakses pada 6 Februari 2011. Pukul 10.00 WIB.
- VOA News. *Rusia: Rencana Penempatan Rudal Amerika di Kaukasus*. 21 September 2009. Diunduh dalam <http://www.voanews.com/indonesian/news/a-32-2009-09-21-voa2-85217397.html?rss=topstories>. Diakses pada 2 Juni 2011. Pukul 10.00 WIB.
- White House Government. Fact Sheet : US Support for Georgia, *The United States*

Supports The Recovery, Stability, And Continued Growth Of Georgia's Economy. 3 September 2008. Diunduh dalam <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/09/20080903-6.html>. Pada 15 Februari 2011. Pukul 09.30 WIB.